

Menuju Perencana Profesional

SIMPUL

PERENCANA

Volume 13 | Tahun 6 | Desember 2009

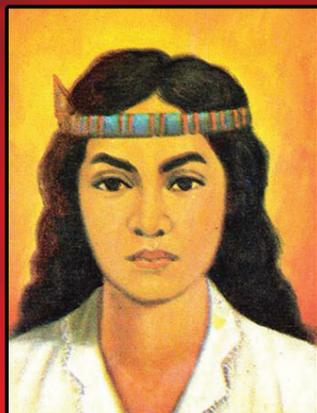
DIKLAT
PERENCANA PEMBANGUNAN
YANG DIBUTUHKAN
PEMERINTAH DAERAH



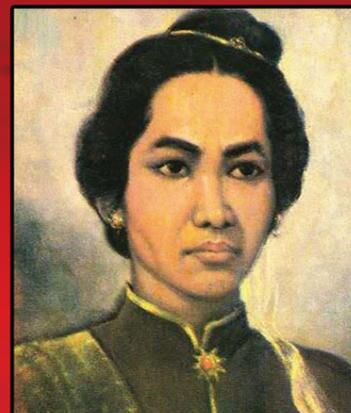
ISSN 1693-4229

E-Mail : simpul@bappenas.go.id

SEMANGAT PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM UPAYA PERBAIKAN KUALITAS BANGSA



M. Christina Tiababu



Cut Nyak Dbien



Cut Nyak Meutia



R.A. Kartini



Walanda Maramis



Dewi Sartika



Nyai Achmad Dahlan



Rangkayo Rasuna Said

...SELAMAT
Hari Ibu...

SUSUNAN REDAKSI:

SIMPUL PERENCANA

Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS).

PELINDUNG :

Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS

PENASEHAT :

SESMENNEG PPN/SESTAMA BAPPENAS

PENANGGUNG JAWAB :

Kepala Pusbindiklatren

PEMIMPIN UMUM :

Meily Djohar

PEMIMPIN REDAKSI :

Eko Suratman

WAKIL PIMPINAN REDAKSI :

Wignyo Adiyoso

DEWAN REDAKSI :

Guspika, Robert, Agus Manshur, Haryanto, Hari Nasiri, Zamilah Chairani, Edy Purwanto

REDAKTUR PELAKSANA :

Sugiyanti, Edy Susanto, Maslakh Murni, Widy, Wahyu Pribadi

EDITOR :

Dedi Nurtanio

GRAFIS & LAYOUT :

Hendra Yudiyanto

ADMINISTRASI / KEUANGAN :

Lina Indriawati, Dwiyanto

DISTRIBUSI/SIRKULASI :

Sugiyanti

ALAMAT REDAKSI :

Gedung Diklat Pusbindiklatren Bappenas
Jl. Proklamasi 70 Jakarta, 10320
Telp. (021) 31931481
E-Mail : simpul@bappenas.go.id

"..sudah bukan zamannya lagi hasil-hasil penelitian unggul disimpan di dalam laci arsip. Mari kita cermati, lingkungan dan masyarakat marjinal menanti implementasinya ..."

Sentilan yang dilontarkan Mohamad Machdi, seorang Perencana Madya pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang artikelnya kami tampilkan dalam Majalah Simpul Perencana edisi 13 ini rasanya patut kita simak betul. Senada dengan Machdi yang mengajak masyarakat ilmiah untuk 'turun gunung' mengimplementasikan penelitian-penelitian unggul bagi pemberdayaan masyarakat, kami pun dari Simpul Perencana tak henti-hentinya mengajak insan perencana untuk terus menulis, menulis, dan menulis. Dan media ini, Majalah Simpul Perencana, mungkin adalah sarana yang tepat bagi para perencana untuk menuangkan gagasan dan berbagai pemikirannya yang pasti akan berguna bagi masyarakat.

Menuangkan gagasan dalam sebuah format tulisan yang ilmiah (apalagi juga populer), memang masih menjadi persoalan klasik bagi kebanyakan dari kita. Bahkan bagi yang telah menyandang gelar akademik yang tinggi. Karena menulis memang juga soal tradisi. Seperti kita pahami, kebanyakan dari kita konon masih lebih akrab dengan tradisi lisan daripada tradisi tulis.

Mungkin lantaran itu pulalah tak berlebihan kiranya pada saat Pusbindiklatren Bappenas menggelar Rakor & Workshop Diklat Perencana Pembangunan di Jakarta, 7-8 Desember 2009 yang lalu, ada sesi khusus yang berisi Pemaparan Mengenai Kemampuan Alumni Diklat Perencanaan Pembangunan dalam Membuat Tulisan Ilmiah. Sayang, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Bappenas, yang menjadi narasumber pada sesi tersebut, tidak secara khusus menyoroiti persoalan itu.

Terlepas dari itu, seperti biasa dalam edisi 13 Rubrik Cakrawala kali ini kami mengangkat topik yang kami pikir cukup menarik untuk diperbincangkan, yaitu "Diklat yang Dibutuhkan Daerah". Tentu saja untuk membedah lebih dalam tentang topik tersebut, kami telah berusaha menggali informasi dari pemangku kepentingan yang terkait dengan persoalan diklat yang dibutuhkan daerah tersebut.

Kami merasa apa yang kami sajikan dalam Majalah Simpul Perencana kali ini masih jauh dari kata sempurna dan memuaskan. Karena itu kami tak pernah lelah untuk mengajak Anda semua berpartisipasi mengirimkan tulisan dan laporan Anda. Lebih dari itu kami juga selalu menanti saran maupun kritik Anda demi kemajuan Simpul Perencana.

Salam.



hal.5 | LIPUTAN KHUSUS:**Musrenbangnas**

Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 kali ini yang mengangkat tema "Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan" bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan untuk waktu lima tahun mendatang. Tentu saja dengan memperhatikan potensi dan karakteristik daerah dan tantangan global.

hal.10 | CAKRAWALA:**Diklat Perencanaan Apa Yang Diperlukan ?**

Pusbindiklatren - Bappenas dalam kapasitasnya sebagai instansi pembina perencana telah menyelenggarakan berbagai diklat, baik diklat gelar maupun non gelar, namun apakah diklat-diklat tersebut telah menjawab kebutuhan di daerah dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan.

hal.22 | INFO:**Sekilas Informasi Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2010**

Program S3 Dalam Negeri, Program S2 Dalam Negeri di 17 program studi di 11 Universitas dalam negeri, yang direkomendasikan oleh Pusbindiklatren, program S2 *Linkage* di 6 Universitas di Indonesia yang bekerjasama dengan universitas di luar negeri, persiapan Bahasa Inggris EAP (*English for Academic Purposes*) untuk program S2 di luar negeri. Program Non Gelar yaitu Diklat Jabatan Fungsional Perencana, Diklat Substantif dan Magang

Informasi Diklat JFP (Jabatan Fungsional Perencana)

Informasi tentang diklat Jabatan Fungsional Perencana

hal.30 | WAWANCARA:**James Rompas
Kepala Beppeda Bitung**

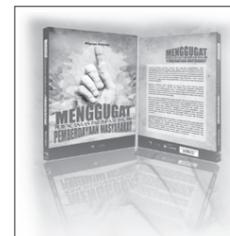
Pernah mengikuti Diklat Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan yang diadakan Pusbindiklatren-Bappenas, dan sekarang menduduki posisi sebagai Kepala Bappeda Pemkot Bitung, Ir. James Rompas, M.Si, mungkin adalah sosok yang tepat untuk memperbincangkan tema "Diklat Perencanaan yang Dibutuhkan Daerah".

hal.39 | LIPUTAN:**Rakornas dan Workshop Diklat Perencana Pembangunan Nasional 2009**

Kepala Pusbindiklatren-Bappenas, Dr. Avip Syaefullah, drg, M.Pd, dalam laporannya pada saat pembukaan Rakor dan Workshop menjelaskan bahwa evaluasi program *capacity building* bagi perencana ini merupakan bagian dari siklus peningkatan kompetensi perencana pembangunan di unit perencana untuk meningkatkan kualitas dan relevansi perencanaan pembangunan di pusat dan daerah.

hal.46 | KOLOM:**Diklat, Bintek, dan Sosialisasi, di Mata Seorang Pengajar**

Tanpa evaluasi yang tuntas sekaligus revitalisasi yang pas, rasa-rasanya apapun bentuk dan jenis diklat, bintek, atau sosialisasi yang akan dilakukan tak lebih dari sekedar "ritual administratif" yang kelewat reguler dan membosankan sekaligus sekedar "media" yang paling efektif untuk menghabiskan anggaran yang "nyaman" dan "aman" meskipun jelas-jelas akan memboroskan belanja pemerintah setiap tahunnya.

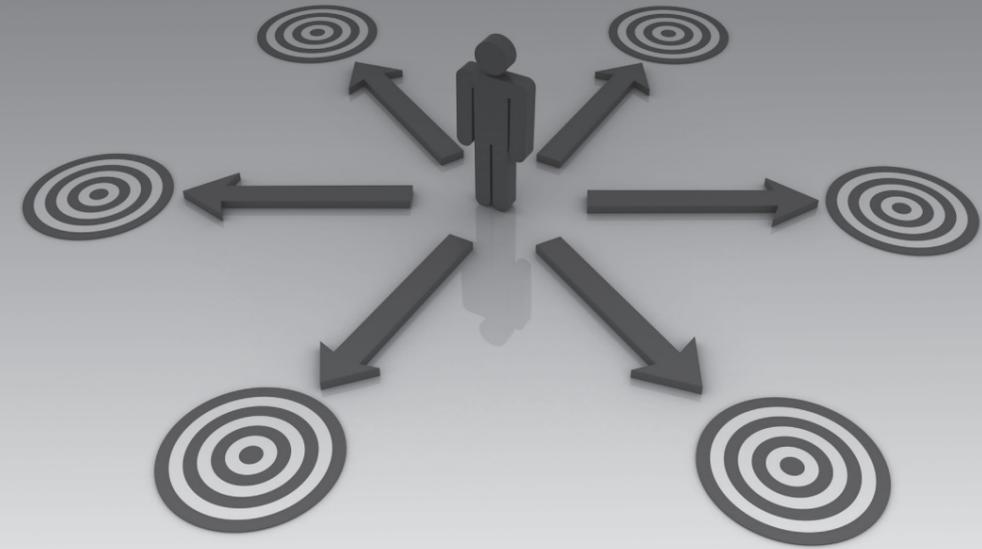
**Resensi buku:**

"Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat"

Kata partisipasi memang tak akan pernah hilang dari "kamus" demokrasi dan pembangunan, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Dalam negara yang demokrasinya lebih maju, memang partisipasi lebih terkenal digunakan dalam diskursus politik dan demokrasi ketimbang dalam manajemen pembangunan.... **baca Hal 62**

Lainnya:

GERBANG	9
Forum AP2I	21
Liputan	33
Sosok Alumni	41
Akademika	44
Opini	48



Oleh: **Dr. Avip Syaefullah, drg, M.Pd**
Kepala Pusbindiklatren - Bappenas

Posisi Strategis Musrenbangnas 2009**Pendahuluan**

Aparatur pemerintah, terutama perencana pembangunan (JFP) wajib memahami posisi strategis Musrenbang, baik Musrenbangda maupun Musrenbangnas. Secara politis, Musrenbangnas merupakan forum tertinggi dalam proses penetapan rencana strategis yang ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah. Dengan demikian, Musrenbangnas pada awal masa pemerintahan SBY - Budiono yang diselenggarakan pada tanggal 11 - 13 Desember 2009 yang merumuskan rencana strategis dalam rumusan RPJMN 2010-2014, perlu dipahami posisi dan peran strategisnya ke masa yang akan datang. Hal ini penting guna memperkuat proses profesionalisme Perencana, baik di pemerintah pusat maupun daerah yang berbasis wawasan nasional dalam membuat perencanaan pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, setiap perencana pembangunan ha-

rus konsisten terhadap posisi dan peran strategis RPJMN 2010-2014 yang tersurat (*explicit*) dalam UU no 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Secara Komprehensif RPJMN 2010-2014 merupakan bagian tidak terpisahkan dari arah strategis setiap tahapan skala prioritas utama pada setiap RPJMN seperti terbagi sebagai berikut:

1. RPJM ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman, damai, adil dan demo-kratis, serta tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
2. RPJM ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan lptek serta penguatan daya saing perekonomian.
3. RPJM ke-3 (2015–2019) dituju-
4. RPJM ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Secara empiris, kondisi saat ini merupakan hasil dari pelaksanaan RPJMN ke-1 dengan tiga strategi pembangunan ekonomi yaitu *pro growth*, *pro jobs* dan *pro poor*. Tiga strategi ini ditetapkan dengan target terjadi per-



cepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (*growth with equity*), sehingga ke-sempatan kerja makin terbuka dan berdampak pada makin banyaknya keluarga Indonesia yang diuntungkan dari perangkap kemiskinan sekaligus mampu menghadapi berbagai goncangan, baik yang bersifat individual maupun global seperti krisis ekonomi. Tiga strategi tersebut berhasil menciptakan kondisi perekonomian yang tumbuh rata-rata 6%. Bahkan laju pertumbuhan sektor non migas sudah mencapai 6,6% (2005-2008). Percepatan pertumbuhan ekonomi ini tercermin pula dalam peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia dalam USD. Berdasarkan data PDB terakhir dan nilai tukar rata-rata tahun 2008, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia telah mencapai USD 2.271 pada akhir 2008, naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pendapatan per kapita tahun 2004 sebesar USD 1.186. Pertumbuhan ekonomi ini berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan dengan ukuran apa pun yang digunakan. Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung BPS, telah menurun menjadi 15,4% (atau 35 juta orang) pada Maret 2008, dibandingkan 16,7% (36,1 juta orang) pada tahun 2004.

Dalam mengatasi tindak pidana korupsi, hasil pelaksanaan RPJMN I mendapatkan apresiasi dari sejumlah lembaga internasional, seperti dari UNDP dalam *Report on Corruption for 2008* menyatakan bahwa untuk ketiga indeks persepsi korupsi, yaitu *Control Corruption Index (CCI)*, *International Country Risk Guide (ICRG) Corruption Score*, dan *Corruption Perception Index (CPI)* di Indonesia dinyatakan telah menunjukkan banyak perbaikan. Untuk Indeks CCI, terjadi peningkatan dari -1,01 pada tahun 2000 menjadi -0,77 pada tahun 2006 untuk skala antara -2,50 - 2,50. Demikian pula indeks ICRG, nilai korupsi Indonesia untuk tahun 2006 berada pada skala 2,33, naik dari 1,92 di tahun 2000 untuk skala 0-6, dengan skala 6 adalah nilai untuk potensi korupsi paling kecil. Sedangkan indeks CPI, Indonesia memperoleh nilai 2,30 pada tahun 2007, meningkat dari 1,70 di tahun 2000 untuk skala 1-10, dengan 10 adalah nilai untuk potensi korupsi paling kecil.

Secara menyeluruh, pelaksanaan RPJMN I yang dielaborasi ke dalam Rencana Kegiatan Pemerintah tiap tahun anggaran, telah menciptakan kondisi yang relevan dengan Renstra Nasional dan menggambarkan rasa optimistik dengan didapatkannya penghargaan tingkat dunia. Hal ini terlihat dalam laporan resmi bulan November tahun

2008 dari pemerintah AS yang bertajuk "*Global Trend 2025: A Transformed World*", secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia bersama dengan Iran dan Turki akan menjadi pilar kekuatan ekonomi dunia setelah India, Cina, Brasil dan Rusia pada tahun 2025.

Melihat perkembangan demikian, maka para Perencana pembangunan, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintahan daerah harus memahami bahwa proses Musrenbangnas bulan Desember 2009 merupakan proses tertinggi dalam menyusun rencana strategis pembangunan untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan dari RPJMN I melalui RPJMN II tahun 2010-2014. Hal ini penting bagi perencanaan pembangunan guna menyusun rencana pembangunan di masing masing instansi dan pemerintah daerah agar relevan dengan Renstra nasional, yaitu RPJP, RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah II (2010-2014)

Dalam pidato Presiden pada saat pembukaan Musrenbang, tergambarakan beberapa paradigma pembangunan sebagai kebijakan Presiden yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan monev pembangunan. Baik oleh pemangku jabatan, khususnya oleh para Perencana



Pembangunan dalam melaksanakan Tupoksinya yaitu; (1) pelaksanaan demokrasi dan pembangunan perlu mengikutsertakan rakyat dan memberi peluang ke rakyat untuk memberikan pemikirannya; (2) demokrasi dan pembangunan harus seimbang dengan kesejahteraan.

Secara politis, paradigma pembangunan tersebut relevan dengan kerangka visi Indonesia 2014 yang dijadikan sebagai tema utama Musrenbangnas 2009 yaitu "**Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan**" dengan penjelasan sebagai berikut;

- (1) Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta

hak asasi manusia;

- (3) Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Berdasarkan kebijakan strategis yang digariskan dalam pidato Presiden tersebut, ada enam kebijakan pembangunan yang dideklarasikan Presiden yang harus dijadikan pedoman para JFP dalam menyusun program ataupun kegiatan pembangunan selama lima tahun yaitu; (1) reformasi aparatur pemerintah; (2) pembangunan yang inklusif, adil dan merata; (3) pembangunan berdimensi kewilayahan; (4) pengintegrasian potensi ekonomi dan geo ekonomi, yang beorientasi ekonomi lokal; (5) *growth with equity, pro job*, dan *pro poor policy*; dan (6) kualitas kehidupan rakyat yang diukur dari pendidikan kesehatan dan kesejahteraan.

Mengacu kepada enam kebijakan strategis dalam kurun waktu tahun 2010 -2014, pantaslah kalau Presiden mencanangkan tema pembangunan sampai tahun 2014 dengan tema pembangunan "*Development for all by the*

Stabilitas Keuangan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Strategi dan langkah pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang sebentar lagi akan segera disahkan harus dikelola dengan baik. Demikian juga dengan stabilitas sistem keuangan. Jika tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali mengalami krisis seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Pengelolaan sistem keuangan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri

years 2014". Dengan demikian maka para Perencana Pembangunan (JFP) bisa memahami posisi dan peranan strategis RPJMN II hasil Musrenbangnas 2009.

Penutup

Sebagai pesan ahir buat JFP, gunakanlah kebijakan strategis yang tersurat dalam RPJMN II tahun 2010-2014, sebagai koridor dan pedoman dalam proses penyiapan dan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah /RKPD. Dan perhatikanlah lima agenda utama pembangunan sebagai upaya mewujudkan misi pembangunan 2010-2014, seperti tertera sebagai berikut, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi.

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi.

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan



Sinergikan Prioritas Pembangunan di Tingkat Pusat dan Daerah

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2010-2014 telah diselenggarakan pada tanggal 11-13 Desember 2009. Forum musyawarah yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Ruang Hall D1, Arena PRJ Kemayoran itu diikuti oleh para Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, perwakilan dunia usaha, lembaga profesi, LSM serta akademisi. Selain Presiden, turut memberikan pengarahan dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden Boediono dan tiga Menteri Koordinator masing-masing Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menko Kesra, Menko Polhukam, serta Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri. Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 kali ini yang mengangkat tema "Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan" bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan untuk waktu lima tahun mendatang. Tentu saja dengan memperhatikan potensi dan karakteristik daerah dan tantangan global.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN)/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, MA., pada saat Sidang Pleno Penjelasan Rancangan RPJMN 2010-2014 mengungkapkan Prioritas

Nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan dalam RPJMN 2010-2014. Menurut Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, MA, prioritas ini telah dicanangkan oleh Presiden terpilih, yaitu: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Pendidikan; Kesehatan; Peningkatan Kemiskinan; Ketahanan Pangan; Infrastruktur; Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Energi; Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pascakonflik; dan Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.

Prioritas pembangunan ini, menurut Meneg PPN/Kepala Bappenas, ditetapkan atas dasar tantangan pembangunan saat ini dan dengan memperhatikan program dan kegiatan pokok yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersifat realistis, penting, dan mendesak untuk dilaksanakan serta memiliki dampak nyata, terukur, dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, tambah Meneg PPN/Kepala Bappenas, prioritas pembangunan ini merupakan rencana aksi bagi strategi pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam tahun 2010-2014.

Masih menurut Meneg PPN/Kepala Bappenas, forum Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 akan mensinergikan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan nasional lima tahun

mendatang. Selain itu, akan membahas prioritas pembangunan nasional dan masukan kebijakan prioritas dari daerah dalam mendukung prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014. Musrenbangnas juga akan menghasilkan kesepakatan untuk saling bersinergi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan prioritas pembangunan nasional baik di tingkat pusat dan di daerah antara Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah melalui rancangan RPJMN 2010-2014 untuk dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, terutama dalam hal substansi program/kegiatan, volume, sasaran, dan lokasi.

Meneg PPN/Kepala Bappenas juga menjelaskan bahwa beberapa prioritas pembangunan jangka pendek adalah menghilangkan, meminimalisasikan segala hambatan (*debottlenecking*), baik di bidang regulasi, infrastruktur, transportasi, logistik, dan kelangkaan listrik. Tujuannya adalah mewujudkan Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi domestik yang terintegrasi.

Sementara itu, Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas Ir. Syahrial Loetan, MCP, menambahkan bahwa dokumen yang akan dihasilkan Musrenbang RPJMN 2010-2014 akan menjadi cetak biru pembangunan Indonesia lima tahun ke depan. Dokumen tersebut akan memberikan gambaran kepada masyarakat, apa yang akan dilakukan pemerintah lima tahun mendatang. "Masyarakat akan mempunyai gambaran prioritas-prioritas apa saja yang akan didahulukan pemerintah," ujar Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas.

Selain itu, lanjut Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas, masyarakat juga akan bisa mengakses berapa besaran anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah untuk bidang-bidang yang diprioritaskan. Karena tidak semua kegiatan perekonomian dibiayai pemerintah, tetapi juga diharapkan berasal dari investasi dalam dan luar negeri. Lewat dokumen yang dihasilkan Musrenbangnas, masyarakat punya optimisme pembangunan lima tahun ke depan akan berdampak nyata, terukur, dan langsung dirasakan masyarakat. **(Dedi)**



Siapa Membutuhkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Apa?

"Berikanlah air minum itu hanya kepada orang yang haus". Kata-kata bijak seperti itu kerap kita dengar dari seseorang yang mengerti benar mengapa "harus bermanfaat". Mendidik dan melatih merupakan pekerjaan yang hasilnya tak bisa langsung tampak. Secara konseptual di dalam manajemen kinerja, seringkali orang menyebutnya sebagai indikator manfaat yang "intangible" atau "invisible". Kita tak dapat langsung melihatnya, juga tak dapat langsung merasakannya. Berbeda dengan memberikan air kepada orang yang haus. Orang tersebut akan langsung mengatakan, "Ah... Alhamdulillah terima kasih, sekarang saya sudah tidak haus lagi". Kita yang memberi dan orang yang diberi minum, sama-sama akan melihat, mendengar dan merasakan manfaat pemberian air minum itu. Makna filosofis kalimat bijak di atas sebelum mendidik dan melatih adalah: "kita harus tahu betul kebutuhan perencana daerah: (1) siapa yang membutuhkan?; (2) pendidikan dan pelatihan apa yang dibutuhkan?; dan (3) bagaimana cara mendidik dan melatih?"

Kesadaran bahwa Pusbindiklatren setelah selama bertahun-tahun melakukan pendidikan dan pelatihan perencanaan, perlu segera menjawab kedua pertanyaan itulah yang mendasari penentuan tema penerbitan majalah Simpul kali ini. Melalui berbagai tulisan yang memuat opini, pendapat, dan penilaian semua pihak: alumni, perguruan tinggi, pimpinan instansi perencanaan, atau siapapun, diharapkan akan memperkaya cakrawala lembaga ini dalam rangka mereviu dan mengkaji kembali seluruh program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang selama ini dilaksanakan. Selain itu, redaksi mengharapkan berbagai tulisan tersebut dapat memberikan inspirasi bagi para pembaca untuk ikut menilai dan memberi masukan kepada Pusbindiklatren, terutama dari aspek relevansi jenis-jenis diklat terhadap kebutuhan aparat perencana di daerah.

Dalam konteks "mengetahui kebutuhan daerah" jangan

lantas kemudian diartikan bahwa di masa datang Pusbindiklatren harus "menyesuaikan dengan keinginan daerah" begitu saja. Apabila hanya ini yang dilakukan, maka kita akan terjebak pada pola-pola kegiatan sosialisasi yang lebih bersifat praktis-patronis, tanpa pemahaman konsep teori yang cukup mendalam. Implikasinya justru akan lebih fatal, aparat daerah akan lebih labil dan mudah terombang-ambing oleh peraturan yang seringkali berubah-ubah. Jadi, idealnya suatu diklat baik metodologi pembelajaran, jenis, maupun target pesertanya disamping harus sesuai dengan kebutuhan daerah, juga perlu diisi dengan materi-materi teori dan konsep yang masif dan memperkuat pemahaman dasar, serta diselenggarakan dengan arah dan kebijakan nasional peningkatan kapasitas aparat perencana daerah.

Sebagaimana tulisan yang dimuat pada rubrik Cakrawala, pelaksanaan diklat yang dilakukan oleh Pusbindiklatren sudah dianggap efektif, namun dampak langsung dan tidak langsungnya bagi proses dan keluaran perencanaan di daerah, dinilai masih belum begitu jelas. B. Setiawan lebih lanjut mengusulkan perlunya kajian yang komprehensif dan independen, dan tiga buah rekomendasi yang harus dilakukan oleh Pusbindiklatren.

Pendapat berbeda dapat dibaca pada hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kota Bitung. Ir. James Rompas justru sudah merasakan dampak – baik terhadap pribadi maupun terhadap organisasi – dari diklat TMPP yang dulu pernah diikutinya. Sementara itu, Agus Mansur menulis perlunya Pusbindiklatren memperjelas perbedaan tujuan dan bentuk-bentuk: diklat (pendidikan dan pelatihan), bintek (bimbingan teknis) dan kegiatan sosialisasi, agar tidak disalahgunakan pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan pribadi. Menurutnya, daerah lebih membutuhkan sosialisasi dibandingkan dengan diklat atau bintek. Bagaimana pendapat Anda? Selamat Membaca.

(Dewan Redaksi)



Susanti Withaningsih*

Diklat Perencanaan Apa Yang Diperlukan ?

Pusbindiklatren - Bappenas dalam kapasitasnya sebagai instansi pembina perencana telah menyelenggarakan berbagai diklat, baik diklat gelar maupun non gelar, namun apakah diklat-diklat tersebut telah menjawab kebutuhan di daerah dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan?

The right man on the right job adalah adagium yang lazim kita dengan ketika menempatkan seseorang pada suatu jabatan. Artinya, jabatan strategis, berikanlah pada orang yang kompeten. Pesan yang ingin disampaikan adalah bila seseorang ingin jabatan, maka pertanyaan relevannya adalah apakah seseorang tersebut kompeten? Persoalannya kemudian menjadi tidak sederhana karena terkait tingginya tingkat kompetisi dalam era milenium ini. Apabila prinsip *the wrong man on the job* dipaksakan karena masih kuatnya kultur nepotisme atau memang kurang tersedia SDM kompeten, maka yang akan terjadi adalah kerusakan-kerusakan di muka bumi.

Tantangan terbesar untuk mewujudkan *the right man on the right job*, selain komitmen, adalah bagaimana cara meningkatkan kompetensi seseorang? Kompetensi dalam bidang apa? Muatan kompetensi apa yang diperlukan sesuai dengan tantangan yang dihadapi? Inilah beberapa pertanyaan krusial yang jawabannya lazimnya ditemukan dalam suatu mekanisme pendidikan dan pelatihan [Diklat].

Diklat tidak hanya dimiliki oleh institusi negara dalam menjalankan tugasnya, melainkan juga penting bagi organisasi-organisasi lain dalam mencapai tujuan yang dicanangkan oleh organisasi tersebut. Diklat lazimnya berperan meningkatkan kemampuan SDM untuk bidang tertentu dengan

berbagai jenjang. Dalam beberapa kasus, berfungsi menyiapkan SDM dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan tujuan diadakannya Diklat. Dalam perkembangannya, Diklat juga telah dimanfaatkan oleh pihak swasta sebagai usaha komersial terkait dengan tuntutan pasar kerja.

Pusbindiklatren – Bappenas merupakan salah satu penyelenggara diklat gelar dan non gelar bagi para perencana pemerintah mulai di tingkat pusat maupun daerah. Pusbindiklatren ini penting kedudukannya karena akan menentukan keberhasilan pembangunan di Indonesia melalui upaya peningkatan kapasitas SDM perencana di daerah. Karena peran pentingnya itu, maka pertanyaan awal tadi, Diklat perencanaan apa yang dibutuhkan oleh para perencana di daerah juga menjadi penting. Pertanyaan ini muncul karena para perencana tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai kondisi, permasalahan, dan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga tampaknya akan sulit untuk merancang suatu model Diklat yang seragam untuk semua perencana di seluruh Indonesia.

Selama ini Pusbindiklatren – Bappenas telah bekerjasama dengan beberapa universitas di seluruh Indonesia untuk bekerjasama dalam mengadakan diklat baik gelar maupun non gelar. Dalam mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan Diklat gelar bagi para perencana, maka program studi telah berusaha menyesuaikan kurikulum yang diberikan dengan kebutuhan umum para perencana baik di tingkat daerah maupun pusat. Kerjasama tersebut di atas sangat bermanfaat karena mampu mendekatkan kemampuan teoritis universitas dengan kebutuhan nyata para perencana di lapangan. Para peserta Diklat gelar ini umumnya menggunakan kasus/persoalan yang mereka hadapi di daerahnya masing-masing sebagai tugas akhir [*thesis*]. Yang diperlukan ke depan, selain meneruskan kerjasama yang selama ini berjalan, adalah



Pusbindiklatren menyelenggarakan Diklat berkerjasama dengan Institusi pendidikan dari dalam maupun luar negeri.

mengembangkan Diklat-Diklat khusus [*tailor-made training*], misalnya tentang perencanaan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan daerah aliran sungai terpadu, penyusunan dan/atau evaluasi rencana tata ruang wilayah menggunakan *analytical tool* Kajian Lingkungan Hidup Strategis [*Strategic Environmental Assessment*], dan model-model pengelolaan SDA berkelanjutan. Pengembangan model-model Diklat ini muncul dari hasil wawancara dari para peserta Diklat gelar di Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Unpad. Dengan demikian, pengembangan model-model Diklat tersebut argumentatif karena didasarkan pada kebutuhan.

Hasil wawancara juga menunjukkan beragamnya kebutuhan para perencana di daerah. Beragamnya kebutuhan model perencanaan ini memperlakukan kajian menyeluruh sehingga dihasilkan program-program prioritas. Oleh karena itu, Program Studi Magis-

ter Ilmu Lingkungan sebagai penyelenggara Diklat gelar di bidang lingkungan berusaha untuk memenuhi kebutuhan para peserta terutama di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Ke depan, diperlukan model-model Diklat non-gelar yang spesifik dan praktis di tingkat lapangan. Dengan demikian, ke depan, peningkatan kompetensi para perencana menjadi seorang perencana yang handal adalah "merencanakan diri sendiri". Filosofinya adalah bagaimana seseorang dapat mempercayakan suatu perencanaan yang bersifat global dan nasional apabila orang yang dipercayakan tersebut tidak bisa merencanakan sesuatu yang paling sederhana dalam hidupnya, yaitu "merencanakan dirinya sendiri".

***) Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran**



Teguh Widjinarako*

Konsep Pengembangan SDM Daerah Dalam Perpekstif LAN

Konsep pengembangan SDM di Indonesia, termasuk di daerah, sebenarnya dikembangkan atas dasar kompetensi jabatan. Artinya bahwa setiap kebutuhan diklat harus dirancang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatan tertentu. Setidaknya ada empat hal yang ingin dituju pengembangan pegawai melalui diklat, yaitu:

- Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional
- Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan bangsa
- Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat
- Menciptakan kesamaan visi, dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Seperti pula konsep yang dikembangkan di negara-negara lain, konsep pengembangan SDM aparatur melalui diklat dilakukan melalui dua cara, yaitu *pre-service training*, dan *in-service training*. *Pre-service training* diberikan pada pegawai-pegawai yang baru masuk sebagai pegawai negeri, sedangkan *in-service training* diberikan kepada mereka yang sudah berada pada posisi sebagai pegawai negeri.

Sesuai dengan konsep yang dikembangkan, *pre-service training* ditujukan untuk membentuk kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai sebelum mereka masuk dalam lingkungan birokrasi. Oleh karena itu, materi yang diberikan umumnya terkait dengan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sementara *in-service training*, yang dibagi ke dalam diklat kepemimpinan,

fungsi dan teknis, ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Persoalan yang Mengemuka

Dalam implementasi konsep pengembangan SDM sebagaimana disebutkan di atas tentu saja terdapat permasalahan-permasalahan yang kerap mengemuka, terutama dalam kaitan dengan pengembangan SDM di daerah, di antaranya adalah:

- Pengendalian kualitas. Meskipun materi diasumsikan sudah disusun sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang diinginkan, tetapi tampaknya dalam prakteknya belum tentu materi dimaksud diberikan secara utuh di dalam setiap penyelenggaraan diklat. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi pokok permasalahan. Pertama, karena kesulitan untuk memperoleh Widyaiswara yang me-

miliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan, sehingga Widyaiswara hanya memberikan materi apa adanya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kedua, pengorganisasian pelaksanaan diklat yang lemah, sehingga materi tidak dapat diberikan sebagaimana mestinya. Ketiga, kendali terhadap kualitas penyelenggaraan lemah, misalnya saja pihak penyelenggara tidak melakukan koordinasi dengan pihak LAN, atau dengan pihak instansi teknis/fungsional. Keempat, pengendalian terhadap materi yang diberikan lemah, misalnya saja materi yang diberikan sama sekali tidak diperbarui sesuai dengan perkembangan.

- Evaluasi. Seharusnya sistem pengembangan SDM melalui diklat selalu dievaluasi dalam rentang waktu tertentu. Evaluasi tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga berkaitan dengan sistem/strategi diklat dan sistem penyelenggaraannya. Apakah kompetensi yang ingin dibentuk dari diklat-diklat yang diselenggarakan sudah sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi? Apakah proporsi pemberian materi *knowledge*, *skills* dan *attitudes* sudah tepat? Dan sebagainya. Dalam rangka ini, LAN saat sedang melakukan evaluasi menyeluruh pada aspek materi diklat. Kritik yang seringkali muncul adalah apakah seluruh peserta diklat harus melalui tahapan yang sama meskipun memiliki level kompetensi yang berbeda. Tetapi di lain pihak, banyak sekali SDM aparatur di daerah memang sangat memerlukan materi yang diberikan dalam diklat. Dua kondisi yang berbeda, kondisi pertama seringkali muncul di pusat, sedangkan kondisi yang kedua seringkali muncul di daerah.

- Tenaga pengajar (Widyaiswara). Penyelenggaraan diklat di daerah seringkali dihadapkan pada permasalahan tenaga pengajar Widyaiswara. Widyaiswara umumnya hanya memiliki kemampuan yang terbatas, tidak selalu memperbarui materi dengan perkembangan terakhir, terlalu senior, tidak diberi target yang jelas oleh penyelenggara kecuali target selesai mengajar. Pemerintah daerah sering menggunakan tenaga Widyaiswara yang

dikirim dari pusat, jika tidak memiliki Widyaiswara yang dipandang mampu, tetapi berdampak pada biaya yang mahal. Namun jika diambil dari kalangan perguruan tinggi, seringkali materi yang diberikan lebih banyak bersifat teoritis bukan praktis yang dikehendaki oleh diklat.

- Sarana dan prasarana. Tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana diklat sangat beragam kondisinya di pemerintah daerah. Namun demikian, sangat sedikit yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan diklat. Jika sarana dan prasarana yang tidak memadai, maka tidak dapat pula diharapkan adanya penyelenggaraan diklat yang berkualitas.

Kewenangan dan Koordinasi Antar Intansi

Berkaitan dengan berbagai permasalahan tersebut di atas, sebenarnya sudah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Salah satu bentuk upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui koordinasi. Koordinasi yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara antara lain adalah untuk memastikan diklat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dilihat dari sisi materi, penyelenggaraan dan kebutuhan sarana dan prasarana. Setiap instansi yang akan menyelenggarakan diklat dalam jabatan, terutama berkaitan dengan diklat kepemimpinan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan LAN. Dalam hal ini LAN akan memastikan ketiga aspek tersebut memang sudah dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan.

Hal lain yang dilakukan pula oleh LAN adalah memberikan akreditasi pada unit-unit diklat tertentu di daerah. Dengan akreditasi, yang selalu diperbarui setiap tahun sekali, setiap unit diklat yang terakreditasi diperbolehkan untuk menyelenggarakan diklat tertentu.

Dalam kaitan dengan diklat fungsional, penyelenggaraan di daerah tidak hanya dikoordinasikan dengan LAN tetapi juga dengan pihak instansi fungsional yang menangani jabatan fungsional ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LAN, dalam kaitan dengan diklat, yaitu

sebagai instansi pembina diklat, maka berbagai penyelenggaraan diklat SDM daerah seharusnya dikomunikasikan dengan LAN. Praktek ini pada posisi tertentu sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya, tetapi pada kondisi tertentu, belum berjalan. Mengapa demikian? Terdapat banyak tingkatan kelembagaan yang berkaitan dengan diklat SDM daerah, yaitu diklat provinsi dan diklat-diklat pada masing-masing kabupaten/kota yang berada dalam lingkup provinsi tersebut. Sementara di tingkat pusat, terdapat diklat pada Departemen/Kementerian/Lembaga yang juga memiliki kepentingan masing-masing.

Dalam kaitan dengan diklat fungsional tertentu, misalnya diklat perencanaan, posisi LAN pada dasarnya adalah untuk menjamin penyelenggaraan diklat berlangsung sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Sementara materi diklat fungsional lebih ditentukan oleh instansi fungsional terkait. Jika ternyata ada permintaan dari daerah kepada LAN untuk menyelenggarakan diklat fungsional tertentu, maka LAN memiliki peran sebagai fasilitasi yang akan menghubungkan antara pemerintah daerah dengan instansi fungsional.

Tentang Diklat Gelar

Sementara itu berkaitan dengan diklat gelar, pada dasarnya diklat ini sangat memberikan dampak pada organisasi. Ada beberapa fakta pengalaman sebagai berikut: Pertama, alumni dari peserta ini memiliki kemampuan untuk memberikan pencerahan terhadap organisasi. Pencerahan dalam arti pembaruan-pembaruan yang diperoleh dari hasil belajar atau pengalaman belajar, yang mungkin pula dapat diterapkan pada organisasinya; Kedua, alumni dipandang memiliki kapasitas yang baru yang menghidupkan kompetensi sehat para pegawai dalam memberikan kontribusi pada organisasi; Ketiga, ketika kompetensi tumbuh, maka para alumni memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

***) Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara**



B. Setiawan*

Program Diklat Gelar Bagi Perencana: Refleksi/Pengalaman ‘Provider’

Pendahuluan

Meskipun program peningkatan kapasitas perencana telah cukup lama dilakukan oleh Pusbindiklatren-Bappenas, dalam delapan tahun terakhir ini, program ini meningkat secara signifikan, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Selama delapan tahun terakhir ini, telah ratusan staf PNS baik pusat dan daerah yang telah menikmati program peningkatan kapasitas perencana dari

Pusbindiklatren-Bappenas, baik program *degree* maupun *non-degree*. Tulisan ini merupakan refleksi Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada (MPKD UGM), sebagai salah satu *provider* program-program peningkatan kapasitas perencana tersebut. Tulisan ini difokuskan pada kasus program *degree*, khususnya program 13 bulan dan program master *linkage* atau *double de-*

gree dengan universitas di luar negeri.

Sebagai *provider* yang mengkhususkan diri pada perencanaan spasial, perlu diketahui bahwa sejak awal, MPKD UGM didirikan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kapasitas perencana, khususnya di daerah. Dengan kata lain, misi MPKD UGM tidak jauh berbeda dengan mandat dan tujuan Pusbindiklatren Bappenas. Kesamaan misi ini menjadikan kerjasama dan kemitraan antara keduanya berjalan lancar dan saling mengisi. Diyakini, *provider* lain dari berbagai perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Pusbindiklatren

juga mempunyai kesamaan misi, dan ini menjadi modal penting pelaksanaan program ini. Uraian berikut ini akan secara rinci menjelaskan pengalaman sekaligus rekomendasi Prodi dari sisi: rekrutmen peserta, kurikulum, proses belajar mengajar, peluang dan hambatan, serta manfaat program ini bagi Prodi.

Proses Seleksi/rekrutmen

Secara umum dapat dikatakan bahwa Prodi tidak cukup terlibat dalam proses seleksi peserta atau rekrutmen peserta. Meskipun demikian, masing-masing prodi menentukan beberapa syarat dan kriteria dasar seleksi, khususnya dari sisi TPA dan TOEFL. Selama ini, dapat dikatakan bahwa TPA masih layak dipakai sebagai salah satu kriteria seleksi. Yang dirasakan masih kurang adalah seleksi dari sisi jaminan karir peserta di bidang perencanaan. Ketiadaan seleksi dari sisi jaminan karir ini dikhawatirkan akan mengurangi efektifitas program ini, dalam pengertian bisa terjadi salah sasaran, dimana program diterima oleh mereka yang tidak akan berkarir di bidang perencanaan.

Di sisi lain, ditengarai juga adanya ketidakcocokan antara latar belakang peserta, khususnya dilihat dari ijazah S1-nya dengan spesialisasi Prodi yang dipilih. Misalnya, banyak kasus dimana latar belakang S1 peserta yang masuk di MPKD UGM adalah bidang sosial, sementara di MPKD sebenarnya ditekankan pada perencanaan spasial.

Memang hal ini tidak selalu negatif, dalam pengertian bahwa mereka yang latar belakangnya bidang sosial kemudian tidak dapat mengikuti program di MPKD UGM. Akan tetapi alangkah lebih baik jika lebih diadakan seleksi dan pemastian jalur antara latar belakang S1-nya dengan Prodi yang dipilih.

Dalam kaitannya dengan program master *linkage*, proses seleksi ini harus diperketat, khususnya tidak saja kemampuan/kapasitas akademiknya, tetapi juga motivasi dan program pengembangan karirnya ke depan. Sebagaimana evaluasi dari pihak NESO,

diindikasikan bahwa calon peserta program master *linkage* atau *double degree* tidak mempunyai motivasi yang cukup kuat untuk mengikuti program *linkage* ini. Sebagian peserta juga ditengarai tidak mempunyai prospek karir yang menjanjikan atau tidak ada jaminan akan menjadi PNS yang handal dan diharapkan dapat melakukan perubahan.

Ditengarai, semakin langkanya mencari dan menyeleksi calon peserta program *degree* di daerah-daerah. Terdapat beberapa kemungkinan yang menjelaskan hal ini. Pertama, memang jumlah kebutuhan tenaga perencana di daerah yang berminat atau perlu ditingkatkan sudah semakin sedikit. Kedua, promosi dari Pusbindiklatren/Bappenas (melalui *Website*) kurang menjangkau secara langsung para peminat di daerah. Ke depan, perlu dipikirkan lagi kerjasama dengan daerah yang lebih intensif untuk hal ini. Lebih jauh lagi rasanya perlu dibuka kemungkinan untuk melakukan rekrutmen yang lebih progresif, yakni untuk menjangkau minat anak-anak muda yang berprestasi untuk menjadi PNS dan berkarir di bidang perencanaan. Melalui promosi dan tawaran beasiswa di berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia, dapat diseleksi anak muda/mahasiswa yang berprestasi untuk sejak awal dididik sebagai tenaga perencana yang handal. Model ini meniru model yang sudah diterapkan oleh pihak *corporate/swasta* yang secara agresif/progresif turun langsung ke PT untuk melakukan rekrutmen SDM sejak awal. Ide ini tentunya tidak gampang karena akan terhambat dengan birokrasi rekrutmen pengangkatan PNS di daerah, meskipun demikian, tetap perlu dipikirkan kemungkinannya.

Kurikulum

Dari sisi kurikulum, penting dicatat bahwa program *degree* Pusbindiklatren yang bekerjasama dengan Prodi di berbagai PT di Indonesia menggunakan kurikulum yang ada di Prodi masing-masing. Dengan kata lain, tidak disusun kurikulum tersendiri untuk program dengan Bappenas. Hal ini disebabkan

karena kurikulum Prodi umumnya memang sudah sejalan dengan misi peningkatan kapasitas Bappenas. Dalam kasus Prodi MPKD UGM, sebagai contoh, sejak awal kurikulum Prodi MPKD memang ditujukan untuk mendidik mahasiswa untuk menjadi perencana spasial yang profesional. Misi Prodi MPKD UGM ini tentunya sejalan dengan misi Pusbindiklatren/Bappenas, sehingga tidak diperlukan perubahan kurikulum yang signifikan.

Sedikit perubahan kurikulum yang dilakukan Prodi adalah untuk program 13 bulan serta Master *Linkage* atau *Double Degree*, dimana dilakukan penyesuaian jumlah kredit yang harus diambil peserta. Untuk program 13 bulan, peserta tetap harus menyelesaikan sejumlah kredit yang disyaratkan untuk program master/magister dalam waktu yang lebih singkat. Sementara untuk program *Linkage/DD*, peserta juga masih harus mengambil mata kuliah yang disyaratkan, khususnya mata kuliah inti/wajib dari masing-masing Prodi. Kekurangan persyaratan kreditnya diambil dari Universitas di perguruan tinggi luar negeri. Proses seperti ini yang disebut sebagai transfer kredit, yakni dilakukannya transfer kredit antara dua PT yang bekerjasama/bermitra. Transfer kredit ini juga meliputi kredit dari tesis. Dalam pengertian bahwa mahasiswa peserta program *linkage/DD* hanya diwajibkan menyusun satu tesis dan tesis ini diakui oleh dua PT yang bermitra.

Ke depan, perlu dikaji apakah sebenarnya diperlukan satu kompetensi khusus bagi peserta program peningkatan kapasitas perencana Bappenas yang kemudian berimplikasi bagi perlunya disusun kurikulum yang khusus untuk peserta dari Bappenas. Kalau toh tidak sampai berimplikasi pada perubahan/penyesuaian kurikulum, mungkin diperlukan beberapa mata kuliah khusus yang dapat mendukung tujuan khusus atau kompetensi yang diharapkan dari peserta asal Bappenas. Ini semua dimaksudkan agar terjadi *link and match* yang lebih baik antara program pendidikan dengan lembaga atau lingku-

ngan kerja dimana lulusan tersebut akan berkiprah.

Proses Belajar Mengajar

Dari sisi proses belajar mengajar, peserta program *degree* dari Bappenas juga tidak mendapat perlakuan yang berbeda atau istimewa dibandingkan peserta/mahasiswa lain dalam prodi yang sama. Hal ini disebabkan karena sekali peserta program dari Bappenas masuk dalam program belajar di Prodi, mereka akan mengikuti seluruh proses belajar mengajar yang ada di prodi bersangkutan dan bercampur dengan mahasiswa lain.

Yang mungkin sedikit membedakan peserta program dari Bappenas adalah bahwa mereka umumnya berasal dari pemerintah daerah dan sudah merupakan PNS dengan pengalaman beberapa tahun. Karakter peserta semacam ini menjadikan mereka mempunyai kultur bekerja dan belajar yang hampir sama. Pada umumnya mereka sudah mempunyai pengetahuan dasar mengenai sistem perencanaan pembangunan yang ada, sehingga diskusi-diskusi tentang berbagai praktek perencanaan pembangunan di Indonesia bukanlah merupakan hal yang asing bagi mereka.

Lebih lanjut, karena peserta merupakan PNS dari berbagai daerah, dengan pengalaman yang berbeda, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, secara bersama mereka akan saling berbagi dan bekerjasama menukarkan pengalamannya masing-masing. Dengan kata lain, terjadi proses pembelajaran di antara mereka sendiri dan ini merupakan sesuatu yang positif dan perlu dioptimalkan manfaatnya.

Hal yang dirasakan kurang adalah keaktifan peserta untuk secara mandiri memanfaatkan semaksimal mungkin materi ajar yang ada di kampus, baik perpustakaan, seminar-seminar, dan diskusi-diskusi. Sebagian besar peserta masih terjebak dalam proses belajar-mengajar yang klasikal, dengan dosen sebagai sumber utama pengetahuan. Banyak peserta belum secara aktif memanfaatkan perpustakaan dan jaringan

komputer/internet yang ada sebagai sumber pengetahuan yang dapat digali. Kemampuan peserta untuk membaca jurnal dan buku dalam bahasa Inggris juga masih rendah.

Hal yang penting dicatat adalah bahwa dalam kasus MPKD UGM, peserta mempunyai kesempatan untuk belajar dalam format Studio Perencanaan. Dalam studio perencanaan ini, tidak saja peserta diberi kasus-kasus nyata perencanaan spasial, tetapi juga dituntut untuk secara aktif-dinamis melakukan proses belajar dengan fasilitator dan dengan sesama peserta lain. Dalam studio perencanaan ini, peserta juga mempunyai kesempatan untuk secara langsung melakukan *field observation*, dengan kasus-kasus riil wilayah kabupaten/kota. Pengalaman dalam studio perencanaan ini akan menjadi bekal yang penting dan riil ketika mereka bekerja di daerahnya masing-masing nantinya. Dalam konteks MPKD UGM, studio perencanaan ini menjadi kuliah inti/wajib dan menjadi tumpuan utama untuk menjadikan peserta mempunyai kompetensi untuk menyusun perencanaan spasial.

Peluang dan Hambatan

Secara umum, program peningkatan kapasitas perencana oleh Pusbindiklatren Bappenas, bekerjasama dengan Prodi di berbagai PT di Indonesia telah berjalan dengan baik dan prospektif untuk dikembangkan. Beberapa peluang yang perlu dikaji lebih rinci adalah berikut ini.

Asumsi permintaan perencana di daerah yang masih tinggi. Asumsi ini perlu ditindaklanjuti dengan satu *training needs assessment* yang detil. Melalui *training needs assessment* ini kemudian, dapat dilakukan satu program ke depan yang lebih baik, komprehensif, dan sistematis.

Ragam bidang perencanaan pembangunan yang semakin meluas. Ini berarti juga semakin diperlukannya diversifikasi bidang perencanaan yang perlu dipelajari oleh calon-calon perencana pembangunan. Ke depan perlu

dipetakan satu kebutuhan bidang perencanaan pembangunan dan kemudian didiskusikan dengan berbagai Prodi, seberapa jauh kapasitas mereka untuk merespon tuntutan perkembangan bidang perencanaan ini. Di MPKD UGM misalnya, sudah dikembangkan beberapa konsentrasi (misalnya perencanaan perumahan, pendidikan, infrastruktur, konservasi, perencanaan wilayah), dimana konsentrasi-konsentrasi ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan peserta akan pengetahuan dan ketrampilan yang spesifik.

Lebih jauh lagi, dengan semakin jelasnya status Jabatan Fungsional Perencana, peluang pengembangan pendidikan gelar untuk perencana juga semakin terbuka. Yang perlu dikaji adalah kaitan yang lebih jelas antara program magister bidang perencanaan dengan berbagai program pelatihan non *degree*, khususnya pelatihan JFP. Selama ini belum pernah dilakukan kajian dan rumusan yang lebih jelas bagaimana kaitan antara keduanya, termasuk jawaban atas pertanyaan apakah mereka yang sudah menyelesaikan program master di bidang perencanaan akan dibebaskan dari tingkatan-tingkatan dalam pelatihan JFP.

Hal lain yang penting berkaitan dengan peluang ke depan adalah fakta bahwa telah terjadi peningkatan jumlah dan kualitas Prodi di berbagai PT di Indonesia. Peningkatan jumlah dan kualitas Prodi ini akan semakin mendukung program peningkatan perencana oleh Bappenas. Pada saat yang sama perlu juga diperhatikan bahwa Bappenas juga semakin harus selektif bermitra dengan Prodi. Semakin banyak prodi yang berkembang di Indonesia, dan masing-masing ingin bermitra dengan Bappenas, semakin menuntut Bappenas untuk lebih selektif memilih Prodi yang benar-benar unggul dan sesuai dengan visi dan misi program peningkatan kapasitas perencana Bappenas.

Program master DD/*Linkage* juga dalam beberapa hal memfasilitasi beberapa Prodi untuk meningkatkan jaringan dan pengalaman internasionalnya.

Pada saat yang sama, peningkatan sistem jaminan mutu pendidikan di Prodi juga semakin menjamin kualitas Prodi dalam menyelenggarakan berbagai pelatihan, gelar maupun non gelar. Tidak semua peserta punya latar belakang dan karir ke depan di bidang perencanaan.

Sementara itu, di balik berbagai peluang di depan, perlu pula dicatat beberapa hambatan yang harus diselesaikan agar program peningkatan kapasitas perencana ini dapat terus berlangsung dengan baik. Beberapa hambatan tersebut antara lain kami catat sebagai berikut. Pertama, tidak semua peserta mempunyai motivasi tinggi untuk meningkatkan ilmunya, sebagian berorientasi mendapatkan ijazah/*degree*. Kedua, biaya pendidikan yang semakin meningkat serta aturan birokrasi PT yang semakin ketat, tidak memungkinkan Prodi untuk berinovasi dan bahkan melakukan program-program peningkatan lembaganya.

Ketiga, iklim akademik yang belum sepenuhnya terbentuk di tiap prodi menyebabkan proses belajar-mengajar yang belum sepenuhnya interaktif dan optimal. Keempat, tesis mahasiswa yang belum sepenuhnya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu dan perbaikan pengambilan kebijakan. Kelima, belum adanya kesepakatan mengenai 'materi dasar' perencanaan pembangunan yang bisa di-*share* bersama oleh semua Prodi yang menjadi mitra Bappenas. Terakhir, belum dikembangkan dan dimanfaatkannya jejaring IT untuk *sharing lectures* antara Prodi.

Manfaat bagi Prodi

Terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan pelaksanaan program pelatihan *degree* sebagai implementasi dari program peningkatan kapasitas perencana oleh Bappenas bekerjasama dengan Prodi, program ini telah memfasilitasi Prodi untuk mengembangkan bidang ilmu perencanaan, sekaligus memberikan kontribusi finansial untuk penyelenggaraan PT. Lebih lanjut, program ini telah memberikan kesempatan/peluang bagi prodi untuk ber-

eksperimen/berinovasi untuk meningkatkan program pendidikan, khususnya bidang perencanaan. Dan tidak kalah penting, program ini juga telah memfasilitasi Prodi untuk mengembangkan jejaringnya dengan PT di dalam dan di luar negeri dan meningkatkan standar pelayanan pendidikan pada skala internasional.

Berbagai manfaat bagi prodi di atas harus disyukuri dan dioptimalkan, karena mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ke depan, hal ini perlu dipikirkan dan bahkan diintegrasikan dalam program. Perlu dipikirkan mengenai adanya alokasi sumber daya khusus untuk memfasilitasi Prodi agar juga dapat meningkatkan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas Prodi akan bermanfaat bagi meningkatkan program Bappenas ini. Kasus program Non *Degree* dimana Prodi mendapat kesempatan mengikuti TOT di Luar Negeri (Jepang) dalam bidang-bidang tertentu dapat direncanakan untuk meningkatkan kualitas program *Degree* Prodi.

Catatan Akhir dan Rekomendasi

Sebagai catatan akhir, program pelatihan gelar Bappenas/Pusbindiklatren yang bermitra dengan Prodi telah berlangsung dengan efektif dan 'relatif' lancar. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya agenda bersama peningkatan kapasitas perencana antara Bappenas dengan Prodi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa program ini telah menghasilkan keluaran/lulusan yang cukup menggembirakan. Meskipun demikian, dampak langsung dan tidak langsungnya bagi proses dan keluaran perencanaan di daerah belum jelas dan dengan demikian perlu dikaji secara komprehensif dan independen.

Pada saat yang sama, program yang sudah berlangsung cukup lama ini perlu dievaluasi secara komprehensif, untuk ditentukan arah dan perbaikannya ke depan. Begitu pula, selama ini telah terbina mitra yang baik dan efektif antara Bappenas/Pusbindiklatren dan Prodi. Kerjasama selama ini telah terjadi dengan baik, penuh kemitraan, ke-

terbukaan dan semangat untuk saling mengisi. Ke depan kerjasama ini perlu ditingkatkan dan dilembagakan. Lebih lanjut, perkembangan bidang/cakupan bidang ilmu 'perencanaan pembangunan' juga semakin meluas, kaya, dan variatif. Dalam konteks ini, perlu dipetakan dan dikaji relevansinya dengan kebutuhan riil di daerah. Prodi juga harus semakin selektif mengembangkan kekhasan dan kekuatan programnya, agar tidak terjebak dalam tindakan pragmatis untuk sekedar menerima sebanyak mungkin mahasiswa. Bappenas juga harus semakin selektif memilih Prodi untuk diajak bermitra.

Sebagai penutup, direkomendasikan beberapa hal berikut ini. Pertama, dari sisi program, perlu evaluasi komprehensif oleh tim independen. Juga perlu dilakukan 'kembali' *training needs assessment*, untuk mengetahui kebutuhan pengembangan jumlah dan spesifikasi kapasitas perencana di daerah untuk Indonesia dalam lima atau sepuluh tahun ke depan. Kedua, dari sisi rekrutmen, perlu dilakukan secara lebih terbuka, progresif dan menjaring anak muda potensial. Penting pula diperhatikan motivasi dan jalur karir peserta, agar program ini mempunyai manfaat yang nyata. Ketiga, dari segi kurikulum, perlu dijajagi kemungkinan diskusi kurikulum antar Prodi, khususnya untuk menegaskan bidang ilmu perencana. Keempat, dari segi proses belajar, diperlukan peningkatan lingkungan/budaya akademik, serta metode pembelajaran *problem-based learning*. Pada saat yang sama, perlu disusun agenda riset yang berorientasi pada problema kebijakan/perencanaan (mis: PPP, kerjasama antar daerah dll.). Terakhir, dari sisi kelembagaan, perlu dibentuk semacam "Konsorsium" Prodi-prodi yang bermitra Bappenas. Konsorsium Prodi ini akan membantu peningkatan efektifitas kemitraan dengan Bappenas serta *sharing* sumber daya yang ada di masing-masing Prodi.

***) Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada**



Adi Sutrisno*

Model Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Akademis

Pengantar

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas telah lama memberikan kesempatan kepada para perencana di pusat maupun daerah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri, baik melalui program gelar maupun non gelar, *single degree* atau pun *double degree*. Pengiriman karya siswa oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan karir perencana, yang merupakan tindaklanjut dari diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) No. 16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Penetapan Angka Kredit.

Menurut SK Menpan di atas kualitas perencana pembangunan akan dapat dicapai bila kualitas sumber daya manusia perencana ditingkatkan sesuai dengan tantangan dan tuntutan pembangunan. Dengan demikian peningkatan kualitas SDM tidak hanya diarahkan pada peningkatan keahlian dan ketrampilan pe-

rencana, namun harus pula didasarkan pada kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.

Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM ini, para perencana perlu dibekali ketrampilan pendukung (*supporting skills*) terutama dalam hal penguasaan bahasa Inggris karena bahasa Inggris merupakan alat yang bisa dipakai para perencana untuk mengakses pengetahuan yang mereka butuhkan dalam tatanan global ini. Bahasa Inggris juga merupakan syarat utama bagi perencana untuk melanjutkan jenjang pendidikan S2 atau pendidikan non gelar (*short course*) baik di dalam maupun di luar negeri.

Agar para perencana mampu menguasai bahasa Inggris untuk maksud studi lanjut di program pascasarjana, baik di dalam maupun luar negeri, para perencana selama ini diikutsertakan dalam program pelatihan bahasa Inggris yang terarah, terfokus dan terukur. Kegiatan ini melibatkan beberapa Pusat Pelatihan Bahasa yang telah berpengalaman menangani program ini di antaranya Pusat Pelatihan Bahasa UGM, UI, ITB, Unair, Unsri.

Pelatihan dilaksanakan selama 720 - 900 jam dan merupakan *full time course*. Dalam pelatihan ini diberikan materi-materi yang terpusat pada kemampuan berbahasa Inggris untuk keperluan akademik yang ditekankan pada kemampuan menulis, berbicara, membaca, dan mendengarkan. Setelah pelatihan bahasa Inggris selesai, para peserta diharapkan mampu meraih skor TOEFL minimal 550, dapat mengisi blanko beasiswa luar negeri dengan benar, dan memberikan presentasi dalam bahasa Inggris, cakap menghadapi 'interview bersemuka' maupun 'interview melalui telepon' untuk maksud seleksi beasiswa. Tampak jelas bahwa pelatihan selama ini sesuai dengan kebutuhan para calon karya siswa *double degree*. Namun demikian, benarkah pelatihan bahasa Inggris diperlukan untuk mereka? Bukankah para calon karya siswa adalah orang-orang pilihan yang telah mempunyai kecakapan berbahasa Inggris secara memadai? Mengapa pelatihan harus memakan waktu sampai 700an jam lebih? Artikel ini dimaksud untuk menjawab semua pertanyaan di atas.

Memang benar bahwa para calon karya siswa yang telah diseleksi Pusbindiklatren Bappenas adalah mereka yang telah pernah mempelajari bahasa Inggris selama 3 tahun di SMP, 3 Tahun SMA, 4-6 tahun di perguruan tinggi sehingga diperkirakan mereka telah mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan bahasa Inggris, baik itu ketrampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua calon karya siswa yang lolos seleksi mengikuti program *single degree* maupun *double degree* mengalami fenomena *backsliding*. *Back sliding* adalah keadaan di mana penguasaan bahasa asing mengalami penurunan signifikan, seolah-olah kembali ke 'jarum nol'. Keadaan ini terjadi karena terhentinya proses belajar yang belum 'established'. Indikatornya sangat jelas: Penguasaan (*proficien-*

cy) bahasa Inggris para calon karya siswa yang saat tes Bappenas telah memenuhi standard minimal, yakni 450 dalam skala TOEFL, ketika dites ulang pada tahun berikutnya oleh pusat-pusat pelatihan bahasa di UGM, UI, ITB, dan Unibraw, menunjukkan penurunan angka yang amat signifikan. Hasil tes lain, yakni *Writing* dan *Speaking* menunjukkan gambaran serupa. Dengan kemampuan sebagaimana ditunjukkan hasil tes ini para calon karya siswa diperkirakan akan sulit memenuhi persyaratan kuliah di luar negeri, seperti TOEFL 550, kemampuan berbicara dan menulis secara memadai, kemampuan berpresentasi dalam bahasa Inggris. Pada diri mereka terlihat banyak titik-titik lemah yang harus dibenahi. Barangkali istilah komputer yang tepat untuk menggambarkan keadaan ini adalah adanya banyak 'bad sector' dalam memori para calon karya siswa. Mereka harus di-defrag jika hendak tugas belajar ke luar negeri. Tanpa ada pembenahan kembali bahasa Inggris secara benar dan terarah amat sulit bagi mereka untuk menutup defisit bahasa Inggris mereka.

EAP Sebagai Solusi Jangka Pendek

Mengatasi *backsliding* tidaklah sama dengan belajar kembali dari nol. Para peserta harus secara tepat diarahkan untuk secara remedial mempelajari kembali bagian-bagian yang membuatnya 'tidak sehat'. Apabila bagian yang dianggap 'tidak sehat' ini sangat banyak maka diperlukan satu terapi yang cukup lama. Celaknya, para calon karya siswa pada umumnya memiliki 'penyakit' bahasa yang cukup parah sehingga harus di 'opname' lama di Pusat Pelatihan Bahasa.

English for Academic Purposes (EAP) merupakan terapi yang tepat untuk keadaan ini. Dalam program ini para calon karya siswa diberi pembekalan memadai untuk mengatasi *backsliding* sampai semua peserta pelatihan

dapat kembali normal, dan bahkan mampu memenuhi persyaratan minimal, seperti TOEFL 550, mampu berbicara dan menulis secara akademis, memberikan presentasi dalam bahasa Inggris. Oleh karena proses penguasaan bahasa memerlukan pembiasaan, maka kegiatan EAP ini memerlukan waktu yang lama agar konsep dapat terserap baik dan akuisisi bahasa berjalan wajar dan semestinya. Setelah program EAP selesai, tugas para calon karya siswa adalah menjaganya agar tidak terjadi lagi *backsliding*. EAP hanya solusi jangka pendek saja.

Model Pelatihan EAP di Pusat Pelatihan Bahasa UGM

Setiap Pusat Pelatihan Bahasa (PPB) memiliki karakter masing-masing, bergantung pada filosofi lembaga yang tercermin dalam visi misinya,

manajemen, kemampuan pengajar dan fasilitas yang tersedia di dalamnya. Universitas Indonesia, misalnya, tentu memiliki pendekatan tersendiri dalam upayanya membantu para calon karya siswa menguasai bahasa Inggris. Demikian juga Pusat Bahasa ITB yang telah merancang programnya sedemikian rupa sehingga para calon karya siswa dapat meraih target minimal yang dipersyaratkan pemberi beasiswa.

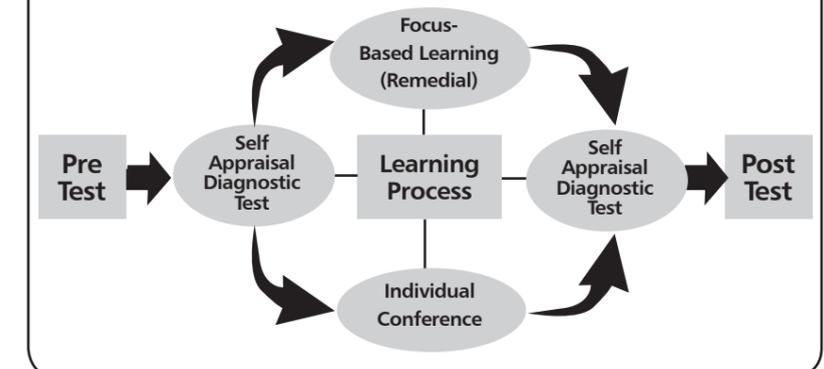
Untuk kegiatan EAP, Universitas Gadjah Mada menggunakan model remedial interaktif yang menekankan pada proses belajar mengajar yang ramah dan bersahabat. Kesan belajar 'menakutkan' dan 'menjemukan' tidak terlihat sama sekali. Hubungan antar peserta pelatihan dengan para dosen pun tampak sangat baik. Berikut ini gambaran tentang model dimaksud.

MODEL PELATIHAN BAHASA INGGRIS BIASA



Pada umumnya Pelatihan Bahasa Inggris berjalan linear seperti tampak dalam gambar: Kelas diawali dengan *Pre Test* untuk mengetahui skor awal, dilanjutkan dengan proses belajar mengajar, dan diakhiri dengan *Post Test*. Peserta pelatihan pada umumnya tidak tahu sejauh mana mereka telah belajar; sejauh mana tertinggal; dan lembaga pun tidak memonitor perkembangan individu sehingga hasil akhirnya seringkali tidak optimal.

MODEL PELATIHAN BAHASA INGGRIS REMEDIAL INTERAKTIF



Model pelatihan bahasa Inggris Remedial Interaktif menggunakan pola belajar terukur dan terstruktur dengan ciri *Individual Coaching*. Setiap peserta diberi tes Diagnostik dan *Self Appraisal* sehingga secara akurat para individu dapat mengetahui kelemahan diri masing-masing semenjak dini. Selanjutnya para peserta diarahkan untuk membenahi kelemahan-kelemahannya dengan mempelajari bagian yang terindikasi lemah sebagaimana telah dipetakan oleh tes diagnostik. Pada saat yang bersamaan, para peserta dapat berkonsultasi dengan pengajar untuk membicarakan kesulitan-kesulitan mereka. Sebelum tes akhir diberikan, peserta akan dibekali strategi menghadapi tes (metakognitif), baik itu tes TOEFL maupun tes penguasaan bahasa Inggris jenis lain.

Makna penting dari Model pembelajaran 'Remedial interaktif' adalah tumbuhnya sikap mandiri pada diri peserta untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka yang tergambar dalam Lembar Hasil *Diagnostic Test*. Para peserta tidak lagi 'bengong' menunggu apa yang akan dipelajari di kelas, karena secara indi-

vidu mereka telah tahu apa yang harus dikerjakan oleh diri masing-masing dan apa yang harus dilakukan secara bersama-sama di kelas. Berdasarkan data pemetaan hasil tes Diagnostik yang kami rancang, sebaran kelemahan individu dan sebaran kelemahan kelas secara kolektif, dapat dibuat sebuah *design* atau rancangan belajar-mengajar menggunakan fokus-fokus yang telah ditentukan (*focus-based*). Misal, minggu ini kelas akan belajar dengan fokus-1, minggu depan fokus-2, dan seterusnya. Setiap minggu selalu ada fokus pelajaran pada masing-masing ketrampilan bahasa (*focus of the week*) yang harus dikuasai para peserta pelatihan, sehingga setelah 24 minggu akan diberikan 24 fokus secara terstruktur. Fokus pelajaran diurutkan berdasarkan kelemahan kolektif pada masing-masing mata pelajaran.

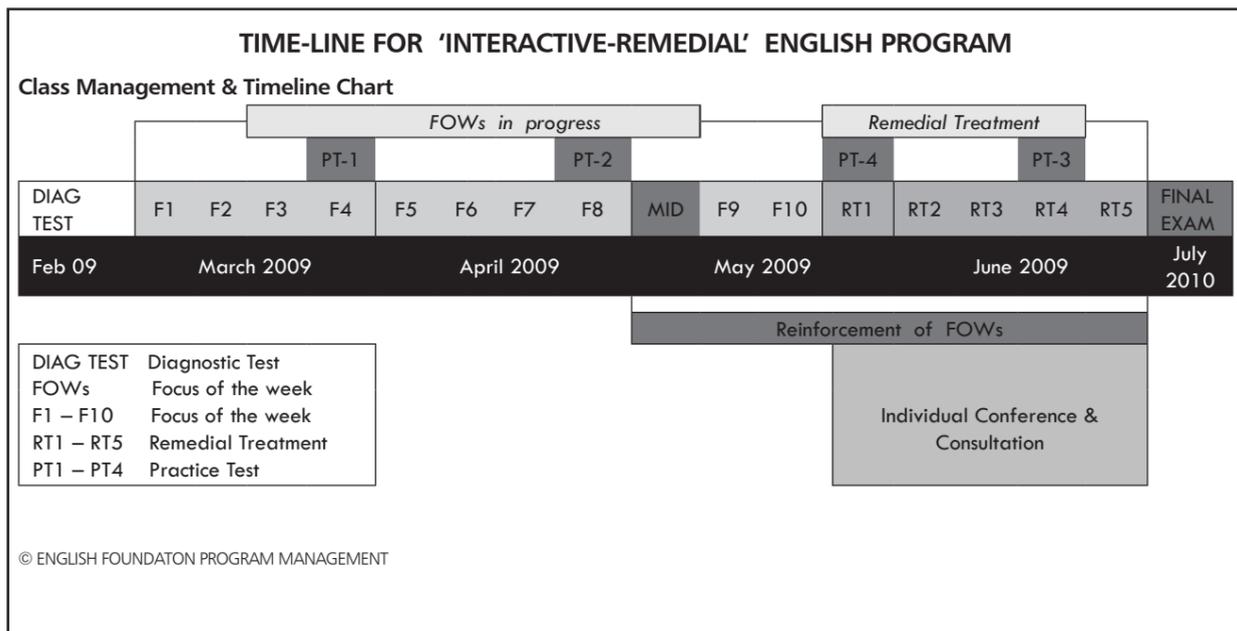
Untuk mengukur sejauh mana masing-masing fokus telah dapat diserap para peserta pelatihan, setiap bulan diadakan tes berkala. Hasil tes dikomunikasikan kepada peserta dan dapat digunakan peserta pelatihan sebagai dasar konsultasi (*individual conference*) mengenai kesulitan-ke-

sulitan yang dihadapi peserta pelatihan baik kesulitan teknis maupun non teknis.

Dengan tergambarinya kekuatan dan kelemahan peserta pelatihan secara detail, diberikannya pelajaran-pelajaran secara remedial terfokus, dan disediakannya waktu konsultasi individu, para dosen dapat membantu para peserta pelatihan mengolah kemampuan yang telah dimilikinya untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan, baik itu kebutuhan menggunakan bahasa Inggris untuk keperluan kuliah di luar negeri maupun kebutuhan untuk mengerjakan tes penguasaan bahasa Inggris (*proficiency test*).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah bahwa pelatihan bahasa Inggris amat diperlukan para calon karya siswa *double degree*, dengan catatan pelatihan harus diawali dengan pemetaan kelemahan para peserta pelatihan secara menyeluruh agar dapat ditetapkan kebutuhan masing-masing individu dan pelatihan harus diberikan secara remedial interaktif agar kemajuan senantiasa para peserta dapat diukur setiap saat.

*) Pusat Pelatihan Bahasa UGM



AP2I Bahas Organisasi Profesi Saat Workshop Pusbindiklatren

Bertolak dari hasil Musyawarah Nasional II Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) tanggal 11 Agustus 2009, selama tahun 2009 ini Pengurus Nasional AP2I yang terpilih melakukan beberapa kali pertemuan membahas penyusunan rencana kerja tahun 2009 – 2012.

Sebagai tindak lanjut Munas II tanggal 21 Agustus 2009, Ketua terpilih (Guspika) mengadakan pertemuan dengan para formatur untuk menyusun Pengurus Nasional. Melalui penerbitan surat keputusan Ketua Umum No. 022/SK/Ketum/AP2I/PN/08/2009, susunan Pengurus Nasional AP2I masa bakti 2010 – 2012 ialah sebagai berikut :

Penasehat:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas
3. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas.

Ketua Umum: Guspika (Bappenas)

Wakil Ketua: Immanuel Sembiring (DESM)

Sekretaris Jenderal: Eko Wiji Purwanto (Bappenas)

Bendahara Umum:

Watty Karyati Roekmana (Departemen Kehutanan)

KETUA-KETUA BIDANG :

Pengembangan Organisasi:

Danny Bastian (Provinsi Jawa Timur)

Kerjasama antar Lembaga:

Syaiful Ramadhan (Departemen Kehutanan)

Pendidikan dan Pelatihan:

Jadid Malawi (Departemen Nakertrans)

Informasi dan Humas:

Rosmananda (Provinsi Jawa Barat)

Hukum:

Ariyo Bimmo (Bappenas)

Penelitian dan Pengembangan:

Urbanus RM. Ambardi (BPPT)

Pengembangan Profesi:

Sri Asih Rohmani (Departemen Pertanian)

Pengurus Nasional AP2I menyusun rencana kerja untuk tahun 2009 – 2012 yang pada intinya melanjutkan kegiatan pengurus lama sebagai mitra kerja Bappenas dalam melakukan pembinaan jabatan fungsional perencana (JFP) di instansi pusat dan daerah. Berbagai kegiatan tersebut antara lain : (1) mendorong terbentuknya pengurus definitif di setiap komisariat wilayah dan kementerian/LPNK; (2) menyusun dan membentuk dewan kode etik; dan (3) memperjelas mekanisme sertifikasi perencana dan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2009 ini ialah : (1) mengirimkan 2 (dua) orang JFP untuk mengikuti pelatihan asesor profesi yang diselenggarakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada bulan November 2009. Hasil dari pelatihan ini merekomendasikan segera dibentuk LSP; (2) mengikutsertakan beberapa pengurus nasional dan komisariat untuk mengikuti *Training of Trainer* (TOT) JFP ke Kyoto, dan (3) menyelenggarakan *workshop* tentang organisasi profesi. *Workshop* ini diselenggarakan bersamaan dengan undangan Pusbindiklatren dalam kegiatan penyempurnaan kurikulum Diklat penjenjangan fungsional perencana, pada 7-8 Desember 2009. Seluruh pengurus nasional dan pengurus komisariat AP2I hadir dan banyak memberikan masukan konstruktif dalam *workshop* tersebut. Topik yang paling menarik dan banyak dikomentari ialah perdebatan tentang konsep spesialisasi perencana bagi jenjang perencana madya dan seterusnya. (**Guspika**)



Sekilas Informasi Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2010

I. Program Beasiswa Yang Ditawarkan:

1. Program S3 Dalam Negeri peserta dapat memilih salah satu program studi di Universitas dalam negeri yang direkomendasikan oleh Pusbindiklatren (khusus penerima beasiswa ini diberi waktu satu tahun untuk melamar).
2. Program S2 Dalam Negeri di 17 program studi di 11 Universitas dalam negeri, yang direkomendasikan oleh Pusbindiklatren.
3. Program S2 *Linkage* di 6 Universitas di Indonesia yang bekerjasama dengan universitas di luar negeri: peserta program ini akan mengikuti kuliah selama 1 tahun di salah satu Universitas di Indonesia dan 1 tahun berikutnya di luar negeri dan mendapat dua gelar, (ketentuan lengkap dapat dilihat <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>).
4. Persiapan Bahasa Inggris EAP (*English for Academic Pur-*

poses) untuk program S2 di luar negeri. Program ini memanfaatkan Beasiswa S2 pemerintah asing atau institusi internasional yang selama ini telah tersedia bagi Indonesia, seperti NESO dari Belanda, ADS dari Australia, dan beasiswa Kedubes Perancis dari Pemerintah Perancis bagi peserta yang telah memiliki nilai TOEFL 550. Untuk itu, Pusbindiklatren akan memberikan beasiswa persiapan bahasa Inggris EAP (*English for Academic Purpose*) di Jakarta selama 5,5 bulan bagi peserta yang mempunyai nilai TOEFL sekurang-kurangnya 450, dan apabila nilai TOEFL peserta (selama atau setelah kursus) telah mencapai 550, Pusbindiklatren akan membantu peserta untuk memperoleh Beasiswa S2 tersebut di atas. Bagi peserta S2 ke Perancis akan mendapatkan pelatihan bahasa Perancis selama 11 bulan untuk memperoleh sertifikat DELF B2.

5. Program Non Gelar yaitu Diklat Jabatan Fungsional Perencana, Diklat Substantif dan Magang

Persyaratan Calon Peserta

	DIKLAT GELAR						NON GELAR (Termasuk JFP dan Magang)			
	S3 DN/S3 LN	S2 DN	S2 LINKAGE	S2 LINKAGE	S2 INT'L UNSYIAH, NAD	S2 LUAR NEGERI				
				P' CIS		BLD	AUS	JPN	P' CIS	
SYARAT ADMINISTRATIF										
a. Pengusulan dari instansi	Min UKE II Perencanaan				Min UKE II Perencanaan : 2 th					
b. Unit Kerja	2 th	2 th	2 th	1 th	2 th	2 th				S1, Gol III/A : 2 th
c. PNS 100% gol. III/a Minimal	S2	S1	S1	S1	S1	S1				Substantif : 50 th
d. Strata Pendidikan Minimal	2 th				JFP : 49 th					
e. Minimal Tahun Lulus S1/S2	40 th	40 th	38 th	38 th	38 th	42 th	35 th	35 th	35 th	Magang : 45 th
f. Umur Maksimal	3.25	2.5	2.75	2.75	2.75	2.75	2.90	2.75	3.00	
g. IPK Minimal										
SELEKSI NASIONAL										
a. TPA										Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Formulir Pendaftaran Calon Peserta Beasiswa Diklat Non-Gelar
• Pusat	565	565	565	565	565	565				
• Pusat Luar Jawa	565	525	525	525	525	525				
• Pemda Jawa	565	525	525	525	525	525				
• Pemda Luar Jawa	565	500	500	500	500	500				
b. TOEFL Seleksi Minimal TOEFL Setelah EAP	500 / 550	400	450	450	450	550	500	530	500	
c. Wawancara	Menunjukkan Komitmen									

III. Pilihan Program Studi

Program S2 Dalam Negeri dengan Pembiayaan *Cost Sharing* Type I dan VI

A. CS Type I :

1. Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Syiah Kuala
2. Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas
3. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia
4. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung
5. Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung
6. Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada
7. Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
8. Magister Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
9. Magister Konsentrasi Studi Manajemen Perencanaan, Universitas Hasanuddin
10. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
11. Magister Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor
12. Magister Ekonomi Pembangunan & Perencanaan, Universitas Padjajaran
13. Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya
14. Magister Ilmu Lingkungan Bid. Perencanaan Pengelolaan SDA, Universitas Padjajaran
15. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro
16. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia
17. Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada

B. CS Type VI :

1. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Sriwijaya;
2. Program Pascasarjana Perencanaan dan Pembangunan

C. S2 Linkage Jepang:

No	Fakultas/ Universitas	Bidang Studi	Program Studi/Universitas	Bidang Studi
1	Fakultas Ekonomi/ Universitas Indonesia	Ilmu Ekonomi & Ekonomi Pembangunan	a. <i>Grad. Sch. of Int'l Relations/ International University of Japan (IUJ)</i>	<i>International Development Program, Economics, Development Economic, Public Policy, Urban & Regional Planning, Development Planning</i>
			b. <i>Hiroshima University</i>	<i>Economic, Development Economic</i>
			c. <i>Int'l Grad. Sch. of Social Science/ Yokohama National University</i>	<i>Economic, Development Economics</i>

Hukum, Universitas Padjajaran.

Program S2 International, UNSYIAH

Program S2 yang beberapa mata kuliahnya disampaikan oleh professor dan/atau pengajar dari Belanda dan Jepang.

Program S2 Linkage

A. S2 Linkage Belanda:

- a. *Development Planning and Management*, MPKD, Universitas Gadjah Mada-*Institute for Housing and Urban Development Studies*, Rotterdam
- b. *Development Planning and Infrastructure Management*, MPWK, Institut Teknologi Bandung-Rijks Universiteit Groningen and ITC, Enschede
- c. *Programme in Economics or Development Economics*, PPIE, Universitas Indonesia-Vrije Universiteit, Amsterdam, ISS, The Hague, Tillburg Univesity, Tillburg
- d. *Programme in Geoinformation for Spatial Planning and Risk Management, Geography*, UGM – ITC, Enschede
- e. *Integrated Lowland Management*, UNSRI – UNESCO, IHE, Delft.

B. S2 Linkage Perancis:

- a. *Master of Urban ad Regional Development and Urban Planning*, MPWK-Undip - Universite de Paris VIII
- b. *Master of Urban and Regional Development and Urban Planning*, MPWK-Undip - Universite de Paris X
- c. *Master of Urban and Regional Development and Coastal Development*, MPWK-Undip - Universite de la Rochelle
- d. *Master of Urban and Regional Development and Coastal Development*, MPWK-Undip - Universite de Bretagne Oxidentale
- e. *Master of Urban and Regional Development and Urban Infrastructure Management*, MPWK-Undip – ENTPE
- f. *Master of Urban Planning Studies*, MPWK-Undip – Universite de Paris I
- g. *Master of Urban Planning Studies*, MPWK-Undip – Universite de Nantes.

			d	Graduate Institute for Public Studies (GRIPS)	Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning
			e	Kobe Univesity	Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration
2	MEP-UGM	Ekonomi & Ek. Pemb	a	Graduate Institute for Public Studies (GRIPS)	Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning
			b	Grad. Sch. of Int'l Relations/ International University of Japan (IU)	International Development Program, Economics, Development Economics, Public Policy, Urban & Regional Planning, Development Planning
			c	Hiroshima Univesity	Economic, Development Economic
			d	Takushoku University	International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration
			e	Kobe Univesity	Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration
			f	Int'l Grad. Sch. of Social Science/ Yokohama National University	Economic, Development Economics
3	MPWK-ITB	Perencanaan Wilayah Kota	a	Graduate Institute for Public Studies (GRIPS)	Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning
			b	Ritsumeikan University	Economics, International Relations, Policy Science, Enironmental & Urban Engineering, Accounting and Management
			c	Kobe Univesity	Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration
			d	Grad. Sch. of Media and Governance/Keio University	Media & Governance, Public Administration
4	MPKD-UGM	Perencanaan Kota & Daerah	a	Graduate Institute for Public Studies (GRIPS)	International Development Program, Economics, Development Economics, Public Policy, Urban & Regional Planning, Development Planning
			b	Ritsumeikan University	Economics, International Relations, Policy Science, Enironmental & Urban Engineering, Accounting and Management
			c	Takushoku University	International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration

			d	Kobe Univesity	Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration
			e	Grad. Sch. of Media and Governance/Keio University	Media & Governance, Public Administration
5	MAP-UNIBRAW	Administrasi Publik	a	Graduate Institute for Public Studies (GRIPS)	Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning
			b	Ritsumeikan University	Economics, International Relations, Policy Science, Enironmental & Urban Engineering, Accounting and Management
			c	Takushoku University	International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration
6	IKM UNPAD	Ilmu Kesehatan Masyarakat	a	Gunma University	Public Health

Program S3 Dalam Negeri

1. Universitas Diponegoro : Ilmu Ekonomi;
2. Universitas Padjajaran : Manajemen Bisnis;
3. Institut Pertanian Bogor : (1) Ekonomi Pertanian, (2) Penyuluhan Pembangunan, (3) Sosialisasi Pedesaan, (4) Komunikasi Pembangunan Pertanian & Pedesaan;
4. Universitas Gadjah Mada : (1) Ekonomi, (2) Manajemen, (3) Kebijakan Publik;
5. Institut Teknologi Bandung : (1) Planologi, Teknik & Manajemen Industri, (2) Perncaaan Wilayah & Kota;
6. Universitas Brawijaya : Ilmu Administrasi dan Ilmu Ekonomi;
7. Universitas Indonesia : Ilmu Ekonomi.

Program S3 Luar Negeri

Program S3 (doktor) selama 3 (tiga) tahun disalah satu universitas di Jepang. Proses pelamaran dilakukan langsung oleh calon peserta dibantu oleh kantor pendukung kami (EEO)

IV. Prosedur Pelamaran

1. Mereka yang berhak melamar program beasiswa Pusbindiklatren adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di atas, dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2, serta belum pernah mengambil/memiliki gelar S3 untuk yang melamar beasiswa S3, dengan mengisi formulir pendaftaran dan diusulkan secara resmi oleh instansi asalnya melalui pejabat pengelola kepegawaian atau atasan langsung (minimal eselon II). Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan oleh instansi, dan program/topik beasiswa yang diminati;
2. Pelamar yang diprioritaskan adalah para: (a) perencana fungsional perencana; (b) perencana di instansi peren-

canaan atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan; (c) PNS lain yang direncanakan bekerja di instansi atau unit perencanaan;

3. Pusbindiklatren telah mengirimkan formulir pendaftaran ke seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Sekda, BKD, dan Ketua Bappeda. Untuk mendapatkan formulir tersebut dapat menghubungi pejabat yang bersangkutan, atau dapat didownload pada situs kami: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
4. Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang bermaterai dan bertandatangan asli dengan persetujuan dari atasan langsung (minimal eselon II). Untuk yang menyampaikan melalui faksimile, kami tidak akan memproses usulan tersebut.
5. Formulir pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu:
 - a. Ijazah dan transkrip S1/S2 yang telah dilegalisir;
 - b. Foto kopi SK Pengangkatan PNS 100% pada golongan III/a, atau SK pengangkatan terakhir, yang telah dilegalisir;
 - c. Khusus bagi para pejabat fungsional perencana harus melampirkan SK jabatan terakhir yang dilegalisir;
 - d. Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai)
6. Peserta yang memenuhi syarat administrasi (MS), lulus TPA dan TOEFL akan diproses penempatannya selama 2 tahun (selama nilai TPA-nya masih berlaku), kecuali ada surat pembatalan pencalonan dari instansi asalnya (sekarang-kurangnya Pejabat Eselon II).

Formulir serta dokumen pendukungnya dapat disampaikan langsung kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310, atau dapat dikirimkan melalui pos ke alamat: Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta 10320 (sesuai jadwal).

V. Komponen Biaya Beasiswa Bagi Program Gelar S2 Linkage

1. Pembiayaan diklat menjadi tanggungan bersama antara Pusbindiklatren dan instansi asal peserta, dalam suatu mekanisme pembiayaan bersama (*Cost Sharing* tipe I);
1. Kesanggupan Instansi Pengirim untuk menanggung biaya ini dikirimkan kepada Pusbindiklatren dalam bentuk Surat Kesediaan *Cost-Sharing* (setelah ada kepastian penempatan calon peserta).
2. Komponen-komponen pembiayaan yang menjadi bagian dari Pusbindiklatren dan Instansi Asal Peserta dibagi menjadi:

A. Komponen yang dibiayai oleh Pusbindiklatren

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Uang kuliah | sesuai program studi |
| 2. Tunjangan biaya hidup luar kota | Rp. 1.050.000,-/bln |
| 3. Tunjangan biaya hidup dalam kota dan dalam kota plus | Rp. 525.000,-/bln |
| 4. Buku utama | Rp. 70.000,-/bln |
| 5. ATK | Rp. 70.000,-/bln |
| 6. Transport lokal | Rp.100.000,-/bln |
| 7. Fotokopi artikel | Rp.10.000,-/bln |
| 8. Langganan email | Rp. 50.000,-/bln |

B. Komponen yang dibebankan kepada Pemda Asal Peserta

1. Transport dan akomodasi seleksi peserta (keikutsertaan dlm TPA & TOEFL)
2. Tiket domestik pergi-pulang (kota asal - kota tempat diklat)
3. Tunjangan Penempatan awal, minimal 5 hari perdiem
4. Tambahan uang saku
5. Biaya pengurusan dokumen keberangkatan (Bagi Peserta *Linkage* & Luar Negeri;
 - a. Biaya pembuatan passport (dilakukan oleh masing-masing instansi asal peserta) Rp.350.000,-
 - b. Biaya medical cek-up Rp.250.000,-
 - c. Biaya penerjemahan dan legalisir akte Rp.350.000,-
 - d. Biaya legalisir di Deplu dan Depkeh Rp.300.000,-
 - e. Biaya legalisir I di kedutaan besar Rp.300.000,-
 - f. Biaya legalisir II di kedutaan besar Rp.300.000,-
 - g. Biaya transport *pre-departure* program Rp.400.000,-

Komponen Biaya Beasiswa Bagi Program Gelar S2 Dan S3 Dalam Negeri

Mekanisme pembiayaan untuk beasiswa program gelar dalam negeri terbagi ke dalam 2 kategori yaitu dengan mekanisme *cost-sharing* tipe I dan *cost-sharing* tipe VI.

Dengan mekanisme cost-sharing tipe I

1. Pembiayaan diklat menjadi tanggungan bersama antara Pusbindiklatren dan instansi asal peserta, dalam suatu mekanisme pembiayaan bersama (*Cost - Sharing*);
2. Kesanggupan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menanggung biaya ini dikirimkan kepada Pusbindiklatren dalam bentuk Surat Kesediaan *Cost-Sharing* (setelah ada kepastian penempatan calon peserta).
3. Komponen-komponen pembiayaan yang menjadi bagian dari Pusbindiklatren dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dibagi menjadi:

A. Komponen yang dibiayai oleh Pusbindiklatren

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Uang kuliah | sesuai program studi |
| 2. Tunjangan biaya hidup luar kota | Rp. 1.050.000,-/bln |
| 3. Tunjangan biaya hidup dalam kota dan dalam kota plus | Rp. 525.000,-/bln |
| 4. Buku utama | Rp. 70.000,-/bln |
| 5. Atk | Rp. 70.000,-/bln |
| 6. Transport lokal | Rp. 100.000,-/bln |
| 7. Fotokopi artikel | Rp. 10.000,-/bln |
| 8. Langganan email | Rp. 50.000,-/bln |
| 9. Tunjangan riset | Rp. 4.500.000,-/bln |

B. Komponen yang dibebankan kepada Pemda Asal Peserta

1. Transport dan akomodasi seleksi peserta (keikutsertaan dalam TPA & TOEFL)
2. Tiket domestik pergi-pulang (kota asal - kota tempat diklat)
3. Tunjangan Penempatan awal, minimal 5 hari perdiem
4. Tambahan uang saku

Dengan mekanisme cost-sharing tipe VI

1. Pembiayaan diklat menjadi tanggungan bersama antara Pusbindiklatren dan instansi asal peserta, dalam suatu mekanisme pembiayaan bersama (*Cost - Sharing*);
2. Kesanggupan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menanggung biaya ini dikirimkan kepada Pusbindiklatren dalam bentuk Surat Kesediaan *Cost-Sharing* (setelah ada kepastian penempatan calon peserta).
3. Komponen-komponen pembiayaan yang menjadi bagian dari Pusbindiklatren dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dibagi menjadi:



A. Komponen yang dibiayai oleh Pusbindiklatren

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Uang kuliah | sesuai program studi |
| 2. Tunjangan riset | Rp.4.500.000,- |

B. Komponen yang dibebankan kepada Pemda Asal Peserta (sesuai dengan kebijakan masing-masing Pemda Asal Peserta)

1. Transportasi dan akomodasi seleksi (keikutsertaan dalam TPA dan TOEFL)
2. Tiket domestik pergi-pulang (kota asal – kota tempat diklat)
3. Tunjangan penempatan awal (minimal 5 hari perdiem)
4. Tunjangan biaya hidup
5. Buku Utama
6. ATK
7. Transport lokal
8. Fotokopi artikel
9. Langganan E-mail
10. Uang saku
11. Biaya pengurusan dokumen keberangkatan

VI. SANKSI

1. Jika dalam hal tertentu peserta memutuskan untuk mengundurkan diri dari program studi secara sepihak, maka berdasarkan Surat Perjanjian, peserta harus mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PPK sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa, kepada negara;

2. Peserta akan dikenakan sanksi dari Pusbindiklatren jika dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti diklat ditemukan ketidaksesuaian data yang diinformasikan dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren (formulir pendaftaran) dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren yang tercantum dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana;
3. Sanksi yang dimaksud pada poin di atas dapat berupa:
 - a. Pembatalan pencalonan sebagai penerima beasiswa jika diketahui sebelum proses seleksi dilakukan;
 - b. Pembatalan pemberian beasiswa dan penggantian biaya seleksi jika diketahui dalam proses penempatan;
 - c. Pembatalan studi, dan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren atas nama peserta sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa, kepada kantor kas negara, jika diketahui selama diklat berlangsung.

Seleksi Beasiswa Penempatan Tahun 2011

NO	KEGIATAN	JADWAL SEMENTARA
1	Surat Edaran Sesmen	Maret 2010
2	Batas Pengajuan Usulan	Awal Agustus 2010
3	TPA Nasional	Akhir Agustus 2010
4	TOEFL Nasional	Akhir September 2010
5	BEAP	Mei-Juli 2010 dan/atau Sept-Nov 2011
6	EAP	Feb – Agustus 2011



Informasi Diklat JFP (Jabatan Fungsional Perencana)

Diklat Fungsional Penjurangan Perencana

Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah sebagai instansi yang melaksanakan fungsi pengembangan dan pembinaan perencana pemerintah, termasuk meningkatkan kapasitas perencana di instansi pemerintah pusat dan di instansi pemerintah daerah. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Angka Kreditnya, telah memutuskan diadakannya Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di setiap instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki tugas perencanaan serta memberikan persyaratan bahwa untuk dapat menduduki JFP harus terlebih dahulu mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (Diklat) di bidang perencanaan. Diklat dibidang perencanaan adalah diklat wajib, yaitu diklat Fungsional Penjurangan Perencana (FPP), bertujuan untuk memenuhi persyaratan kompetensi minimal yang diperlukan bagi seorang PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional perencana pada jenjang tertentu. Diklat fungsional penjurangan perencana terdiri atas: (1) Diklat Fungsional Perencana Tingkat Pertama, (2) Diklat Fungsional Perencana Tingkat Muda, (3) Diklat Fungsional Perencana Tingkat Madya, dan (4) Diklat Fungsional Perencana Tingkat Utama.

Pada tahun anggaran 2010 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hal ini Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) bekerjasama dengan Universitas Negeri Indonesia (UI), UGM, UNHAS, ITB/UNPAD) akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional penjurangan perencana (FPP) sebagai berikut:

- Diklat Fungsional Penjurangan Perencana Pertama: 150 orang
- Diklat Fungsional Penjurangan Perencana Muda: 150 orang
- Diklat Fungsional Penjurangan Perencana Madya: 100 orang
- Diklat Fungsional Penjurangan Perencana Utama: 10 orang

Persyaratan

1. Persyaratan Umum calon peserta diklat FPP:

- Calon peserta untuk pengangkatan pertama kali: pendidikan minimal S1, pangkat/Golongan minimal Penata Muda/IIIa, bekerja di unit kerja Perencanaan, status PNS 100% dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun, umur setinggi-tingginya 49 tahun per Januari 2009.
- PNS pindah jabatan: selain butir a diatas, juga harus melampirkan surat keterangan pernah bekerja di unit perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun yang di-

ketahui oleh atasan langsungnya minimal eselon II.

- Diusulkan oleh Pejabat yang menangani Kepegawaian
- Melampirkan Surat Rekomendasi pejanat yang menangani bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan di angkat kedalam Jabatan Fungsional Perencana selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi diklat
- Bagi perencana yang akan naik jabatan harus melampirkan salinan SK pengangkatan ke dalam JFP, SK pangkat terakhir, salinan SK PAK terakhir dan diusulkan oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian.

2. Persyaratan Khusus calon peserta diklat FPP adalah sebagai berikut:

a. Diklat FPP Tingkat Pertama:

Calon peserta untuk pengangkatan pertama kali: golongan IIIa (maksimal 2 tahun) atau IIIb (maksimal 2 tahun)

b. Diklat FPP Tingkat Muda:

- Calon peserta untuk pengangkatan pertama kali: golongan IIIc (maksimal 2 tahun) atau golongan IIId (maksimal 2 tahun)
- Calon peserta (pindah jabatan): golongan IIIc atau IIId
- Calon peserta yang telah menjabat Fungsional Perencana Pertama (akan naik pangkat/jabatan):
 - TMT dalam golongan III/b sekurang-kurangnya 1,5 tahun, b) telah mengumpulkan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 90% dari jumlah AK kumulatif yang diperlukan untuk naik jabatan dalam Perencana Muda pada golongan III/c ($90\% \times 200 = 180$ AK), yang dibuktikan dengan SK PAK.

c. Diklat FPP Tingkat Madya:

- Calon peserta untuk pengangkatan pertama kali: golongan Iva (maksimal 2 tahun) s/d. Ivc (maksimal 2 tahun)
- Calon peserta untuk (pindah jabatan): a) golongan Iva, Ivb atau Ivc, dan b) Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan pernah bekerja di unit perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan).
- Calon peserta yang telah menjabat Fungsional Perencana Muda (kenaikan pangkat/jabatan): a) telah memiliki pangkat/golongan sekurang-kurang-

nya pembina/Iva, atau TMT dalam golongan IId sekurang-kurangnya 1,5 tahun, b) telah mengumpulkan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 90% dari jumlah AK kumulatif yang diperlukan untuk naik jabatan dalam Perencana Madya golongan Iva ($90\% \times 400 = 360$ AK), yang dibuktikan dengan SK PAK.

d. Diklat FPP Tingkat Utama:

- Calon peserta untuk pengangkatan pertama kali: a) golongan IV/d (maksimal 2 tahun) atau IV/e (maksimal 2 tahun)
- Calon peserta untuk selaian perencana (pindah jabatan): a) golongan IV/d atau IV/e, dan b) surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah bekerja di unit kerja perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan).
- Calon peserta yang telah menjabat Fungsional Perencana Madya: (kenaikan pangkat) a) telah memiliki pangkat/golongan Pembina Utama madya/Ivd, atau TMT dalam pangkat golongan IV/c sekurang-kurangnya 1,5 tahun, b) telah mengumpulkan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 90% dari jumlah AK kumulatif yang diperlukan untuk naik jabatan dalam Perencana Utama golongan IV/d ($90\% \times 850 = 765$ AK) yang dibuktikan dengan SP PAK.

Diklat Penilaian dan Administrasi Penilaian Angka Kredit

Penerapan sistem Jabatan Fungsional Perencana mempunyai dampak terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas keluaran instansi perencana. Jalur Jabatan Fungsional Perencana dapat dipilih oleh perencana yang memiliki potensi tinggi dalam bidang perencanaan, apabila ingin karirnya berkembang lebih cepat.

Sebagai pejabat fungsional, para perencana dituntut untuk lebih produktif, karena kenaikan pangkat dan jabatan para perencana tidak lagi ditentukan oleh lamanya bekerja, melainkan ditentukan oleh tingkat produktivitasnya. Tingkat produktivitas akan diukur oleh besar kecilnya angka kredit yang dikumpulkan, sedangkan besarnya angka kredit didasarkan atas kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh para perencana yang bersangkutan.

Guna meningkatkan wawasan, pemahaman, pengetahuan, dan keahlian serta keterampilan bagi calon dan atau anggota Tim Penilai dan Anggota sekretarian Penilaian Angka Kredit Perencana Pusat, Instansi dan Daerah terhadap unsur-unsur kegiatan perencanaan dan penilaian angka kredit perencana serta penatausahaan dan pengadministrasiannya, pada tahun 2010 Pusbindiklatren Bappenas akan menyelenggarakan secara swakelola pendidikan:

- Diklat Penilaian Angka Kredit Perencana : 25 orang (1 angkatan)
- Diklat Administrasi Penilaian Angka Kredit Perencana: 25 orang (1 angkatan)

Persyaratan

Diklat Penilaian Angka Kredit Perencana (1 minggu)

Calon peserta dapat berasal dari para anggota/calon anggota Tim Penilai Angka Kredit Perencana, Pejabat Struktural di unit Perencanaan, Pejabat Fungsional Perencana: a) pangkat/Golongan sekurang-kurangnya Penata/IIIc, b) Pendidikan sekurang-kurangnya S1, c) diutamakan dari unit perencanaan dan kepegawaian, d) Umur pada Januari 2009 setinggi-tingginya 50 tahun (khusus calon yang berasal dari Pejabat Fungsional Perencana/Anggota Tim Penilai AK Perencana usia setinggi-tingginya 55 tahun)

Diklat Administrasi Penilaian Angka Kredit Perencana (3 hari)

Calon peserta yang berasal dari Staf Perencana, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Perencana: a) golongan sekurang-kurangnya II/a, b) Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA, c) Diutamakan dari unit perencanaan dan kepegawaian, d) Umur pada Januari 2009 setinggi-tingginya 50 tahun.

Diklat Teknik Substantif

Selain diklat-diklat non-gelar Fungsional Penjurangan Perencana yang diadakan sesuai jadwal dan tempat yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren, pada tahun 2010 juga dialokasikan anggaran biaya untuk penyelenggaraan diklat non gelar substantif yang bertujuan untuk pengkayaan serta peningkatan wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan staf perencana dalam menyusun dokumen perencanaan. Khusus untuk penyelenggaraan diklat non-gelar substantif, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota juga dapat meminta penyelenggaraan diklat-diklat non-gelar di luar jadwal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Pusbindiklatren

Bentuk pembiayaan penyelenggaraan diklat non-gelar substantif adalah *Cost Sharing* tipe IV** yaitu pembiayaan sebagian ditanggung oleh pemerintah daerah (biaya diluar *tuition fee*), sedangkan biaya pendidikan (*tuition fee*) di tanggung oleh Pusbindiklatren. Sedangkan jenis diklat non-gelar substantif *cost sharing* tipe IV adalah:

- Perencanaan Pembangunan Daerah
- Perencanaan Tata Ruang
- Perencanaan Pembangunan Kalaautan dan Pesisir
- Perencanaan Investasi Daerah
- Monitoring dan Evaluasi Program dan Proyek
- Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri
- Penilaian Angka Kredit
- Administrasi Penilaian Angka Kredit
- Pembangunan Infrastruktur Melalui Kemitraan Pemerintah – Swasta, Level 1

Untuk tahun 2010 Pusbindiklatren Bappenas mengalokasikan anggaran biaya untuk diklat non gelar substantif dengan model pembiayaan *cost - sharing* tipe IV sebagai berikut:

- Diklat Teknik Substantif 30 hari: 80 orang
- Diklat Teknik Substantif 14 hari: 140 orang

Catatan:

** Ketentuan dan Prosedur Berlaku

“Diklat membuat kita dapat menyusun dokumen perencanaan lebih berkualitas”



James Rompas

Pernah mengikuti Diklat Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan yang diadakan Pusbindiklatren-Bappenas, dan sekarang menduduki posisi sebagai Kepala Bappeda Pemkot Bitung, Ir. James Rompas, M.Si, mungkin adalah sosok yang tepat untuk memperbincangkan tema “Diklat Perencanaan yang Dibutuhkan Daerah”.



1. Apakah program seleksi Pusbindiklatren sudah fair dan transparan?

JM : Ada anggapan teman-teman di daerah, seleksi Pusbindiklatren dianggap tidak fair, karena yang selalu lolos seleksi adalah PNS dari Pulau Jawa atau dari Pusat. Tetapi sesungguhnya menurut saya ini karena Panitia Seleksi menganggap semua calon itu sama kapasitas dan kompetensinya, padahal dari segi kualitas seharusnya dapat dibedakan standarisasinya antara calon dari daerah yang sudah maju dibedakan dengan calon dari daerah yang terpencil atau belum maju. Karena itu sebaiknya dipakai sistem kuota.

2. Apakah program diklat yang ditawarkan bermanfaat di dalam melaksanakan tugas?

JM : Sangat bermanfaat, karena diklat mengajarkan hal-hal teoritis secara praktis dan itu selalu dihadapi dalam tugas-tugas perencanaan.

3. Apakah hasil program diklat yang ditawarkan sudah dapat diterapkan dalam melakukan perencanaan?

JM : Ini sifatnya relatif, tergantung pada kondisi daerah masing-masing. Tetapi kalau bagi saya 80% program diklat yang diajarkan dapat diterapkan pada tugas-tugas perencanaan, bahkan terkadang tugas-tugas menghendaki ada pemahaman yang lebih dalam lagi dari sekedar apa yang diperoleh dalam diklat. Pada kondisi seperti ini sangat menuntut kreativitas dan inisiatif dari alumni diklat.

4. Apakah proses penerimaan biaya hidup selama mengikuti diklat sudah sesuai dengan yang diharapkan?

JM : Penerimaan biaya hidup masih di bawah kebutuhan nyata untuk membangkitkan kreativitas peserta diklat, karena total biaya hidup yang diterima masih minim.

5. Adakah usulan mekanisme distribusi tunjangan beasiswa kepada peserta?

JM : Tunjangan beasiswa sebaiknya memberi kesempatan kepada peserta diklat untuk memohon tambahan dengan mengajukan permohonan tambahan biaya untuk hal-hal yang dianggap perlu untuk menunjang keberhasilan, misalnya untuk membeli buku di luar buku standard yang ada, atau melakukan kegiatan tambahan yang erat kaitannya dengan tujuan diklat atas inisiatif peserta didik.

6. Apa manfaat diklat yang Anda rasakan secara pribadi?

JM : Saya secara pribadi sangat merasakan manfaat diklat Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan yang pernah saya ikuti, tetapi kemudian apa yang saya rasakan secara pribadi itu juga pada akhirnya sangat bermanfaat bagi institusi BAPPEDA tempat saya bekerja saat ini.

7. Manfaat bagi organisasi seperti apa yang Anda rasakan?

JM : Manfaat bagi BAPPEDA tempat saya bekerja, diantaranya adalah dapat menyusun suatu dokumen perencanaan secara lebih berkualitas. Kalau sebelumnya data BPS di telan mentah oleh BAPPEDA karena belum memahami secara sungguh-sungguh apa arti angka-angka BPS itu, tetapi setelah diklat BAPPEDA mampu menyampaikan kritik atas data atau informasi, sebelum melenannya untuk diolah.

8. Dari perspektif daerah, persoalan apa saja yang selama ini mengemuka dalam pelaksanaan diklat?

JM : Daerah masih beranggapan PUSDIKLATREN adalah penyelenggara diklat yang sulit untuk ditembus karena kriterianya banyak dan persyaratannya

berat. Sehingga terkesan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ikut diklat yang diselenggarakan.

9. Bentuk diklat apa yang dibutuhkan bagi daerah?

JM: Daerah membutuhkan diklat perencanaan seperti Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP) seperti yang pernah saya ikuti. Sangat menyedihkan ketika TMPP dihapus dan digantikan dengan JFP. Terkesan bahwa untuk memahami tentang teknik atau manajemen perencanaan harus menjadi pejabat fungsional perencanaan, padahal struktur BAPPEDA masih di dominasi oleh pejabat struktural. Kalau memang yang diinginkan adalah pejabat fungsional perencana menjadi tulang punggung BAPPEDA seharusnya juga dibarengi dengan aturan tegas yang mengurangi atau bahkan menghapus jabatan struktural yang tidak perlu lagi, sehingga tidak ada kesan tumpang tindih antara tugas pejabat struktural dan pejabat fungsional.

10. Proses penyelenggaraan diklat sendiri apa sudah sesuai dengan kemampuan daerah, terutama dari sisi komitmen, kelembagaan, dan dukungan pembiayaan?

JM: Masalah itu relatif, tergantung pada kemampuan keuangan daerah serta "willingness" (kerelaan) kepala daerah, itu dua faktor eksternal BAPPEDA. Bagi kebanyakan daerah saat ini *cost sharing* sebatas biaya perjalanan pergi pulang masih dianggap wajar, tetapi ketika harus membiayai sebagian biaya pendidikan itu sendiri, maka diklat menjadi sering dianggap masih belum prioritas.

11. Usulan bagi pengembangan program diklat perencanaan ke depan seperti apa sebaiknya?

JM: Usul saya agar diklat lebih berhasil guna sebaiknya diklat dilakukan secara bertahap, begini :

Tahap 1. Peserta diklat diidentifikasi dan diregistrasi (tapi peserta masih tetap di daerah)

Tahap 2. Peserta yg terseleksi menerima modul-modul pelajaran di daerah yang dikirim oleh penyelenggara (bisa memakai internet atau Pos) dan peserta mempelajari dengan kemampuan memahami secara sendiri

Tahap 3. Peserta memberi respon atas modul sebelum berangkat ke tempat penyelenggaraan diklat. (Respon dapat dikirim melalui internet atau Pos kepada nara sumber).

Tahap 4. Peserta masuk ke dalam kelas bertatap muka dengan nara sumber, mengembangkan dialog, diskusi sehingga peserta mempunyai pemahaman yang komprehensif. Nara sumber dapat menguji peserta untuk meyakinkan bahwa apa yang dipahami peserta sudah sesuai dan peserta dinyatakan sudah selesai mengikuti (menerima semacam surat tanda

selesai mengikuti pendidikan tetapi bukan sertifikat). Berikutnya Peserta membuat sendiri "Action Plan" yang dijanjikan akan dilaksanakan di tempat tugasnya, dan Action Plan tersebut ditanda tangani oleh Nara Sumber menjadi seperti sebuah "kontrak kerja"

Tahap 5. Peserta kembali ke tempat tugas dan mempraktekan hal-hal yang dipelajari sesuai dengan kontrak kerja yang dia buat sendiri. Selama mengimplementasikan tugasnya di tempat bekerja,



peserta harus melaporkan perkembangannya secara periodik kepada nara sumber dan nara sumber memberi komentar atau rekomendasinya. (laporan dapat menggunakan internet atau Pos)

Tahap 6. Peserta kembali diundang ke tempat diklat untuk mempresentasikan kepada nara sumber dan peserta didik lainnya tentang hasil kerja yang dia peroleh, atau hasil penerapan metode yang diperoleh sesuai dengan kontrak kerjanya. Kemudian nara sumber dan teman-teman peserta lainnya memberi koreksi, pandangan-pandangan, pengarahannya serta materi-materi tambahan yang masih diperlukan. Kemudian peserta dapat menerima Sertifikat Kelulusan Diklat.

Idealnya semua rangkaian proses ini berlangsung selama 1 tahun.

(Simpulan)

Workshop Penilaian Angka Kredit dan Administrasi Penilaian Angka Kredit Perencana

Jabatan Fungsional Perencana telah dilaksanakan sejak tahun 2001 dengan dikeluarkannya SK MEN-PAN No. 16/KEP/M.PAN/03/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Melalui keputusan ini, maka babak baru pembinaan PNS di lingkungan Unit Kerja Perencanaan telah dimulai. Keputusan ini memberi peluang karir bagi PNS yang berminat untuk meningkatkan karirnya melalui Jabatan Fungsional Perencana. Melalui jalur ini, seorang Perencana, sebutan bagi pemangku Jabatan Fungsional Perencana, dapat mencapai pangkat tertingginya sebagai pegawai negeri sipil.

Dengan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) maka penilaian prestasi pegawai menjadi lebih obyektif berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkannya dan kemudian dikonversi ke dalam angka kredit. Dengan menggunakan metode kuantitatif ini, maka kenaikan pangkat dan jabatan yang bersangkutan didasarkan pada jumlah Angka Kredit yang dikumpulkannya. Bila memenuhi persyaratan Angka Kredit Kumulatif minimalnya dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan dapat naik pangkat sekurang-kurangnya dua tahun dari pangkat terakhirnya.

Meskipun telah berjalan selama hampir satu dekade, persoalan Angka Kredit bagi perencana ini masih menjadi problem yang perlu menjadi perhatian. Persoalan dari mana saja Angka Kredit diperoleh sampai pada persoalan

penafsiran berapa nilai yang harus diberikan pada daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) Perencana. Daftar persoalan yang panjang, mendorong kesadaran perlunya penyelenggaraan sebuah *workshop* tentang penilaian angka kredit bagi Tim Penilai Angka Kredit Perencana.

Dengan bekal itu semua, maka pada tanggal 7 s.d. 11 September 2009, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas menyelenggarakan *Workshop* Penilaian Angka Kredit Perencana. *Workshop* ini diikuti oleh 25 orang peserta yang berasal dari instansi pusat dan daerah, seperti Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Sosial, LAPAN, Provinsi Kalbar, Jatim, Tegal dan lain-lain. Sesuai dengan tujuan *workshop* yaitu penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman tentang penilaian angka kredit, maka kegiatan ini menjadi arena saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Secara umum, kualitas pelaksanaan *workshop* dapat dikatakan sangat baik, mengingat antusiasme peserta dalam mengikuti acara ini. Dapat dilaporkan, bahwa peserta sangat aktif dalam diskusi dan melakukan simulasi-simulasi penilaian yang disampaikan.

Tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan *workshop* Penilaian Angka Kredit, *Workshop* Administrasi Penilaian Angka Kredit juga diselenggarakan oleh Pusbindiklatren. *Workshop* ini diselenggarakan

pada tanggal 14 s.d 16 Oktober 2009. *Workshop* Administrasi Penilaian Angka Kredit ini diperuntukkan bagi pelaksana/pengelola administrasi JFP bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi anggota sekretariat Tim Penilai Angka Kredit, sekaligus menyamakan persepsi akan tatakelola penilaian angka kredit perencana. Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang yang berasal dari berbagai instansi di pusat dan di daerah. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi sampai petang yang tidak beranjak dari ruang *workshop*, kecuali pada saat istirahat sholat dan makan siang.

Dari evaluasi kedua kegiatan tersebut, peserta mengemukakan bahwa mereka merasa puas dengan penyelenggaraan kegiatan semacam ini. Para peserta yang sebelumnya pesimistis terhadap penyelenggaraan kegiatan ini mengakui bahwa kegiatan-kegiatan kali ini jauh lebih mengena dibandingkan pengalaman kegiatan-kegiatan serupa yang pernah diikuti sebelumnya. Keakraban antar peserta, peserta dengan panitia, tidak dapat dipungkiri turut membantu suksesnya penyelenggaraan kedua *workshop*. Memang, ada beberapa kendala, seperti nara-sumber yang padat jadwalnya, dan panitia yang terbagi dengan kegiatan lain, dan lain-lain tetapi menurut peserta tidak mengurangi keberhasilan kedua *workshop* tersebut. Sukses buat buat panitia, Sukses buat Pusbindiklatren.

(Wahyu Pribadi)

MOU Bappenas dan BPKP Jalin Kerjasama Pengembangan SDM

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masing-masing lembaganya, BAPPENAS dan BPKP telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Tujuan kerjasama tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang audit di Kementerian Negara PPN/BAPPENAS dan dalam bidang perencanaan pembangunan di BPKP. Sasaran kerjasama itu sendiri adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang audit di Kementerian Negara PPN/BAPPENAS dan di bidang perencanaan pembangunan di BPKP.

Penandatanganan kesepakatan di antara dua instansi pemerintah itu telah dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2009 yang lalu di Gedung Bappenas, Jakarta. Bertindak mewakili Bappenas, Sekretaris Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas, Ir. Syahril Loetan, MCP, membubuhkan tanda tangannya dalam kesepakatan itu. Sedangkan dari BPKP diwakili oleh Sekretaris Utama BPKP, Drs. Kuswono Soeseno, MA.

Dalam MOU antara BPKP dan Bappenas tersebut disepakati pula bahwa ruang lingkup kerjasama di antara mereka bakal meliputi : (a) program Pendidikan dan Pelatihan Gelar/Non Gelar di bidang perencanaan pembangunan dan di bidang audit, (b) penyelenggaraan seminar/workshop/penelitian/survey guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang perencanaan pembangunan dan bidang audit. (c) Bantuan/asistensi tenaga ahli dari para pihak bidang perencanaan pembangunan dan di bidang audit, dan (d) Kegiatan



Sekretaris Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas, Ir. Syahril Loetan, MCP, dan Sekretaris Utama BPKP, Drs. Kuswono Soeseno, MA Dalam MOU Kerjasama Pengembangan SDM

lain yang disepakati.

Kerjasama ini dilakukan tak lepas dari tuntutan masyarakat yang makin meningkat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi. Seiring dengan tuntutan tersebut maka diperlukan upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas aparat pemerintah di segala bidang. BAPPENAS dan BPKP

yang merupakan lembaga pemerintah, memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu BAPPENAS dan BPKP merasa perlu untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. (Sugiyanti)

Seminar Nasional Local Economic Resources Development Planning Ke-6



Pusbindiklatren Bappenas kembali menyelenggarakan Seminar Nasional *Local Economic Resource Development* (LERD). Seminar yang diselenggarakan pada 8 Oktober 2009 di Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta, ini merupakan seminar yang ke-6. Seminar ini merupakan puncak dari proses pendidikan dan pelatihan LERD *Planning* dan seminar-seminar lokal yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam skema *linkage* ini juga telah diselenggarakan diklat, selama sepekan di dalam negeri, yaitu di ITB dan UGM, serta tiga minggu di Belanda (*IHS-Erasmus Univeristy Rotterdam* dan *Rijk Universiteit van Groningen*).

Pada dasarnya diklat tersebut dilaksanakan karena beberapa kondisi yang berkembang di masyarakat. Pertama, desakan untuk mewujudkan cita-cita nasional yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera melalui proses

pembangunan nasional. Proses panjang pembangunan nasional telah berhasil membangun landasan bagi proses pembangunan selanjutnya. Meskipun demikian, persoalan pembangunan ke depan tidak semakin ringan, perubahan lingkungan global, dan kondisi strategis dalam negeri merupakan tantangan yang harus dihadapi.

Kedua, pembangunan sebagai bagian dari investasi pemerintah di ranah publik perlu diarahkan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Sistem perencanaan pembangunan nasional melalui Undang-undang No. 25 Tahun 2004 mengatur tentang penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa proses perencanaan harus memadukan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan pendekatan *bottom-up* dan *top-down planning*.

Dengan demikian, maka perencanaan harus dapat berdiri di tengah-tengah sehingga mampu menyusun rencana pembangunan secara integral disertai integritas dan sikap kemandiriannya.

Ketiga, bagi para perencana di daerah baik propinsi, kabupaten dan kota, Undang-undang No 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah memberikan tantangan sekaligus peluang untuk membangun daerahnya sesuai dengan kapasitasnya. *Local Economic Resources Development Planning* menjadi jawaban bagi undang-undang tentang otonomi tersebut. Konsep ini mencoba mengangkat salah satu komoditi unggulan di suatu daerah untuk dipromosikan menjadi komoditas yang berdayasaing dan layak ekspor atau menjadi *trigger* bagi pembangunan daerah. Situasi ini akan mendorong *political will* dari penguasa daerah untuk lebih



berpihak kepada masyarakatnya.

Kegiatan ini sendiri diikuti oleh empat kabupaten dan satu kota. Kabupaten Limapuluh Kota misalnya, mengangkat komoditas gambir, Kabupaten Belitung mengangkat komoditas abon ikan (sambalengkong), Kabupaten Pinrang mengangkat komoditas udang, dan Kabupaten Muna mengangkat komoditas ternak sapi. Sementara itu, Kota Pekalongan mengangkat industri kreatif batik sebagai komoditas unggulannya.

Hadir dalam seminar tersebut antara lain Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Deputi Regional dan Pengembangan Otonomi Daerah, Bappenas, Direktur NESO Indonesia, Pengelola Diklat (ITB dan UGM), Perguruan Tinggi, Kadin dan perwakilan dari departemen terkait.

Dalam pengantarnya, Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas, Syahril Loetan, menyampaikan pesan bahwa seminar ini merupakan momentum penting dalam pembangunan daerah. "Kepedulian dan keberpihakan pembangunan harus tertuju kepada kesejahteraan masyarakat," tegas Syahril Loetan. Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas juga menyinggung tentang peran para perencana fungsional dalam proses perencanaan pembangunan. "Pe-

rencana menduduki peran penting karena telah terlibat dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam kurun waktu 25 tahun ke depan," terang Loetan.

Ditambahkan pula, seminar ini merupakan wujud nyata kerjasama yang baik antara Pemerintah Belanda melalui NESO-Indonesia sehingga terjadi harmoni bagi terwujudnya diklat *linkage LERD Planning* ini.

Sementara itu, Max Pohan, Deputi Regional dan Pengembangan Otonomi Daerah Bappenas menyampaikan bahwa ada tiga fokus agenda yang akan dijalankan pemerintah terkait dengan pengembangan ekonomi lokal. Pertama melalui penyediaan sarana dan prasarana. Dengan tersedia sarana dan prasarana yang baik dan memadai maka arus distribusi komoditi dari satu daerah ke daerah lain, dari sumber input ke tempat produksi, atau sebaliknya dari tempat produksi ke akses pemasaran menjadi lebih terjamin. Kondisi ini akan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih hidup.

Kedua adalah pengembangan akses ekonomi, penguatan sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di tingkat global, serta akses permodalan melalui program penjaminan perbankan dan

lain-lain. Dan yang ketiga adalah iklim usaha yang kondusif. Dalam kaitan ini ketersediaan infrastruktur regulasi akan memberikan jaminan kepastian hukum. Di samping itu iklim politik yang kondusif juga akan memberikan jaminan ketenangan dalam berusaha, sehingga tercipta stabilitas ekonomi yang mantap.

Intisari dari pelaksanaan seminar ini adalah untuk menyosialisasikan *action plan* yang telah disusun oleh Tim LERD masing-masing kabupaten kepada *stakeholder*-nya di tingkat pusat. *Action plan* tersebut disusun dengan mengantisipasi dan mempertimbangkan kebutuhan sampai dengan lima tahun kedepan. Dengan itu itu diharapkan dapat diketahui kapan suatu kegiatan akan dilaksanakan, berapa biaya yang diperlukan, dan siapa yang akan bertanggung jawab untuk pengembangan komoditas unggulan yang diusungnya. Kunci dari semua itu adalah meningkatnya koordinasi antar sektor sehingga tercipta sinergi program pembangunan. Tidak ada kesan satu sektor lebih penting dari sektor yang lain. Sebaliknya, keberhasilan satu sektor karena keberhasilan dari sektor yang lain.

Dalam seminar nasional ini juga terungkap bahwa dalam masa datang, pola LERD akan dikembangkan ke dalam wilayah yang lebih luas. Selama ini LERD hanya bergerak di tingkat kabupaten, di masa datang kerjasama antar kabupaten menjadi sangat penting. Seperti diketahui, pada dasarnya konsep pembangunan ekonomi tidak mengenal batas-batas administrasi. Kerjasama antar wilayah menjadi kunci dari keberhasilan pembangunan regional. Program REDS (*Regional Economics Development Support*), masih dalam skema *linkage*, mulai dilaksanakan pada tahun 2009 sebagai pengembangan LERD.

(Wahyu Pribadi)



Saling berjabat tangan, Prof. Elmer Sterken, Prof. Nachrowi dan Dr. Avip Syaefullah, drg, M.Pd

UI dan University of Groningen Sepakat Kerjasama Program S2 Linkage

Dalam rangka lebih memperluas dan memperkuat hubungan kerjasama antara Universitas Indonesia dan *University of Groningen* (RUG), delegasi dari Indonesia telah mengunjungi *Faculty of Economics and Business of RUG*, pada hari Jumat, 6 Novem-

ber 2009 lalu. Delegasi Indonesia terdiri dari empat orang perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Indonesia (BAPPENAS), yaitu Dr. Avip Syaefullah, drg. M.Pd (Kapusbindiklatren), Ir. Hayu Parasati, MPS (Direktur Perkotaan dan Perdesaan),

Meily Djohar, SH, MBA (Kabid Informasi dan Layanan Perencana, Pusbindiklatren), dan Dra. Zamilah Chairani, MSi (Kabid. Penyelenggaraan Diklat) serta seorang utusan dari Universitas Indonesia Prof. Dr. Nachrowi (Direktur PPIE UI).

Perjanjian kerjasama antara PPIE UI dan FEB RUG ditandatangani langsung oleh Dekan FEB RUG, Prof. Elmer Sterken, dan disaksikan oleh Prof. Nachrowi dan. Avip Syaefullah. Perjanjian tersebut meliputi kesempatan atas pemberian kesempatan bagi mahasiswa Indonesia yang telah mengikuti satu tahun pendidikan S2 di PPIE UI untuk mengikuti program S2 di FEB RUG di bidang ekonomi pada tahun kedua. Kerjasama S2 *linkage* antara PPIE UI-FEB RUG di bidang (*Development Economics*), yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas institusi perencanaan di Indonesia, akan dikoordinasikan oleh Dr. Bart Los (dari FEB, RUG) dan Prof. Nachrowi (dari PPIE, UI).

(Meily Djohar)

Diklat TOT JFP II

Untuk kedua kalinya Pusbindiklatren Bappenas menyelenggarakan Diklat *Training of Trainers* (TOT) Jabatan Fungsional Perencana (JFP). TOT ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para calon pengajar dan pihak terkait dengan penyelenggaraan Diklat JFP. Selain itu Diklat ini diharapkan juga menjadi forum untuk memberikan saran dan masukan terhadap kurikulum Diklat JFP.

TOT JFP dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 6 November di LPEM-UI dan tanggal 9 s/d 20 November 2009 di *Ritsumeikan University* Jepang. Peserta kegiatan ini berjumlah 25 orang



Diklat TOT JFP di Kampus Ritsumeikan, Tokyo-Jepang

yang terdiri dari: Bappenas (2 orang), BPPT (1 orang), LPEM-UI (4 orang), Unsyiah (3 orang), MEPP-Unpad (4 orang), MAP UGM (4 orang), MPKD-UGM (2 orang), MAP Unibraw (1 orang), PSKMP Unhas (1 orang), Bap-
peprov DKI (1 orang), Bapperov NTT (1 orang) dan Bappekab Jembrana (1 orang). Diklat di LPEM UI dibuka oleh Ka.Pusbindiklatren sedangkan diklat yang di Jepang dilaksanakan di Kampus Ritsumeikan Tokyo dibuka oleh Ketua *Board Ritsumeikan University* yang juga dihadiri oleh Duta Besar RI di Jepang.

Diklat yang dilaksanakan di LPEM - UI pada prinsipnya dilakukan dengan *classical method* (ceramah dan tanya jawab) dan diskusi kelompok. Materi-materi yang diberikan meliputi: sistem perencanaan pembangunan, dampak globalisasi, penanggulangan kemiskinan, isu dan kebijakan lingkungan hidup, manajemen penanggulangan dan penanganan bencana alam, pengaruh politik dalam perencanaan, ekonomi kerakyatan, pembangunan otonomi daerah, penyusunan dan analisa kebijakan publik dan kompetensi pejabat fungsional perencana. Para narasumber atau pengajar berasal dari para pengajar UI seperti Sri Edy Swasono, Amir Santosa, Ina Ruky, Arianto Patunru dan Jossy Moeis dan para pejabat Bappenas seperti Dida Heryadi Salya, Heri Suhermanto, Vivi Yulaswati, Yudho Priadi.

Sedangkan diskusi kelompok ditujukan untuk membahas saran dan masukan terhadap penyempurnaan kurikulum Diklat Penjenjangan Fungsional Perencana. Kelompok dibagi menjadi 4 (empat) yang bertugas membahas masing-masing: kelompok 1: *planning theories and practices* 2: *technical theories in planning*, kelompok 3: *behavioral theories for planning*, dan kelompok 4: persyaratan peserta dan penyelenggaraan Diklat.

Diklat yang dilaksanakan di Jepang dilakukan dengan kombinasi *lectures*

dan *field work/case study*. Untuk materi di kelas beberapa topik penting diantaranya adalah: sistem pemerintahan di Jepang, sistem pemerintahan daerah di Jepang, perencanaan kota dan pengembangan infrastruktur, pembangunan daerah, evaluasi pembangunan lingkungan, etika perencanaan, perencanaan sosial, sistem kesejahteraan di Jepang, kebijakan pengurangan karbon, pengembangan masyarakat dan kota, pengurangan resiko dampak bencana dan pembangunan kelembagaan, pengelolaan sampah, evaluasi kebijakan dan pengembangan masyarakat (*one village one product*). Sedangkan *field visit* dilaksanakan ke: kota metropolitan Tokyo, pengembangan kota dan masyarakat di Shimogyo Ward di Kyoto, Museum Gempa di Kobe, kebijakan pengurangan karbon di Kameoka City, dan pengembangan masyarakat *one village one product* di Kanawa Hot Spring.

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar walaupun terjadi beberapa masalah yaitu keterlambatan 4 (empat) peserta pada saat keberangkatan Diklat di Jepang akibat keterlambatan visa dari Kedubes Jepang. Secara umum peserta cukup aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan baik yang dilakukan di dalam kelas maupun dalam *field visit*. Karakteristik peserta yang berasal dari perguruan tinggi dan pemerintah daerah sangat bermanfaat dan mendukung pembelajaran sehingga memperkaya perspektif peserta lain. Peserta juga cukup antusias dalam melaksanakan diskusi kelompok walaupun waktunya sangat terbatas. Selain itu, untuk mengisi liburan hari Sabtu, peserta diikutsertakan dalam acara *Workshop/Symposium* yang dilaksanakan oleh *Office of International Cooperation Service*, Ritsumeikan University. Tiga orang peserta, yaitu Dr. Nazamudin, Dr. Widnyo S, dan Dr. Wahyudi K, ditunjuk sebagai keynote Speaker dan Panelis dalam kegiatan tersebut.

Sedangkan terhadap evaluasi penyelenggaraan Diklat oleh peserta hanya dilakukan khusus penyelenggaraan di Jepang. Pada hari terakhir sebelum penutupan, 3 (tiga) kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pelaksanaan Diklat di Jepang yang membahas: kelompok 1: ringkasan materi Diklat di Indonesia dan di Jepang, kelompok 2: evaluasi pembelajaran di kelas di Jepang, 3. evaluasi *field trip* dan studi kasus. Terhadap evaluasi penyelenggaraan pembelajaran di Jepang beberapa hal yang menjadi catatan adalah: secara umum materi sudah sesuai dengan tujuan Diklat. Beberapa materi perlu ditindaklanjuti dengan *field visit*. *Linkage* antar materi di Indonesia dan di Jepang juga sudah cukup baik. Para dosen cukup profesional di bidangnya dan mendorong peserta untuk berdiskusi. Beberapa masukan adalah: pada hari pertama perlu ada materi umum yang menjelaskan tentang setting Diklat secara komprehensif. Beberapa materi yang menampilkan kasus (studi kasus) perlu ada penjelasan/pengantar yang terkait dengan materi Utama. Bahasa yang digunakan oleh pengajar sebagian besar bahasa Inggris, sedangkan khusus pemateri dari luar Universitas menggunakan bahasa Jepang sehingga menggunakan interpreter. Khusus pemateri dari kampus diharapkan menggunakan bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya kurang bagus.

Khusus untuk rencana tindak lanjut penyusunan kurikulum JFP, keempat kelompok yang sudah dibentuk pada saat Diklat di LPEM UI sedang menyelesaikan konsep masukan untuk penyusunan kurikulum tersebut yang diharapkan akan disampaikan dalam forum *workshop* TOT JFP yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 8 Desember 2009 nanti. Pihak LPEM UI akan mengkoordinasikan kelompok-kelompok ini.

(Wignyo)



Ka.Pusbindiklatren-Bappenas Dr. Avip Syaefullah, drg, M.Pd dalam pembukaan Rakor dan Workshop Program Diklat Gelar dan Non Gelar, Program TOT LERD, TOT JFP

Rakornas dan Workshop Diklat Perencana Pembangunan Nasional 2009

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional dan *Workshop* Penyusunan Kurikulum Diklat pada tanggal 7 – 8 Desember 2009.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Bappenas dan Hotel Batavia Jakarta itu pada dasarnya adalah dua kegiatan yaitu: Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Diklat Gelar dan Non Gelar Tahun 2009, serta *Workshop* Penyusunan Kurikulum Diklat

Non Gelar yang dijadikan satu untuk menghemat biaya dan waktu baik bagi Bappenas maupun peserta.

Kepala Pusbindiklatren-Bappenas, Dr. drg. Avip Syaefullah, M.Pd, dalam laporannya pada saat pembukaan Rakor dan *Workshop* tersebut menjelaskan bahwa evaluasi *program capacity building* bagi perencana ini merupakan bagian dari siklus peningkatan kompetensi perencana pembangunan di unit perencana untuk meningkatkan kualitas dan relevansi perencanaan pembangunan di pusat dan daerah. "Kegiatan *capacity building* bagi perencana maupun intitusi pembangunan ini merupakan bagian dari *grand strategy* untuk meningkatkan kapasitas perencana dan institusi perencanaan sehingga kualitas dan relevansi perencanaan pembangunan yang diputuskan sebagai kebijakan publik, baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah sesuai dengan arah RPJP 2005-2025," tambah Ka-Pusbindiklatren.

Sementara itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Meneg PPN/ Sestama Bappenas Ir. Syahrial Loetan, MCP menjelaskan bahwa terkait dengan program peningkatan kapasitas institusi perencanaan, Bappenas sejak tahun 1984 hingga tahun 2009, telah berhasil mengirim 25.461 aparatur perencana untuk mengikuti program-program diklat bidang perencanaan pembangunan baik di dalam maupun di luar negeri, dengan rincian: 5.475 orang peserta diklat gelar, dan 19.986 orang peserta diklat non gelar.

Menurut Meneg PPN/Kepala Bappenas,



Sekretaris Meneg PPN/ Sestama Bappenas Ir. Syahril Loetan, MCP menjelaskan bahwa terkait dengan program peningkatan kapasitas institusi perencanaan, Bappenas

sejak tahun 2006, Bappenas kembali mendapatkan dukungan dari JICA hingga tahun 2013, melalui program PHRDP-III. Melalui program tersebut Bappenas rencananya akan mengirim peserta diklat sebanyak 8.081 orang yang terdiri atas 2.780 orang untuk mengikuti program diklat gelar dan 5.301 orang untuk program non gelar. Bahkan lebih jauh menurut Meneg PPN/Kepala Bappenas, pada tahun 2009 ini Bappenas juga

sedang mengkaji tawaran Bank Dunia untuk program *capacity building* di bidang reformasi birokrasi.

Meneg PPN/Kepala Bappenas juga berharap rakor dan *workshop* kali ini dapat memunculkan gagasan-gagasan strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan program *capacity building* yang semakin efisien dan aparaturnya yang semakin berkualitas.

"Saya mencatat paling tidak ada

tiga hal yang perlu dibahas, dan mendapat masukan dari peserta rakor dan *workshop*. Pertama menyangkut upaya peningkatan program Gelar *linkage*, termasuk di dalamnya metode pengajaran, kurikulum, sistem seleksi, dan aspek penyetaraan program *linkage* atau status akreditasi. Kedua tentang relevansi para lulusan peserta diklat dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsinya setelah kembali ke instansinya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu terkait tingkat kemampuan dan kaulitas para alumni diklat perencanaan dalam mengekspresikan gagasan dan ide-ide strategis dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis," harap Meneg PPN/Kepala Bappenas.

Tujuan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Diklat Gelar dan Non Gelar Tahun 2009 itu sendiri sebenarnya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Diklat yang dilaksanakan pada tahun 2009. Sedangkan *Workshop* Penyusunan Kurikulum Diklat Non Gelar ditujukan untuk merumuskan desain kurikulum Diklat Non-Gelar, khususnya untuk topik *Local Economic Resources Development* (LERD) dan Jabatan Fungsional Perencana (JFP).

Rakor Evaluasi Diklat Gelar dan Non Gelar Tahun 2009 dihadiri oleh 19 pimpinan Program Studi Diklat Gelar di 11 (sebelas) PTN dan 25 pimpinan Prodi/Lembaga Penelitian/Lembaga Pelatihan di 15 (lima belas) PTN seluruh Indonesia yang selama ini bekerjasama dengan Bappenas untuk melaksanakan Diklat. Sedangkan peserta *Workshop* Penyusunan Kurikulum Diklat LERD dan JFP adalah 100 orang alumni Diklat *Training of Trainers* (TOT) LERD dan JFP. Khusus untuk topik JFP selain diikuti oleh alumni TOT, peserta juga berasal dari enam pimpinan pengelola Diklat JFP di enam PTN serta para pengurus pusat dan daerah Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I). (DediN)



Aku (nomor dua dari kiri) Bersama teman-teman semasa di Perancis

Arie Fitria:

Perjalanan Mengikuti Program Gelar Bappenas Dalam Selayang Pandang

"Yuk ikutan tes di Bappenas, itung-itung kita jalan-jalan ke Jakarta" masih terngiang ajakan seorang teman yang menjadi awal dari perjalanan panjang dalam program diklat Pusbindiklatren Bappenas. Menunjukkan ajakan itu serius, seorang teman lain mengantarkan disket yang berisi form isian pendaftaran program gelar dan non gelar.

Berlatar belakang pendidikan Sarjana Pemerintahan, dan bekerja sebagai PNS pada Pemda Propinsi Lampung. Propinsi dimana saya lahir dan di besarkan. Propinsi yang memiliki bayak potensi alam, namun ironisnya sekaligus menjadi propinsi yang angka kemiskinannya tinggi. Hal tersebut yang memotivasi saya untuk ikut program diklat gelar dan non gelar Pusbindiklatren Bappenas. Saya semakin terpacu untuk mempelajari ilmu perencanaan wilayah ketika itu, Departemen

Lingkungan Hidup RI menetapkan Kota Bandar Lampung, Ibu Kota Propinsi Lampung, sebagai kota terburuk nomor 2 dalam penataan wilayah. Berangkat dari idealisme : untuk merubah keadaan menjadi lebih baik mulailah dari diri kita sendiri. Dengan idealisme tersebut saya berharap dapat menyumbangkan ilmu yang saya peroleh untuk membangun Lampung, dan membangun kemampuan pribadi saya.



Di depan ENTPE, Paris-Perancis

Bermula dari indahnya persahabatan dan motivasi tersebut tersebut, saya mengirimkan berkas isian ke Bappenas di akhir Desember 2005. Satu bulan kemudian, kami bertiga memenuhi panggilan Bappenas untuk mengikuti TES TPA. Sayangnya hasil tes TPA menyatakan salah satu dari kami harus gugur. Sehingga hanya berdua saja, kami mengikuti tes TOEFL di bulan April 2006. Alhamdulillah, Bappenas menginformasikan bahwa saya lulus pada program *double degree* dan teman saya lulus di program dalam negeri. Namun kemudian berita gembira itu menjadi "bola panas", karena selama 4 bulan tiada kabar jelas dari Bappenas kapan saya akan memulai program ini, sedangkan pertanyaan demi pertanyaan "kapan berangkat ke Perancis" mulai mengusik telinga. Akhirnya September 2006, saya mulai mengikuti diklat EAP untuk mempersiapkan tes wawancara di Kedutaan Perancis. Lagi-lagi karena minimnya pengetahuan saya tentang bagaimana Program ini dijalankan, saya pun tidak mengetahui kalau tahapan-tahapan tes harus saya ikuti selanjutnya, ada rasa was-was tak terkira saat menunggu hasil wawancara dari kedubes. Setelah begitu banyak hal yang dipertaruhkan dalam mengikuti program ini, tentu saja saya tidak ingin semuanya berlalu begitu saja. Seperti diguyur es diterik mentari saat Bappenas memberitahu kalau saya diterima dan mulai mengikuti kursus bahasa

Perancis.

Bahasa yang romantis dengan nada syahdu yang memanjakan pendengarnya, ternyata tak seindah itu saat mempelajarinya, suatu tantangan tersendiri untuk bisa menaklukkannya, apalagi jika mengingat bahasa terkait erat dengan bakat dan kebiasaan.. ala bisa karena biasa begitu kata pepatah. 6 bulan untuk mencapai tingkatan B2 DELF adalah *misión imposible* kata seorang pengajar CCF, tapi tumpukan demi tumpukan PR (Pekerjaan Rumah) dan situasi CCF melahirkan suasana yang membuat kami harus bisa. Besama rekan-rekan *Double Degree* II, tiada mengenal malam dan *week-end* kami berkulat dengan Farida Sumargono dan *Pierre Labrouse* (Kamus Bahasa Perancis), mulai kami mempraktekan percakapan dengan kosakata seadanya dan aksén masing-masing. Tahap kedua perjalanan ini membawa ku kembali ke Semarang, kota penuh kenangan yang menempaku untuk menyelesaikan S1. Kembali menjejakkan di kota Atlas membawaku pada memori akan kawan-kawan lama beserta sudut-sudut ceritanya. Begitu indahnya Undip kampus pleburan, rindangnya pepohonan dan auditorium Imam Barjonya masih tetap sama, tetapi tentu saja berbeda makna yang saya rasakan, dengan siapa kita menikmati suatu peristiwa menorehkan cerita yang berbeda juga. Hampir 1 tahun saya menyelesaikan tahun I dalam program Bappenas ini dalam tumpukan tugas, dan lagi-lagi *deg-deg'an* saat cari universitas atau beasiswa dibatalkan.

Akhir agustus 2008, tiba aku di kota penuh cahaya, kota cinta Paris. Serasa terbayar perjalanan panjang ketika ku berjalan ditemani seorang teman asli Perancis menyusuri kota ini sambil mendengarkan semua kisah yang melekat di setiap tempat, detail. Aku hanya bisa berdecak kagum pada temanku ini, begitu ia menguasai sejarah kotanya, begitu mereka menjaga kelestarian gedung-gedung lama yang kemudian menjadi ciri khas kota dan tentu saja menjadi daya tarik kota ini beda sekali dengan negaraku yang sukanya bangun gedung-gedung baru agar negara ini keliatan negara maju (pola pikir yang berseberangan) sedangkan negara maju ingin terlihat tua peradabannya. Itulah pelajaran pertama yang aku catat dalam *neuron-neuron* otakku, pelajaran selanjutnya adalah beradaptasi dengan lingkungan baru, makanan baru dan semuanya serba baru. Senjata awal yang saya persiapkan adalah *anti culture shock*. Walaupun tidak mudah, berkat teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia Lyon, dan PPI perancis saya tidak seperti anak ayam yang kehilangan induk, saya menemukan keluarga baru bersama PPI layaknya seperti kakak dan adek yang selalu saling bantuk dalam suasana kekeluargaan, kegiatan-kegiatan saya sebagai sekretaris PPI pun telah mampu mengubur secara perlahan rasa rindu pada keluarga. Dukungan juga datang

dari rekan-rekan seperjuangan di kelas, mereka sangat perhatian dan selalu bertanya "Arie, kamu *ngerti ga* apa yang *diterangin* dosen tadi? Coba kamu ceritakan ke aku apa yang kamu pahami" kira-kira begitu terjemahan pertanyaan seorang teman, setelah saya mengulang penjelasan dosen atas apa yang saya pahami, jika benar ia akan bilang iya begitu intinya, kalau mau penjelasan lebih lengkap ini catatanku kamu bisa foto kopi. Lalu saya teringat sebuah istilah tangan-tangan semu dalam suatu teori ilmu ekonomi, tangan-tangan Allah yang membantu saya melalui banyak pihak, membuat saya semakin menyadari kebesaran-Nya dan membuat saya menarik pelajaran selanjutnya. Bahwa kehidupan religi di Indonesia memang begitu tumbuh subur, saya tidak mau kehidupan religi saya menjadi gersang Masjid besar Lyon menjadi tempat favorit saya mengadu kepadaNya, yang membawa saya berkenalan dengan teman-teman muslim perancis dan aktif dalam *Etudiant Musulman Francaise* (EMF), dan mengikuti pengajian seminggu sekali. Seorang dari mereka menjadi sahabat saya yang selalu membantu untuk brain storming, karena latar belakang kami sama-sama dari ilmu politik. Proposal penulisan tesis sudah 6 kali di rubah, ujian para tesis sudah dilalui, begitu juga wawancara, tentu dosen pembimbing saya yang sangat sabar dan yang mampu menumbuhkan semangat saya. Juga dosen-dosen di Undip yang selalu siap memberikan saran ketika saya menemui kebuntuan, jadi apa yang kemudian saya peroleh dalam ujian tesis dengan nilai 17 dari nilai maksimum 20 dan ketika dinyatakan sebagai mahasiswa indonesia terbaik sejak kerjasama diluncurkan di tahun 80'an bukanlah hasil kerja saya sendiri tetapi banyak pihak yang membantu. Suasana nyaman lain kami peroleh sebagai penerima beasiswa pemerintah perancis yang mendapatkan berbagai fasilitas seperti jalan-jalan yang menjadi ajang *refreshing* bagi kami dan tentu saja beasiswa yang datang tepat waktu. Saya hanya bisa mengucapkan syukur alhamdulillah ketika pesawat yang membawaku kembali ke tanah air mendarat dengan aman di Bandara Soekarno Hatta. Teringat liku panjang tes dan tahapan program ini, terimakasih Bappenas yang sudah memberi saya kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Perancis sehingga saya memperoleh banyak pengalaman dan pelajaran berharga.

Perasaan mengharu biru begitu mengisi relung hati saya menikmati lagi cerahnya sinar mentari di ruang tunggu bandara, saya hanya tersenyum simpul, mengingat gerutuan saya diawal tahun 2006 saat akan mengikuti tes TPA "yach beginilah nasib kalau lapangan terbangnya kelas perintis, hanya pesawat kecil yang bisa masuk" membuat kami harus menumpang Pesawat Merpati "Baling-baling Bambu" yang selalu bergoyang ketika tertiuip angin, dan membuat jantung



Aku (paling kanan) Bersama teman-teman semasa di Perancis

kami berdegup sangat kencang. Sekarang saya akan pulang naik Pesawat Garuda karena Gubernur Lampung telah mencangkan pelebaran bandara, dan saya menikmatinya sekarang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : ARIE FITRIA
 Tempat/tgl lahir : Metro/ 02 September 1978
 Instansi : Pemda Provinsi Lampung
 Alamat : Jl. Monginsidi No. 69 Bandar Lampung, Provinsi Lampung
 Pangkat : Penata Muda Tk.I
 Jabatan : Staf Bagian Protokol

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|---|------------|
| 1. SD Negeri 03 Kotagajah | Tahun 1991 |
| 2. SMP Negeri Kotagajah | Tahun 1994 |
| 3. SMU Negeri I Punggur | Tahun 1997 |
| 4. Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Semarang | Tahun 2002 |
| 5. Magister Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro | Tahun 2009 |

NAMA DIKLAT GELAR

S2 *Double Degree*-Bappenas-Undip Perancis
 Tahun Masuk: 2007 Tahun Lulus: 2009

Universitas di Indonesia:

1. Universitas Diponegoro – Semarang

Universitas di Perancis:

1. *Ecole Nationale des Travaux Publics de l'État*
2. *Université Lumière Lyon 2*

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Staf Pengajar FISIP Universitas Lampung Tahun 2002-2003
2. Staf Pengajar STISIPOL Dharmawacana Metro Tahun 2002- Sekarang
3. Staf Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro Tahun 2002-2005
4. Staf Bagian Protokol Setda Provinsi Lampung Tahun 2005 - Sekarang

PRESTASI

1. Mahasiswa Berprestasi II FISIP Undip Tahun 2001
2. Lulusan Terbaik FISIP Undip Tahun 2002

Andriyani*
Ringkasan Tesis

Dinamika Spasial Perubahan Penggunaan Lahan dan Faktor-faktor Penyebabnya di Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Penggunaan lahan merupakan refleksi struktur perekonomian dan preferensi masyarakat yang bersifat dinamis, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan. Sementara itu meningkatnya kebutuhan lahan tidak dibarengi oleh ketersediaan lahan yang cenderung tetap, sehingga lahan dalam kondisi mengalami kelangkaan (*scarcity*). Dengan sendirinya alih fungsi lahan tidak dapat dihindarkan.

Pemanfaatan lahan untuk pengembangan beberapa kawasan di Kabupaten Serang berdasarkan RTRW 2001 - 2011 dimaksudkan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan dalam konteks sistem keterkaitan antar pusat kegiatan menuju pengembangan secara keseluruhan.

Kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana untuk berbagai kegiatan, telah merubah secara fisik bentuk wilayah sehingga menimbulkan kompetisi guna lahan antara pertanian-industri (non pertanian), pertanian-permukiman dan sebagainya. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari keberadaan fisik terbangun dan perkembangan pergeseran penggunaan lahannya.

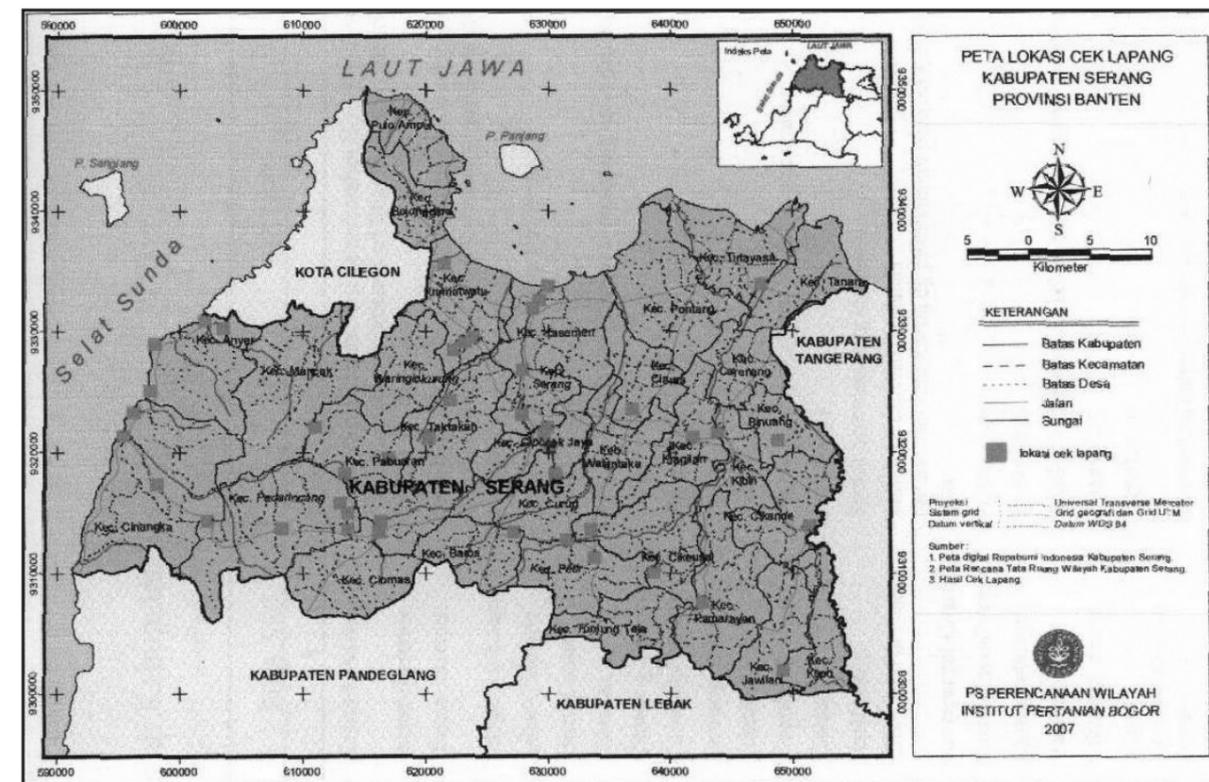
Tujuan penelitian ini adalah: mengetahui dinamika spasial perubahan penggunaan lahan di Kabupaten

Serang selama tahun 1992 - 2003 dan menganalisis faktor-faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Metode yang digunakan terdiri dari: pengumpulan dan pengolahan data meliputi: (1) ekstraksi data penggunaan lahan dari citra landsat Tahun 1992 dan 2003 dengan perangkat lunak Erdas Imagine 8.6; (2) pengolahan peta-peta tematik; analisis deteksi perubahan penggunaan lahan; identifikasi pergeseran dan pusat-pusat perubahan penggunaan lahan dengan *Shift-share Analysis (SSA)* dan *Location Quotient Analysis (LQ)* menggunakan analisis GIS dan (3) analisis faktor-faktor penyebab perubahan penggunaan lahan menggunakan Binomial Logit Model dengan perangkat lunak *Statistica 6.0*.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa selama kurun waktu 11 tahun di Kabupaten Serang telah terjadi perubahan luasan penggunaan lahan yaitu: pengurangan luasan sawah (14.843 ha), kebun campuran (5.044 ha), hutan (3.995 ha), semak belukar (763 ha) dan tambak/penggaraman (186 ha). Sementara itu, penambahan luasan terjadi pada penggunaan tegalan/ladang (18.383 ha) dan permukiman (6.447 ha).

Perubahan yang terjadi telah menimbulkan pergeseran

Peta Lokasi Cek Lapang



penggunaan lahan, dimana penggunaan pertanian (hutan, kebun campuran, semak, sawah, tambak/penggaraman) mengalami perubahan menjadi permukiman atau ruang terbangun. Penggunaan permukiman dan tegalan/ladang berdasarkan analisis SSA mengalami laju penambahan luasan lebih besar dari laju agregat di Kabupaten Serang, sehingga merupakan jenis penggunaan yang bersifat kompetitif. Faktor-faktor fisik lahan, sosial ekonomi dan kebijakan yang dianalisis mempunyai pengaruh signifikan terhadap perubahan penggunaan lahan. Faktor-faktor tersebut adalah: kelerengan, jenis tanah, jarak dari pusat desa ke ibukota Serang dan Cilegon, penambahan penduduk/luas desa, IPD tahun 2003 dan arahan penggunaan lahan.

Saran

Penggunaan lahan dalam rangka memanifestasikan kegiatan pembangunan di Kabupaten Serang sesuai dengan hasil penelitian ini telah menimbulkan perubahan dan pergeseran serta ketidakteraturan. Oleh karena itu sudah saatnya mendapatkan perhatian agar perubahan penggunaan lahan yang terjadi tidak menimbulkan dampak-dampak yang merugikan.

Kebijakan penggunaan lahan yang telah ditetapkan dan diacu oleh pemerintah daerah sering menjadi tidak efektif karena biasanya tidak mengikuti dinamika

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan perencanaan penggunaan lahan yang mencakup keharmonisan spasial dalam mengaplikasikan suatu penggunaan lahan. Penempatan setiap aktifitas pembangunan secara tepat dan akurat didasarkan kepada potensi dan kemampuan lahan secara biofisik-ekologi serta kebutuhan pembangunan.

Untuk itu perlunya peraturan yang dapat dijadikan acuan bagi kegiatan perubahan lahan seperti acuan klasifikasi penggunaan lahan, kesesuaian lahan untuk permukiman, industri dan pariwisata. Selain itu upaya pengendalian dapat dilakukan dengan sistem insentif-disinsentif. Disinsentif dengan cara seperti penentuan tingkat pajak yang tinggi, kewajiban membayar kompensasi selain ganti rugi tanah terhadap konversi lahan sawah. Sedangkan penghargaan/insentif diberikan untuk kegiatan dapat menjaga produktivitas sawah, karena sawah dihitung nilai investasinya berdasarkan aspek lokasi, fisik dan produktivitasnya sehingga terjadi pemupukan sumberdaya sawah.

*) Peserta Karyasiswa Pusbindiklatren - Bappenas Program Studi Perencanaan Wilayah Institut Pertanian Bogor



Agus Manshur, SE, MA*

Diklat, Bintek, dan Sosialisasi, di Mata Seorang Pengajar

Dalam tiga tahun terakhir ini saya termasuk "aktivis" yang rajin (diundang) dan tentu saja aktif mengajar di berbagai forum pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis (bintek) perencanaan pembangunan di berbagai daerah. Baik diundang pemda, lembaga pelatihan ataupun *event organizer*. Kesan pertama, tentu saja senang, apalagi kalau honorariumnya *gede*. Meski, kadang-kadang dapat daerah yang kelewat "remote" tapi honorinya pun tak besar-besaran amat. Tentu saja yang paling enak bila honorinya *gede* tapi ngajarnya cukup di Jakarta.

Kesan kedua, berkaitan dengan persoalan terminologi atau bahkan nomenklatur. Seringkali kita tidak bisa membedakan antara diklat, bintek, atau sekedar sosialisasi (tepatnya diseminasi). Hingga, dengan gampang dan tanpa beban kita sering seenaknya menggunakan atau "mempertukarkan" ketiga jenis forum tersebut untuk keperluan acara yang sama. Pengalaman saya selama ini adalah daerah lebih banyak yang membutuhkan sosialisasi ketimbang diklat atau bintek, apabila menyangkut tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Singkatnya, daerah ingin tahu lebih banyak tentang materi

dan substansi UU 25/2004 tentang SPPN sebagai "background" informasi untuk menyusun berbagai produk perencanaan pembangunan daerah.

Kesan ketiga, kita seringkali tidak "serius" dalam melaksanakan ketiganya. Panitia hanya berorientasi agar "pengajar" nya bisa datang lantas mengajar dan peserta "yang diajar" bisa memenuhi ruangan. Peserta pun hanya sekedar melakukan "formalitas" memenuhi penugasan dari pimpinan untuk mengikuti kegiatan. Sementara, pengajar, pelatih, atau instruktur hanya sekedar memenuhi undangan



dan membawakan materi yang hanya "itu-itu" saja. Padahal antara diklat, bintek, dan sosialisasi, kadar keseriusannya beda-beda. Sosialisasi bolehlah agak "santai", tapi bintek harus serius. Apalagi diklat.

Kesan keempat, seringkali "stakeholder" atau "audience" untuk ketiga kegiatan ini sama saja. Untuk sosialisasi kebijakan dan peraturan barangkali "stakeholder" atau "audience" nya bisa lebih luas, termasuk melibatkan unsur di luar pemerintah. Tapi, untuk bintek, pesertanya lebih khusus (*targeted audience*). Apalagi untuk diklat.

Kesan kelima, jarang sekali ada tindak lanjut setelah selesai kegiatan. Hasil kegiatan bintek seharusnya dilanjutkan dengan fasilitasi penyusunan dokumen yang lebih rinci secara teknis. Dan karenanya seorang instruktur harus terus dilibatkan dalam proses itu. Kalau tidak, maka tidak ada jaminan tentang *quality control* dari dokumen yang benar-benar akan disusun sebagai produk kebijakan. Paling tidak, korespondensi antara instruktur dengan *client* harus dijaga selama proses penyusunan dokumen. Hal ini penting juga untuk akuntabilitas terhadap kualitas materi yang diberikan seorang instruktur kepada *client*. Selama saya mengajar di

daerah hanya satu kabupaten yang masih melakukan korespondensi dengan saya, sekedar untuk memastikan bahwa yang disusunnya sesuai dengan materi yang telah saya ajarkan sebelumnya.

Kesan keenam, jarang ada materi diklat atau bintek yang benar-benar mencerminkan kebutuhan riil daerah. Selama ini terjadi generalisasi yang berlebihan dalam materi (substansi) bintek atau diklat. Pendeknya, apa yang sedang "nge-tren" di pusat akan semakin sering dan gampang direplikasi sebagai bahan ajar di daerah. Setelah itu, kita semua akan menunggu "trend" berikutnya. Padahal, persoalan pembangunan di daerah sangatlah banyak dan kompleks. Juga, sangat nyata dan praktis. Tapi, sayangnya materi diklat atau bintek yang mampu memberikan kontribusi dan solusi untuk menyelesaikan masalah di daerah kelewat sedikit.

Dengan seluruh kesan tersebut maka diperlukan "evaluasi tuntas" sekaligus "revitalisasi yang pas" terhadap konsepsi dan praktik penyelenggaraan bintek, diklat, ataupun sosialisasi bagi aparat pemerintah daerah. Evaluasi dibutuhkan untuk mengkaji efektivitas sekaligus optimalitas penyelenggaraan diklat,

bintek, dan sosialisasi, baik untuk kebutuhan pusat maupun daerah. Tentu saja hal ini berkaitan dengan persoalan substansi, materi, ataupun malah berhubungan dengan teknis penyelenggaraannya. Baik pusat maupun daerah, keduanya membutuhkan "amunisi", aksentuasi, artikulasi, maupun tata cara yang berbeda satu sama lainnya.

Sementara, revitalisasi diperlukan agar diklat, bintek, dan sosialisasi dapat berperan secara "vital" sekaligus proporsional sebagai "tools" sekaligus medium untuk mengkonversi berbagai informasi kebijakan dan regulasi ke dalam pemaknaan administratif yang jelas, lugas, dan pas; serta ke dalam penerjemahan operasionalisasi secara teknis di lapangan. Karenanya, revitalisasi dibutuhkan untuk menghasilkan standardisasi terhadap materi, instruktur, dan lembaga penyedia (*provider*) sekaligus sertifikasi terhadap proses dan hasil kegiatan yang telah dilakukan.

Tanpa evaluasi yang tuntas sekaligus revitalisasi yang pas, rasanya apapun bentuk dan jenis diklat, bintek, atau sosialisasi yang akan dilakukan tak lebih dari sekedar "ritual administratif" yang kelewat reguler dan membosankan sekaligus sekedar "media" yang paling efektif untuk menghabiskan anggaran yang "nyaman" dan "aman" meskipun jelas-jelas akan memboroskan belanja pemerintah setiap tahunnya. Tanpa keduanya, rasa-rasanya saya merasa bahwa inilah semacam "moral hazard" yang pelan-pelan secara sadar kita (termasuk saya!) lakukan berulang-ulang, terus menerus, dan seterusnya, akan menjadi kegiatan yang sama sekali tidak mencerdaskan. Bagi siapa saja. Tanpa terkecuali!

*) Penulis adalah Perencana Muda di Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas



Suasana di Timor Leste
Sumber : Kompas.com, 24/10/2009, 12:11 WIB

Mohamad Machdi *

Sebuah Potret Wilayah Perbatasan NTT:

Dinamika Dan Pendayagunaan Potensi Wilayah

Sumbangsih LIPI Selama 5 Tahun Terakhir

Wilayah perbatasan RI dengan negara Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL) akhir-akhir ini banyak menimbulkan permasalahan keamanan, sosial dan ekonomi. LIPI telah melakukan penggalian, pengembangan, dan pendayagunaan potensi sumber daya alam di daerah sekitarnya melalui penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

Program Pengembangan Wilayah merupakan salah satu kegiatan terpadu yang dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meliputi dua wilayah kabupaten daerah perbatasan,

masing-masing Kabupaten Wamena di Propinsi Irian Jaya (sekarang Propinsi Papua) dan Kabupaten Kupang di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelaksanaan di Propinsi Papua telah menghasil-

kan berbagai produk yang hingga kini beberapa produknya masih berjalan, antara lain yaitu (1) Stasiun Penelitian dan Alih Teknologi (SPAT) Wamena, (2) Kebun Biologi Wamena, (3) Mikrohidro untuk penerangan Puskesmas dan Masyarakat sekitarnya, (4) Budidaya tanaman padi dan lebah madu, dan (5) Pengembangan transportasi "becak".

Sedangkan pelaksanaan kegiatan LIPI di daerah NTT sejak tahun 1990-an, diperkuat dengan kerjasama (MoU) antara LIPI dengan Pemerintah Propinsi NTT dan antara beberapa unit kerja LIPI dengan beberapa Pemerintah Kabupaten di NTT. Melalui beberapa unit kerja di lingkungan LIPI telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain (1) studi pertanian lahan kering, (2) introduksi teknologi/sistem bercocok tanam hemat air (tanaman pot un-



Pintu Perlintasan Wilayah Perbatasan

Sumber : beritahankam.blogspot.com

tuk tanaman hortikultura: tomat, cabe, dan terong), (3) pemanfaatan air embung, (4) instalasi air bersih introduksi peralatan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan pasca panen seperti alat penyisir sabut kelapa dan alat pembuat beras jagung, (5) perbengkelan mekanik dan pengecoran logam, dan (6) studi tentang kependudukan wilayah NTT. Di samping itu telah pula dilakukan riset tentang tanaman endemik NTT utamanya tentang budidaya tanaman cendana.

Berbagai masukan dan informasi yang terkait dengan permasalahan di wilayah perbatasan telah dikumpulkan. LIPI mulai melaksanakan kegiatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) terutama di wilayah Kabupaten Belu. Dipilihnya Propinsi NTT didasari pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Wilayah NTT merupakan daerah perbatasan Republik Indonesia (RI) dengan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL). Dengan kondisi geo-

grafis, topografi, dan iklimnya yang lebih banyak musim kering menjadikan daerah NTT sebagai daerah yang kering. Kekeringan yang melanda daerah ini hampir 80% waktu sehingga daerah NTT menjadi kurang produktif khususnya di bidang pertanian yang merupakan mata pencaharian utama sebagian besar penduduk;

Berbagai dinamika yang terjadi di Timor Timur sejak tahun 1975, dampaknya berimbas terhadap penduduk di kawasan NTT. Perang saudara dengan segala konsekuensinya membuat kawasan perbatasan NTT menjadi tumpuan utama bagi puluhan ribu pengungsi dari Timor Timur tersebut.

Ketidakeimbangan pembangunan antara kedua kawasan selama Timor Timur berstatus sebagai propinsi ke-27 RI, secara psikologis menimbulkan dampak negatif khususnya terhadap masyarakat perbatasan. Sebagai propinsi baru dan kepentingan politik luar negeri

Indonesia, dalam pembangunan Timor Timur mendapat perhatian yang khusus dari Pemerintah Pusat. Sementara itu, perhatian Pemerintah Pusat terhadap NTT tidak banyak mengalami perubahan. Akibatnya, kemajuan dibidang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicapai daerah NTT terasa jauh di bawah kemajuan daerah Timor Timur.

Beban akibat ratusan ribu pengungsi di daerah perbatasan NTT kembali terjadi pada tahun 1999 yaitu setelah diumumkannya hasil jajak pendapat yang menimbulkan kekacauan sosial dan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengakibatkan lepasnya Timor Timur dari wilayah RI.

LIPI telah memiliki data mengenai NTT serta pengalaman mengimplementasikan kegiatan baik diseminasi hasil penelitian maupun pemberdayaan masyarakat.

Lingkup Kegiatan

Permasalahan yang mengemuka di wilayah perbatasan banyak ragamnya dan juga cukup kompleks. Untuk menangani permasalahan secara menyeluruh tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu perlu segera ada tindakan nyata yang mengarah kepada penyelesaian masalah. Sesuai dengan keadaan sumber daya yang dimiliki LIPI, kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Perbatasan NTT difokuskan pada 3 bidang, yakni : Studi Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat, Implementasi Teknologi, dan Kajian Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air.

Implementasi Teknologi

Permasalahan yang mengemuka dan tidak kalah seriusnya untuk segera mendapat penanganan adalah masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan dan keterbelakangan bertalian langsung dengan masalah kebutuhan dasar manusia yaitu sandang,

Tabel 1
Daftar Kegiatan LIPI di Wilayah Perbatasan di NTT 2003 hingga 2006

No	Jenis Kegiatan / Hasil Kajian	Pelibatan Unit ₂ Kerja	Obyek / Lokasi Kegiatan			
			2003	2004	2005	2006
1	Studi Eksosbud Masyarakat Perbatasan RI dan Timor Leste sebagai Pengembangan Standard Hidup.	Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)	Kab. Belu	Kab. Belu	-	-
2	Perbaikan Mutu Genetik dengan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio pada Sapi dan Kajian Usaha Tani HMT	Puslit Bioteknologi	Kab. Belu	Kab. Belu	Kab. Belu	Kab. Belu
3	Model Konservasi Ekosistem Savana dan Agroforestry Cendana di NTT.	Puslit Biologi	Kab. Belu	Kab. Belu	Kab. Belu	Kab. Belu
4	Perbaikan Agronomi Tanaman Pangan dan Pengembangan UKM untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kawasan Perbatasan RI – RDTL.	Puslit Biologi	Kab. Belu	-	-	-
5	Pengembangan Unit Produksi Alkohol Berbasis Nira Lontar untuk Penyediaan Kebutuhan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Farmasi dan Pemanfaatan Tanaman Cajanus cajan(L) Mill Untuk Produksi Kecap di NTT	Puslit Biologi	Kab. Belu	Kab. Belu	Kab. Belu	-
6	Pengembangan Agroindustri Unggulan Daerah Wilayah Perbatasan NTT.	Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna (B ₂ PTTG)	Kab. Belu	Kab. Belu	Kab. Belu	Kab. Belu
7	Rancang Bangun Stasiun Relay Pemancar Televisi Multikanal di Wilayah Perbatasan NTT	Puslit Elektronika dan Telekomunikasi (P ₂ ET)	Kab. Belu	Kab. Rote Ndao	Kab. TTU	Kab. Belu
8	Implementasi Teknologi Tepat Guna dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur	B ₂ P TTTG	-	Kab. Belu	Kab. Belu dan Kab. TTU.	Kab. Belu dan Kab. TTU.
9	Instalasi Peralatan Digital Radio Point To Point di Wilayah Perbatasan, Nusa Tenggara Timur (NTT)	P ₂ ET	-	Kab. Belu	Kab. Belu	Kab. Belu
10	Implementasi Mesin Es Balok Kapasitas 2 Ton/hari untuk Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Daerah Perbatasan NTT.	Puslit Tenaga Listrik dan Mekatronik	-	Kab. Belu	Kab. TTU dan Kab. Rote Ndao	Kab. Alor
11	Model Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Perbatasan NTT.	Puslit Ekonomi	-	-	Kab. Belu	-
12	Pengungsi Timor Timur: Permasalahan dan Solusinya.	PMB	-	-	Kab. Belu	-
13	Mobilitas Penduduk dan Pengembangan Potensi Perdagangan di Wilayah Perbatasan.	Puslit Kependudukan	-	-	Kab. Belu	Kab. Belu
14	Penyelidikan Air Tanah untuk Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Belu - NTT.	Puslit Fisika	-	-	Kab. Belu	Kab. Belu
15	Pemetaan Sumberdaya Air dan Penerapan Sumur Optimalisasi Air Bersih di Daerah Kabupaten Belu, NTT.	Puslit Geoteknologi	-	-	Kab. Belu	Kab. Belu
16	Aplikasi dan Validasi Model Konservasi Flora, Tanah, dan Sumberdaya Air di Kabupaten Belu - NTT.	Puslit Biologi	-	-	-	Kab. Belu
17	Budaya Korporat dan Upaya Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Belu	PMB	-	-	-	Kab. Belu



pangan, papan (perumahan), dan informasi. Untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di daerah perbatasan NTT termaksud, LIPI mengintroduksi berbagai teknologi yang sebelumnya telah dikembangkan oleh unit – unit kerja LIPI, antara lain yaitu teknologi peternakan, teknologi pasca panen (teknologi tepat guna), dan teknologi informasi.

NTT terkenal sebagai daerah penghasil sapi potong. Sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan akan daging sapi khususnya dari Pulau Jawa, volume penjualan sapi potong ke luar NTT pun terus meningkat. Sementara pengelolaan peternakan (sistem beternak) sapi potong masih dilakukan secara tradisional sehingga jumlah sapi potong yang ada di daerah NTT dari waktu ke waktu semakin menurun. Penurunan juga terjadi pada kualitas ternak akibat dari perilaku pedagang yang memburu ternak yang berkualitas baik dan menolak yang kualitasnya kurang baik. Untuk memperbaiki kualitas sapi potong tersebut. LIPI menurunkan pakar “embryo transfer” guna mengintroduksi teknologi perbaikan mutu genetik sapi potong.

Kondisi wilayah yang relatif kering

dengan musim penghujan rata-rata selama 3 bulan pertahunnya. Akibat dari kondisi alam tersebut membuat daerah NTT lebih berpotensi sebagai daerah peternakan dan perkebunan. Komoditi dari sektor perkebunan yang menonjol adalah kemiri, jambu mete, kelapa, dan kopi. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan minimnya akses terhadap informasi, komoditas tersebut dijual dalam bentuk mentah sehingga harganya sangat rendah. Untuk membantu meningkatkan pendapatan penduduk dari komoditas perkebunan tersebut LIPI memperkenalkan dan mengimplementasikan teknologi tepat guna proses pasca panen.

Guna membantu memperoleh akses terhadap informasi diperkenalkan Telepon Pedesaan (*Digital Radio Point To Point*) dan Rancang Bangun Stasiun Relay Televisi (*Televisi Recieve Only / TVRO*). Sementara, untuk membantu para nelayan dalam pengawetan hasil tangkapannya, LIPI mengintroduksi Implementasi Mesin Es Balok berkapasitas 2 Ton/hari.

Kajian potensi pemanfaatan sumber daya air

Daerah Kabupaten Belu, merupakan daerah kering. Setiap tahun, musim penghujan hanya

berlangsung pada bulan-bulan Desember – Maret. Pada sejumlah daerah, kondisi sumberdaya air sudah mencapai tingkat kritis, pasokan air bersih sangat kurang dan hanya bisa diperoleh selama musim penghujan saja. Agar masalah kekurangan air bersih tersebut dapat diatasi, LIPI menerjunkan Tim Peneliti khusus untuk melakukan kajian potensi sumberdaya air di Kabupaten Belu dan sekitarnya. Dengan tersedianya air bersih yang cukup diharapkan dapat menjadi pemicu berkembangnya kegiatan-kegiatan lain baik yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun oleh pihak lain.

Kesimpulan

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LIPI dimaksudkan sebagai *trigger* bagi calon-calon pelaku pembangunan berikutnya (para investor maupun instansi pemerintah lainnya), namun demikian dampak lain yang kini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat adalah sebagai lahan bisnis, seperti misalnya implementasi *Digital Radio Point to Point* (Telepon Pedesaan) yang telah memberikan manfaat yang cukup berarti bagi masyarakat pengguna telepon SLJJ di Motaain. Kegiatan lain, yang juga berpotensi sebagai income generator bagi masyarakat adalah pabrik es balok, inseminasi buatan dan transfer embrio pada sapi, sedangkan hasil-hasil kajian sosial dan bidang ekonomi, bermanfaat sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

***) Perencana Madya LIPI**

Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D*
Alfi Hariswanto, SAP, MAP, MMG**

Perencanaan E-Government dan Penerapannya di Indonesia

(Studi kasus E-Government di Jawa Timur)

Artikel ini menganalisis perencanaan E-Government dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, cepat dan transparan serta tercapai efisiensi dan efektifitas. Dalam penerapannya di berbagai negara E-Government memiliki tingkat keberhasilan yang bervariasi. Di Indonesia E-Government mulai dirintis sejak dikeluarkannya Inpres No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dan mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara bulat disepakati DPR. Dalam implementasinya E-Government menemui berbagai tantangan dan hambatan di antaranya keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki, lemahnya komitmen dari pimpinan birokrasi dan infrastruktur yang masih terbatas. Paper ini menyarankan agar Diklat E-government dilaksanakan sebelum, pada saat dan pasca penerapan E-government di daerah.

Pendahuluan

Era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat memaksa pemerintah (sektor publik) untuk tidak ketinggalan berupaya melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan pada masyarakat dengan berbasis pada Teknologi Informasi. Esensi dari E-Government adalah pemanfaatan IT (*Information Technology*) sebagai sarana

untuk membantu kegiatan pemerintahan secara lebih efisien.

Tujuan dari pelaksanaan *electronic government* antara lain adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan. Cepat di sini dapat terwujud dengan bantuan piranti teknologi berbasis web yang memungkinkan terjadinya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat

(*citizen*) secara *online*. Sedangkan yang dimaksud transparan adalah adanya keterbukaan informasi yang seharusnya memang menjadi konsumsi untuk masyarakat. Di sini hak-hak masyarakat, khususnya dalam mendapatkan informasi dapat lebih mudah untuk diterima karena bagi masyarakat tidak dibutuhkan prosedur dan waktu yang terlalu rumit untuk mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan.

Sementara itu muncul juga ketakutan dari sebagian karyawan pemerintah bahwa dengan adanya *electronic government* ini akan mengusur tugas dan peran mereka yang selama ini telah mereka kerjakan yang artinya berpengaruh terhadap sumber pendapatan mereka. Sebenarnya ketakutan semacam ini cukup beralasan. Karenanya, menjadi tantangan bagi para pembuat kebijakan agar nantinya E-Government keberadaannya justru bukan menjadi sebuah ancaman bagi eksistensi dan kesejahteraan para pegawai/karyawan, namun justru menjadi pendorong tercapainya kinerja dan produktifitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Harapan untuk berkembangnya E-Gov demikian tingginya baik di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Masyarakat sangat membutuhkan adanya solusi dari problem birokrasi yang sampai kini masih menjadi *barrier* /penghambat berbagai bidang kehidupan. Hal yang paling sederhana misalkan adalah dalam masalah data kependudukan di Indonesia yang masih belum tertata dengan baik. Banyaknya penduduk yang memiliki KTP ganda mengindikasikan bahwa manajemen data kependudukan kita masih sangat kurang memadai.

Komitmen yang telah dimiliki oleh para *top level* dalam pemerintahan tidak akan memiliki daya dorong yang maksimal apabila tidak diiringi dengan pembangunan sistem informasi (E-Gov) yang bersifat komprehensif dan terencana serta benar-benar dilakukan monitoring yang intens dalam pelaksanaannya. Keterlibatan dari seluruh aktor baik Pemerintah, Privat maupun masyarakat menjadi landasan untuk tercapainya cita-cita pembangunan E-Gov di Indonesia.

Namun demikian, menjadi sebuah pertanyaan penting untuk melihat apakah memang keberadaan piranti teknologi dan adopsi paradigma pemerintahan yang elektronik sudah sedemikian mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan yang diperoleh oleh masyarakat? Sudah mampukah E-Gov memangkas semua *opportunity cost* yang menyebabkan pelayanan itu sendiri inefisien dan inefektif, dan yang lebih penting mampukah e-gov mengikis segala beban sosio-kultural dan ekonomi yang muncul baik dari sisi aparat penyedia layanan sendiri maupun bagi masyarakat. Berbagai pertanyaan tersebut menjadi latar belakang problematis dari penelitian ini.

Untuk penerapan E-Government sendiri beberapa daerah yang telah

menerapkan E-Government antara lain Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang.

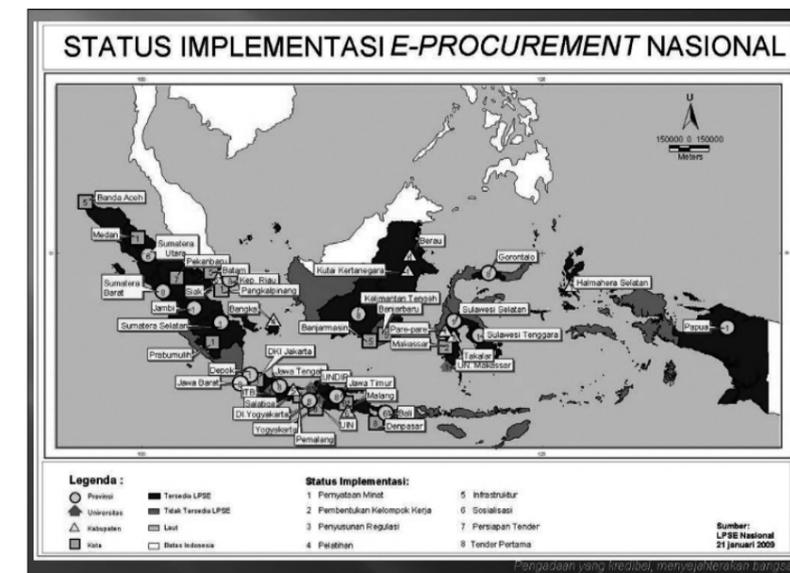
Studi Kasus Jawa Timur

Pemerintah Jawa Timur juga telah mengembangkan *Electronic Government (E-Gov)* sebagai wujud dari pelaksanaan pelayanan publik yang diharapkan dapat meningkatkan jangkauan akses pelayanan publik secara lebih merata dan berkualitas. Dimulai dengan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Pemerintah Jawa Timur bekerjasama dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Dasar hukum dari pelaksanaan e-Gov adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun sebelum keluarnya UU yang mengatur tentang ITE tersebut Kota Surabaya sendiri telah melaksanakan E-Procurement dengan mengacu pada beberapa landasan yuridis yang ada.

Alasan pentingnya penerapan E-Gov ini bagi sektor pemerintah antara lain adalah untuk menciptakan tercapainya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan serta akuntabel. Saat peneliti menghadiri Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Hotel Utami yang diselenggarakan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Jatim bekerjasama dengan LPSE dalam rangka menghimpun data penelitian, dalam forum tersebut dinyatakan bahwa latar belakang dari munculnya inisiatif dari pemerintah untuk menggunakan pendekatan elektronik dalam pengadaan barang dan jasa antara lain adalah bahwa terdapat 30% atau sekitar 90 Trilyun rupiah untuk terjadinya inefisiensi pengelolaan keuangan negara. Data lain yang tidak kalah pentingnya bahwa 80% atau 28.000 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) adalah pada masalah pengadaan barang dan jasa. (LKPP, 2009)

Secara nasional E-Procurement ini telah siap di beberapa propinsi sebagaimana dalam peta berikut:



Sumber: LKPP (Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang dan Jasa), 2009

Dari Peta di atas kita bisa mengetahui bahwa Jawa Timur adalah salah satu dari daerah yang mendapat status telah menjalankan pelayanan publik melalui implementasi *E-procurement*, pada peta itu pula ada beberapa lokasi di Jawa Timur yang disebutkan secara khusus untuk implementasi *E-Procurement* ini yakni Malang dan UIN (Universitas Islam Negeri), hal itu menunjukkan bahwa *E-Procurement* juga telah di jalan di pemerintah daerah dan Universitas Negeri yang ada di Jawa Timur.

Ada beberapa kelebihan sistem manual dibanding elektronik dalam pengadaan barang/jasa, diantaranya:



Sistem komputerisasi yang terkoneksi secara *online* menjadikan Informasi yang disediakan dapat diakses siapa saja

No.	Uraian	Manual	Elektronik
1.	Proses Administrasi	Sulit	Mudah
2.	Pendaftaran Vendor	Berulang-ulang	Satu kali saja
3.	Penyerahan Dokumen	Data langsung	Melalui internet
4.	Frekuensi Tatap Muka	Sering	Hampir tidak ada (<i>faceless</i>)
5.	Kerahasiaan Peserta Tender	Tidak terjamin	Terjamin
6.	Transparansi	Rendah	Tinggi
7.	Persaingan	Relatif Tertutup	Terbuka
8.	Peluang KKN	Terbuka	Tertutup
9.	Panitia Pengadaan	Susah tidur	Nyenyak

Sumber: Makalah presentasi oleh LKPP (Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa) dalam Seminar Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik, 4 November 2009 di Hotel Utami Surabaya

Dinas-dinas yang ada di Pemerintah Provinsi Jatim telah menerapkan *E-Government*, seperti contohnya di Dinas Koperasi dan Perindustrian Jatim. Di sana telah menerapkan E-lelang dalam pengadaan barang dan jasa. Prosedur pendaftaran bagi para rekanan yang akan mengikuti tender dengan sistem komputerisasi yang terkoneksi secara *online*. Informasi yang disediakan pun dirilis secara terbuka sehingga siapa saja bisa mengetahui pengumuman adanya peluang untuk mengikuti seleksi pengadaan barang dan jasa tersebut. Hal ini berbeda dengan masa sebelumnya

dimana informasi mengenai pengadaan dan jasa hanya diketahui oleh mereka yang dekat dengan dinas atau badang yang menyelenggarakan proses lelang. Diakui juga oleh mereka bahwa penerapan *E-Gov* di bidang pengadaan barang dan jasa yang dikenal sebagai *E-Procurement* belum sepenuhnya secara total menggunakan piranti teknologi / sistem komputerisasi yang *online*. Sebagian tahap dalam pengadaan barang dan jasa tersebut masih perlu untuk memakai pendekatan konvensional. Berdasarkan informasi dari instansi tersebut disebutkan bahwa tidak mungkin semuanya menggunakan sistem online, karena kita perlu untuk melihat spesifikasi barang atau jasa yang mereka tawarkan. Untuk beberapa item/jenis pengadaan

barang dan jasa mungkin bisa sepenuhnya dengan *online*, namun untuk pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan penjelasan yang kongkrit dan menuntut adanya contoh model dan penjelasan yang sangat detail maka itu sangat sulit jika harus sepenuhnya menggunakan sistem *online*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Biro Administrasi Setda Provinsi Jatim ditemukan data sebagai berikut:

Jenis Penghematan	<i>E-Procurement</i> %	Konvensional %
Konstruksi	5 – 40	3 – 5
Barang	10 – 50	10 – 50
Jasa	5 – 50	5 – 50

Sumber: Biro Administrasi Setda Provinsi Jatim, 2009

Dari data di atas bisa terlihat bahwa dengan adanya pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik (*E-Procurement*) mampu melakukan penghematan secara signifikan khususnya pada jenis pengadaan Konstruksi. Hal tersebut menjadikan pelaksanaan



E-Procurement di Pemerintah Jawa Timur menjadi semakin tertantang untuk lebih meningkat.

Tantangan dan Hambatan

Sementara itu ternyata pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa ini juga tidak berarti tanpa hambatan. Ada beberapa jenis hambatan yang ditemukan oleh Biro Administrasi Setda Provinsi Jawa Timur, 2009 terkait dengan implementasi *E-procurement*, antara lain :

- Kemampuan penalaran terhadap IT
- Paradigma pengadaan barang/jasa sebagai momok yang ditakuti
- Daya dukung sarana dan prasarana yang kurang memadai
- *Policy* dan *Support* dari pimpinan yang kurang mendukung
- *Rewards* yang terbatas
- Pemahaman tata cara pengadaan.

Temuan penting menyangkut dukungan dari para aparat pelaksana terhadap pelayanan pengadaan barang atau jasa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Prosentasi
Menolak <i>E-Proc</i> (Sudah Nyaman dengan Sistem Konvensional)	70 %
Mendukung <i>E-Proc</i>	15 %
Asal Ikut	15 %

Sumber: Biro Administrasi Setda Provinsi Jawa Timur, 2009

Dari data di atas kita bisa mengetahui bahwa sebagian besar (70%) aparat pelaksana menolak penggunaan *E-Procurement* ini, hanya 15 % yang sepenuhnya mendukung, dan sejumlah 15 % aparat yang tidak memiliki sikap untuk mendukung atau menolak.

Artinya dukungan dari dalam organisasi pemerintah sendiri masih kurang optimal, hal ini dikarenakan sebagian besar aparat pemerintah masih merasa nyaman dengan model pengadaan barang dan jasa secara manual (konvensional).

Kesimpulan dan Saran

E Government dapat mengefisienkan dan mengefektifkan fungsi-fungsi layanan publik, serta meminimalisir beberapa hambatan birokrasi. Namun perencanaan *E Government* perlu dilakukan secara maksimal dan komprehensif. SDM dan Lingkungan dimana *E-Government* akan diterapkan perlu dipersiapkan secara maksimal. Kurangnya persiapan hal ini akan mengakibatkan penerapan *E-Government* pada tahap awal akan mengalami banyak hambatan yang bisa menghambat kinerja pelayanan publik tersebut. Oleh karena itu Diklat *E-Government* sebelum, pada saat dan pasca penerapannya perlu dilakukan bagi para aparat Di Jawa Timur dan pengguna jasa layanan ini.

*) Direktur Program Studi MAP dan Program Internasional *Double Degree Master Unibraw*

**) Koordinator Program Internasional *Double Degree Master Unibraw*



Urbanus M. Ambardi*

Perbandingan Perencanaan dan Pembangunan Indonesia-Jepang (Tinjauan Historikal)

Menjalani *Time Table* program Diklat TOT II ke Jepang merupakan pengalaman baru sekaligus menarik. Melalui metode gabungan antara pembelajaran di kelas dan *field trip*, peserta diklat diajak untuk berpikir sekaligus melihat langsung kondisi riil di lapangan.

Pada awalnya, agak kesulitan untuk membiasakan telinga mendengar percakapan bahasa Inggris para professor di Universitas Ritsumeikan. Namun dengan berusaha fokus dan sedikit berkonsentrasi, akhirnya menjadi semakin *clear* dan dapat menangkap isi ceramah dan perkuliahan.

Program diklat TOT dimaksudkan selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan peserta yang sebagian besar datang dari kalangan universitas di Indonesia, juga diarahkan agar peserta dapat berfungsi sebagai "*think thank*" dalam

penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (diklat JFP) juga nantinya sebagai pengajar dalam melatih peserta-peserta diklat perencana pembangunan nasional di bawah koordinasi Bappenas.

Setelah menjalani proses pembelajaran ilmu perencanaan pembangunan selama satu minggu di Universitas Indonesia-Jakarta dan dua minggu di Jepang dengan kombinasi perkuliahan di kelas dan kunjungan-kunjungan ke municipal di beberapa kota di Jepang, ada beberapa pemahaman dan pengalaman yang perlu disampaikan berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan.

Dengan tidak bermaksud mengungkapkan tentang baik-buruk, plus-minus dan positif negatifnya, tulisan ini dimaksudkan sebagai tinjauan "*historical*" perencanaan

pembangunan antara kedua negara sebagai bentuk "permenungan" penulis selama berkempatan "menyaksikan" hasil-hasil pembangunan di Jepang

Sekilas Umum pembangunan Jepang

Jepang adalah Negara yang khas. Kekhasannya terdiri dari berbagai dimensi dan variasi aspek kehidupannya. Mulai dari sistem budaya, hingga budaya kerja-kolektif. Mereka bukan bangsa yang mudah meniru dalam tatanan struktur sosial budaya. Begitu juga dalam sistem perekonomiannya. Ketika orang Jepang pergi belajar ke berbagai negara di Amerika atau Eropa, kemudian kembali ke negaranya untuk membangun, para ilmunya tidak begitu saja "menjiplak" pola umum pembangunan ekonomi yang dikembangkan di Negara Barat. Para ilmuwan Jepang



mengembangkan sistem perekonomiannya dengan memanfaatkan keunikan sistem sosial dan sistem budaya yang mereka miliki. Jika ingin mengkaji modernisasi Jepang, kajian tentang sistem budaya masyarakat Jepang yang terjadi ratusan tahun yang lalu adalah suatu "keharusan". Ekonomi modern berkembang secara simultan dengan identitas budaya nasionalnya. Banyak pengamat Barat menyebut bahwa *cultural identity* dan *social institution* adalah embrio kapitalisme Jepang.

Ilmuwan Barat menjuluki kebangkitan perekonomian Jepang sebagai sebuah pengecualian menyimpang (anomali) dan paradoksal. Meskipun Jepang belajar pada sistem kapitalis yang dibangun dan dikembangkan oleh negara-negara Barat, namun Jepang tidak begitu saja mengadopsinya. Dengan *self confidence* terukur, Jepang membangun sistem perekonomiannya dengan mengadaptasinya sesuai dengan sistem sosial-budaya masyarakat Jepang, sehingga tumbuh secara unik dan berkarakter ketimuran yang kuat.

Bagi ilmuwan Jepang teori ekonomi Barat hanya dianggap sebagai "bahan baku," dan bukan alat yang langsung bisa dipakai. Para perencana ekonomi Jepang tidak pernah percaya bahwa untuk menjadi negara maju, nilai-nilai tradisional harus dipinggirkan seperti yang terjadi di Barat. Bahkan sebaliknya nilai-nilai tradisional adalah potensi yang dapat dijadikan sebagai katalis dan energi aktivasi serta dipadukan dengan teknologi modern untuk membangun suatu sistem perekonomian yang tangguh. Model perpaduan inilah yang disebut sebagai "dualisme ekonomi." Dan ini sekaligus menjadi salah satu rahasia sukses perekonomian Jepang.

Strategi Pembangunan Ekonomi Jepang

Menyimak dan mempelajari sistem perekonomian Jepang tidak cukup hanya menggunakan lensa ekonomi, namun perlu menggunakan lensa sosial-budaya sebagai alat bantu untuk mempelajari perekonomian Jepang. Pemerintah Jepang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sosial, dan mengintegrasikan

tradisi sosial ke dalam sistem pembangunan ekonomi.

Dari tinjauan mikro, salah satu aspek yang mendorong keberhasilan Jepang dalam membangun sumberdaya manusia paska perang dunia II adalah membudayakan sistem "Kerja Kelompok" (*team work*). Para insinyur Jepang yang dikirim ke Barat untuk belajar harus kembali ke Jepang dengan membawa ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, ilmu dan teknologi yang mereka bawa harus diajarkan kepada semua anggota kelompoknya. Pengetahuan itu harus merata di antara anggota. Jika tidak, kelompok itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Dilihat dari aspek makro pembangunan, Jepang memprioritaskan kebijakan pemerataan pembangunan. Di antara negara-negara maju, Jepang adalah negara yang paling tinggi tingkat pemerataan hasil-hasil pembangunannya. Bukan hanya dari aspek pendapatan tetapi juga meliputi fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur-fisik, dan lain-lain. Dari beberapa bahan rujukan tentang kota paling selatan Okinawa sampai daerah paling utara Hokaido, dan pengalaman pandangan mata selama perjalanan ke beberapa kota di Jepang seperti Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe, Kusatsu, Nigata, Kitakyusu, Oita dan kota-kota lainnya, rakyat Jepang masa kini sudah menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur fisik dan sosial, dan fasilitas publik lainnya. Daerah pedesaan di pegunungan mempunyai fasilitas jalan, air minum dan listrik kurang lebih seperti di Tokyo, Kyoto, Osaka dan kota-kota besar lainnya.

Sumberdaya Domestik

Perbedaan yang cukup signifikan antara Jepang dan negara maju lainnya dalam hal sumberdaya pembangunan terletak pada bagaimana Jepang sangat sedikit



menggunakan sumberdaya modal dari luar (hutang luar negeri) untuk pembangunan terutama pada dekade awal pembangunan industri.

Sementara negara-negara Eropa seperti Belgia, Perancis, bahkan Rusia justru menggantungkan pada *foreign capital* (hutang luar negeri) yang difasilitasi oleh "*British Capital*" dan "*French Capital*" pada era tahun 1800-an.

Jepang memang tidak menggantungkan pada *foreign capital* untuk membiayai pembangunan ekonominya oleh karena beberapa alasan yaitu :

1) Investor asing tidak tertarik berinvestasi karena Jepang bukan negara yang kaya sumberdaya alam sehingga "*capital-inflow*" dalam bentuk "*Foreign Direct Investment (FDI)*" tidak terjadi.

2) Pemerintah Jepang pada saat itu benar-benar belajar dari pengalaman negara-negara lain yang mengalami kesalahan dalam mengelola *foreign capital* seperti yang terjadi di Mesir dan Turki yang menyebabkan "kekacauan ekonomi" kedua negara tersebut.

Belajar dari kegagalan negara lain, pemerintah Jepang kemudian dengan giat mengonsolidasikan sumberdaya domestik dan mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk menjadi mitra pemerintah dalam membangun dan memajukan perekonomian nasional, serta membantu dan memfasilitasi masyarakatnya menjadi pengusaha-pengusaha baru. Dengan mengefektifkan sumberdaya-sumberdaya baru tersebut, Jepang memulai revolusi industrinya sebagai kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam sejarah Jepang, sebelum tahun 900, pinjaman luar negeri yang terbesar tercatat 5 juta yen yang dipinjam pada tahun 1870 ketika membangun ruas jalan kereta api antara Tokyo dan Yokohama. Prosentase pinjaman tersebut sangat kecil dibandingkan dengan total dana yang dipakai untuk membangun ruas jalan kereta api pada saat itu.

Memprioritaskan Pembangunan Infrastruktur Sosial

Keunggulan Jepang lainnya dalam hal rekonstruksi perekonomian pasca perang dunia II yang meng-

hancurkan sebagian besar infrastruktur fisik adalah bahwa infrastruktur sosial yang dibangun sejak masa keemasan samurai tidak ikut hancur. Meskipun infrastruktur fisik luluh lantak, pengangguran besar-besaran tak dapat dihindari, namun sistem pendidikan yang telah diwajibkan pada masa Tokugawa dan para "shohun" (jendral, militer) terus didorong agar masyarakat untuk belajar, terutama dalam hal membaca dan menulis serta terus membangun sistem pendidikan dan *business tradition*. Dua infrastruktur sosial penting inilah yang telah dibangun dan pada akhirnya menjadi landasan yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi moderen di Jepang dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya dalam kurun waktu 25 tahun. Hal ini mencerminkan bahwa "Sumber Daya Manusia" merupakan hal sangat penting sebagai bagian dari "infrastruktur sosial" dalam proses pembangunan.

Di masa lalu dalam sistem pemerintahan yang otokratis feodalisme, dimana Jepang masih menutup diri dari pergaulan internasional dan sistem perekonomian modern tidak dapat dilaksanakan, peranan sekolah yang diprakarsai oleh kuil-kuil budha cukup mendorong iklim dan tradisi bisnis, sehingga masyarakatnya dapat bertahan secara berswadaya dan mandiri. Pertanian terutama hasil-hasil pertanian dilakukan dengan sistem *cooperation and joint-undertaking*.

Dari berbagai sumber bacaan diperoleh informasi bahwa berdasarkan tradisi negara-negara di Eropa, iklim industrialisasi dianggap berseberangan dengan unsur tradisional, sehingga solusinya adalah apabila suatu negara menganut industrialisasi sebagai jalan menuju kesejahteraan kolektif, maka unsur tradisional harus "dihapuskan."

Yang terjadi di Jepang sebaliknya, nilai-nilai dan institusi tradisional

justru tetap dipertahankan, bahkan sampai sekarang, di era globalisasi ekonomi. Nilai-nilai tradisional tetap eksis dalam manajemen dan praktek bisnis. *Life-time employment, seniority based system, dan traditional family system* adalah contoh-contoh nilai dan institusi tradisional Jepang yang masih terpelihara hingga sekarang. Meskipun sudah banyak kritikan dari masyarakat internasional maupun dari masyarakat Jepang sendiri tentang kelemahan sistim nilai tersebut. Para pengeritik mengadvokasi untuk meninggalkannya dan mengadopsi "manajemen modern" yang dikembangkan di Barat sebagai gantinya. Tetapi sebagian besar dari mereka terus dan masih meyakini bahwa justru dengan model seperti itu Jepang bisa menjadi negara yang disegani dalam bidang ekonomi, sains, dan teknologi.

Inilah potret bagaimana sistem perekonomian Jepang dibangun melalui karakter sosial budaya yang "*mature*" dan tangguh setelah kehancuran ekonomi dan trauma mendalam pasca Perang Dunia II. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi mereka mengembangkan model mereka sendiri. Mereka beranggapan bahwa konsep dan sistem perekonomian yang dirakit di barat dianggap baru mencapai proses "bahan-baku", dan belum "*ready to use*."

Pola Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Pada abad ke-19, kata pembangunan lebih bermakna industrialisasi yang dianggap akan mampu memanusiaakan manusia. Paradigma ini seperti bercermin pada revolusi industri yang terjadi di Perancis pada saat itu. Perkembangan selanjutnya, awal abad ke-20, dalam pemikiran ekonomi pembangunan moderen, arti kata pembangunan lebih diidentikkan dengan *economic growth* yang digerakkan oleh ekonom-ekonom Amerika. Pada



saat itu, mekanisasi dan industrialisasi menjadi "mesin ekonomi" dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Economic growth dikombinasikan dengan politik modernisasi seperti; *nation building, and social modernization* seperti promosi kewirausahaan dan orientasi prestasi dalam manajemen perusahaan (Pieterse, 2001:6). Pendekatan *economic growth* sebagai proses dan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia sangat percaya pada paradigma "*trickle down effects*" dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghasilkan akumulasi pendapatan nasional yang pada gilirannya akan terdistribusi ke lapisan bawah. Pada akhirnya terbukti dalam pelaksanaannya asumsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat terjadinya malapraktek pembangunan. Bahkan promosi *economic growth* tidak sedikit menimbulkan masalah baru terutama di negara-negara berkembang seperti yang terjadi di Indonesia. Disparitas pendapatan antara si kaya

dan si miskin semakin tajam, disparitas daerah antar Jawa dan luar Jawa, dan disparitas kota dan desa semakin melebar sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga tahun 1997 (sebelum krisis ekonomi).

Berawal dari UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa bahwa tujuan dan sasaran pembangunan adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, pemerintah Indonesia secara bertahap menuangkan kerangka kerja lima tahunan. Meskipun pada era pemerintahan Orde Baru sampai Orde Kabinet Bersatu berhasil melakukan pembangunan di berbagai sektor, namun bukan tanpa aral dan hambatan dan tidak sedikit kegagalan pembangunan yang salah satunya diakibatkan *centralized policy system and planning formulation* di bawah pemerintahan Orde Baru. Dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut menyebabkan kemacetan ide/ gagasan yang datang dari inisiatif lokal/ daerah.



Peralihan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden BJ.Habibie, badai reformasi dan demokrasi bertiup kencang seiring bergulirnya otonomi daerah.

Lalu, bagaimana dengan model pembangunan ekonomi di Indonesia selama ini? Bersama kita telah menyaksikan dan mencermati bahwa model pembangunan Indonesia yang dikembangkan selama Orde Baru hingga sekarang masih sangat mengandalkan hutang luar negeri (*foreign capital*) sumberdaya domestik belum dikembangkan dengan baik, industri-industri manufaktur banyak bergantung pada bahan impor dalam proses produksinya; anggaran pendidikan nasional relatif masih rendah dari total APBN, inisiatif dan budaya lokal semakin tidak populer akibat dominasi pemerintah pusat dalam perumusan kebijakan publik, sehingga institusi lokal tak berkembang, praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan nyaris terjadi di berbagai lini, hak "*wong cilik*" untuk hidup layak tidak terurus, lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) yang akhirnya menghasilkan pertumbuhan eko-

nomi semu karena tumbuh hanya dari sektor konsumsi saja, sehingga budaya baru konsumerisme tak terelakkan, sebuah landasan dan fundamental ekonomi yang rapuh.

Seperti halnya Jepang, apakah Indonesia tidak memiliki sumberdaya berupa nilai dan norma sosio-kultural dan sumberdaya domestik yang bisa dijadikan modal dasar pembangunan ekonomi nasional?"

Sebenarnya, ada begitu besar modal dasar sosial budaya dan nilai-nilai tradisional yang dimiliki oleh negeri kita Indonesia. Berbagai suku bangsa yang ada di dalamnya memiliki norma kearifan lokal yang bermuatan positif. Dapat dibayangkan betapa sulitnya mengintegrasikan heterogenitas tersebut menjadi sebuah kesepahaman kolektif. Dan dalam perjalanannya ternyata masih terdapat banyak halangan terutama yang menyangkut persoalan konflik vertikal maupun horisontal, seperti dapat disaksikan di berbagai tayangan berbagai media massa dan elektronik. Pembelajaran masyarakat terhadap sistem demokrasi yang terbuka lebar menjadi sebuah harga yang sangat mahal dan harus dibayar dengan berbagai permasalahan rumit.

Sistem pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah seperti direpotkan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi setiap harinya, dari mulai konflik agraria antara petani dan industri hingga kasus manipulasi dan penyalahgunaan wewenang di dunia perbankan.

Kebijakan untuk mendorong industrialisasi nasional menyebabkan sektor pertanian lambat laun menjadi prioritas kedua dan nyaris tidak populer lagi. Inilah titik awal kemunduran sistem pertanian nasional yang dulu pernah menjadi "*trademark*" Indonesia sebagai negeri agraris.

Pembangunan pedesaan berbasis

pertanian sesungguhnya sebuah keniscayaan dalam konteks perekonomian Indonesia. Namun, karena proses politik dan kebijakan ekonomi makro yang tak berpihak pada sektor pertanian serta besarnya daya tarik ekonomi sektor non-pertanian menjadikan pembangunan pedesaan dan sektor pertanian nyaris terlupakan. Berbagai indikator ekonomi seperti kucuran kredit perbankan untuk sektor pertanian yang hanya sekitar lima persen per tahun dan pengurangan subsidi terhadap input pertanian bisa menjadi pembenar atas pernyataan ini. Selain itu, perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumberdaya manusia (SDM) sebagai bagian integral pembangunan pedesaan dan infrastruktur sosial masih kurang. Hal ini relatif berbeda dengan pendekatan pembangunan di Jepang, dimana pengembangan SDM dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari pengembangan infrastruktur sosial dan salah satu pilar pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, humanisasi pembangunan pedesaan yang mengedepankan pengembangan SDM untuk membangun "*local empowerment*" dan "*local capacity*" perlu mendapat dukungan politik, sehingga pemerintah secara serius membenahinya. Selain itu, lokalisasi kebijakan dan strategi pembangunan perdesaan juga diharapkan bisa menjadi solusi yang tepat dalam memacu laju pembangunan perdesaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Keterbatasan Sumberdaya dan Budaya Iptek

Masih terbatasnya sumber daya iptek tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan kesenjangan pendidikan di bidang iptek. Rasio tenaga peneliti Indonesia masih belum sebanding, sebagai contoh pada tahun 2003 adalah 4,7 peneliti per 10.000 penduduk, jauh lebih kecil dibandingkan Jepang sebesar 70,7.

Selain itu rasio anggaran iptek terhadap PDB sejak tahun 2002 mengalami penurunan, dari 0,052 per-sen menjadi 0,039 persen pada tahun 2004. Rasio tersebut jauh lebih kecil dibandingkan rasio serupa di ASEAN, seperti Malaysia sebesar 0,5 persen (tahun 2002) dan Singapura sebesar 1,89 persen (tahun 2003). Sementara itu menurut rekomendasi UNESCO, rasio anggaran iptek yang memadai adalah sebesar 2 persen. Kecilnya anggaran iptek berakibat pada terbatasnya fasilitas riset, kurangnya biaya untuk operasi dan pemeliharaan. Faktor-faktor ini pulalah yang besar kemungkinan menyebabkan tingginya angka kecelakaan di sektor transportasi yang melanda negara kita pada tahun-tahun belakangan ini.

Di samping itu budaya bangsa secara umum masih belum mencerminkan nilai-nilai iptek yang mempunyai penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri. Pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah yang lebih suka mencipta daripada sekedar memakai. Lebih suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka belajar dan berkreasi daripada sekedar membeli teknologi "siap saji". Sikap masyarakat menjadi semakin konsumtif karena sikap pemerintah yang justru sangat memanjakan kebijakan impor, mulai dari barang-barang manufaktur, elektronik sampai pada kebutuhan pokok seperti beras dan bahkan garam dapur.

Jika mencermati perkembangan perencanaan pembangunan di Indonesia terkini dalam situasi politik yang sangat fluktuatif, maka di sinilah perlunya kita belajar dari pengalaman negara lain, misalnya bagaimana Jepang membangun negaranya dengan berkaca melalui kacamata sejarah (*historical*) dan sumberdaya domestik yang dimiliki sebagai basis kekuatan dalam



sistem perencanaan partisipatifnya yang terbukti benar.

Mengutip tulisan seorang sahabat, Wigny Adiyoso dalam bukunya "Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat" secara gamblang mengatakan bahwa :

Walaupun partisipasi bukanlah "mantra sakti" yang bisa menghidupkan "roh" pembangunan yang sudah menjelang "ajal", gagasan tentang partisipasi masyarakat terus berkembang dan meningkat intensitasnya akhir-akhir ini. Apalagi ketika wacana neoliberalisme vs ekonomi pro rakyat kembali mencuat saat pemilu presiden yang lalu

Isu ini tetap relevan dan penting terus untuk didiskusikan ketika fenomena kemiskinan serta buruknya akses ke-sehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin menjadi keprihatinan sebagian besar orang

sebagai akibat teralenasinya rakyat dari pusaran proses pembangunan

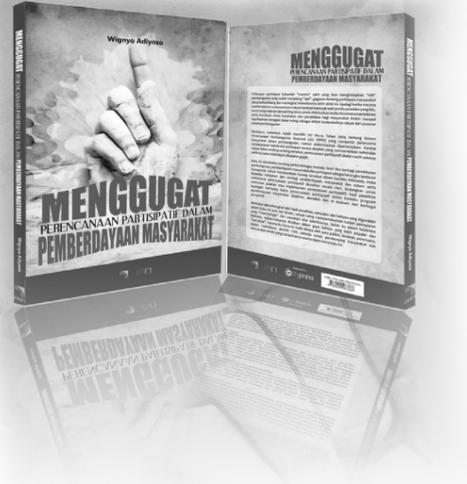
Meskipun, Indonesia sudah memiliki UU no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang menjamin peran serta masyarakat dalam pembangunan, namun efektivitasnya dipertanyakan. Karena ketidakjelasan konstruksi partisipasi secara eksplisit yang mencerminkan kehendak rakyat dalam undang-undang tersebut, perencanaan partisipatif dinilai masih sebatas artifisial, kalau tidak dapat dikatakan gagal.

Inilah fakta umum yang barangkali banyak kalangan juga akan sependapat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah : Bilakah atau akankah kita belajar dari pengalaman bangsa-bangsa?

*) Perencana Madya Sosial - BPPT
Ketua Bidang Litbang AP2I

Oleh: Dedi Nurtanio

Supaya Tidak Mengulang Kegagalan Perencanaan Partisipatif



Judul : Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat
Terbit : Edisi I, Desember 2009
Pengarang : Wignyo Adiyoso
Penerbit : Putra Media Nusantara, Surabaya
Halaman : 124 + Pengantar dan Pustaka

Kata partisipasi memang tak akan pernah hilang dari "kamus" demokrasi dan pembangunan, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Dalam negara yang demokrasinya lebih maju, memang partisipasi lebih terkenal digunakan dalam diskursus politik dan demokrasi ketimbang dalam manajemen pembangunan. Namun dalam konteks negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, masalah partisipasi tetap penting baik dalam konteks politik, demokrasi dan manajemen pembangunan. Dari sisi manajemen pembangunan, tahap perencanaan dianggap penting sebagai tahapan untuk menentukan sukses atau tidaknya suatu konsep untuk menentukan arah yang diinginkan pada kurun waktu tertentu dalam rangka meraih suatu tujuan. Perencanaan tidak saja digunakan untuk menentukan arah dan tujuan yang diinginkan, tetapi juga sarana untuk menghimpun potensi dari seluruh komponen bangsa yang secara bersama-sama menentukan bentuk dan wujud masyarakat dan bangsa apa yang diinginkan. Oleh karena itu, penentuan masa depan suatu bangsa ini tidak bisa diserahkan kepada satu atau beberapa kelompok kecil, melainkan memerlukan

keterlibatan seluruh komponen bangsa. Dalam konteks ini, partisipasi kemudian menemukan justifikasinya.

Buku ini kurang lebihnya ingin menyampaikan gagasan tentang urgensi perencanaan partisipatif dalam pembangunan Indonesia, dimana pada tiga dekade terakhir ini lebih difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Beberapa konsep dan definisi tentang pembangunan, perencanaan, partisipasi dan pemberdayaan dibahas cukup komprehensif walaupun tidak detil. Yang menarik dari buku ini adalah pembahasan "kesejarahan" program-program pemberdayaan masyarakat sejak masa kolonialisme sampai dengan pemerintahan SBY. Dari bab tentang pasang surut program pemberdayaan ini, penulis mengkritisi tentang aplikasi program pemberdayaan yang telah lama dilaksanakan namun tetap mengalami kegagalan. Oleh karena itu tampaknya penulis merasa perlu untuk mengingatkan bahwa walaupun Indonesia telah memiliki UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun efektivitasnya tetap patut dipertanyakan. Hal ini karena sistem dan mekanisme perencanaan partisipatif dalam program pemberdayaan biasanya dananya jelas tersedia dan ada pendampingnya. Di sisi lain sistem dan mekanisme Musrenbang pelaksanaannya "diserahkan" kepada masing-masing daerah tanpa adanya evaluasi dan pengendalian yang jelas dari pemerintah pusat.

Sayang sekali buku yang fokus pada perencanaan partisipatif ini, sedikit sekali pembahasannya tentang sistem dan mekanisme Musrenbang, terutama praktiknya sekarang ini. Karena buku ini memang dikembangkan dari hasil penelitian perencanaan partisipatif dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK), maka jangan berharap ada saran dan masukan yang langsung terkait dengan Musrenbang yang sekarang ini rutin dilakukan oleh pemerintah daerah. Kajian yang menitikberatkan pada Musrenbang dalam kerangka UU SPPN memang harus segera dilakukan dan dievaluasi efektivitasnya. Kalau tidak, seperti yang diingatkan penulis, kegagalan perencanaan partisipatif masa-masa yang lalu akan terjadi lagi. Selain memberikan perspektif baru tentang perencanaan, buku ini dapat menjadi inspirasi bagi penulis lain untuk mengupas tentang efektivitas Musrenbang.

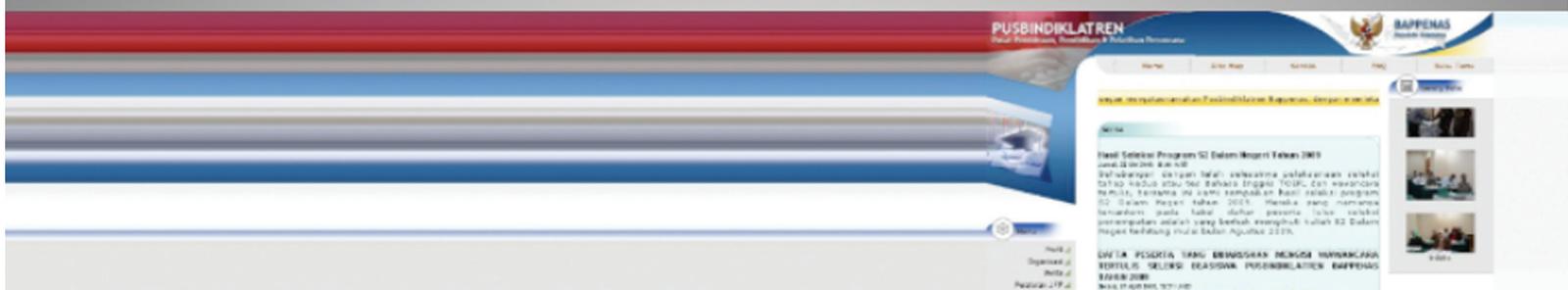
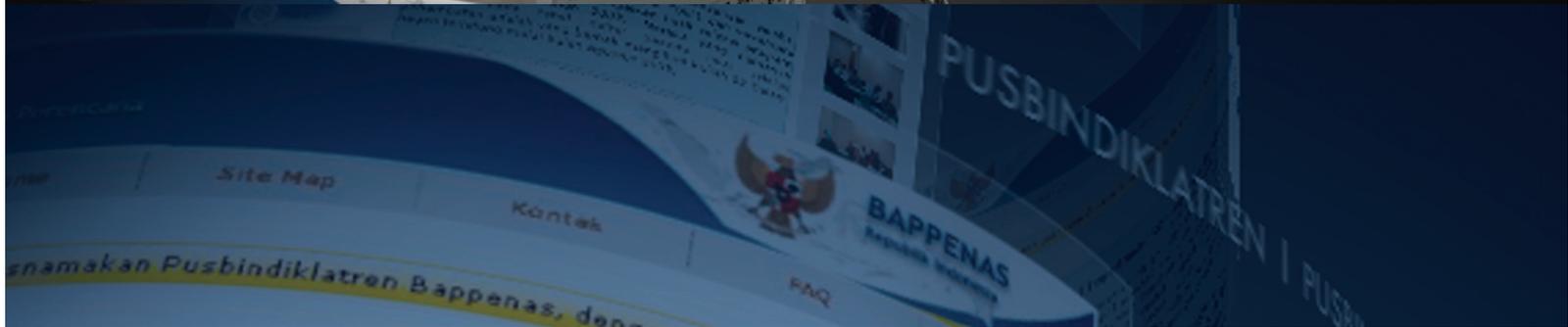


Foto :
 1. Antusiasme pengunjung pameran Pusbindiklatren-Bappenas
 2. MOU Bappenas dengan BPKP dalam Kerjasama Pengembangan SDM
 3. Ka.Pusbindiklatren-Bappenas : Avip Syaefullah dalam pembukaan Rakor dan Workshop Program Diklat Gelar dan Non Gelar, Program TOT LERD, TOT JFP
 Foto 4,5,6, : Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana, saat meninjau "booth" sosialisasi Pusbindiklatren Bappenas Pada Musrenbangnas RPJMN 2010-2014
 Foto 7: Lokakarya Pusbindiklatren - Bappenas tahun 2009



PUSBINDIKLATREN

- Profil
- Organisasi
- Berita
- Peraturan JFP
- Program Diklat
- Kalender Kegiatan
- Publikasi
- Quick Links
- Formulir Diklat Gelar



PUSBINDIKLATREN
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id